

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BELANJA KEGIATAN DENGAN
PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY* PADA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**



PERPUSTAKAAN PUSKAT UIH	
Tgl. Terima	29 september 2006
Asal Dokumen	Ekonomi
Daerah	1
Waktu	Hadiah
No. Lembar	112
No. Klas	-

OLEH

ILHAM ALNI

A311 00 006

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2006**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BELANJA KEGIATAN DENGAN
PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY* PADA SEKERTARIAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**ILHAM ALNI
A311 00 006
AKUNTANSI**

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
Makassar

Disetujui

Pembimbing I



Dra. Hj. Nirwana, M.Si, Ak.

Pembimbing II



Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak.

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BELANJA KEGIATAN DENGAN
PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY* PADA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**OLEH:
ILHAM ALNI
A311 00 006**

TELAH DIUJI DAN LULUS TANGGAL 28 JANUARI 2006

TIM PENGUJI

<u>Nama Penguji</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Drs. M. Cristian Mangiwa, M.Si, Ak.	(Ketua, FE-UH)	1. 
2. Drs. Syamsuddin, M.Si, Ak.	(Anggota, FE-UH)	2. 
3. Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak.	(Anggota, FE-UH)	3. 

DISETUJUI OLEH,

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
Ketua


Drs. H. Amiruddin, M.Si, Ak

Tim Penguji
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Unhas
Ketua


Drs. M. Cristian Mangiwa, M.Si, Ak.

Skiripsi ini kupersembahkan kepada yang teramat
kusayangi;
Ibunda Nilmawati, dan Ayahanda Petta Alimuddin,
serta adik-adikku tercinta, Irfan Alni,
Irmawati Alni, Akmal Jaya,
Faisal Tawakkal, Lili Fauzia
yang telah menjadikan aku pribadi mandiri

Kepada para sobatku; Harfiadi Arifin, Irfan,
Alee, Kak Eman, Kak Irdam,
serta Almamaterku,
Hanya inilah peninggalanku,
bukan suatu Cornucopia

(Cornucopia berasal dari mitodologi yang melambangkan kelimpahan. Benda ini berbentuk tanduk, meruapakan tanduk dewa sungai Achelous, atau tanduk kambing Amalthea, yang akan memenuhi segala permintaan pemiliknya. Kemudian Cornucopia digambarkan sebagai tanduk yang berisi buah-buahan dan bunga-bunga yang tumpah ruah.

(Buah-buahan dilambangkan sebagai keragaman ilmu pengetahuan)

SECANGKIR KOPI

(Sebuah Kata Pengantar)

Kopi merupakan minuman yang bercita rasa tinggi, unik, khas dan memiliki tradisi tersendiri yang menghakar dalam tatanan masyarakat kita, Oleh banyak penelitian diyakini Memiliki khasiat tersendiri yang menyehatkan. Secara filosofi, Kopi adalah cermin hidup yang menyajikan dua rasa yang nikmat; Manis dan Pahit dalam waktu yang bersamaan Dan begitulah Hidup, jadi mengapa kita banyak mengeluh. Dan bagi penulis bersama dengan secangkir kopi inilah Yang setia menemani malam panjang, berjuang, menyelesaikan skripsi ini Kala orang terlelap dalam mimpinya

Alhamddulillahi Rabbil Alamin! Kepada Dia dari segala dia, Dia yang tak terbatas dalam keterbatasan kita, Dia yang sempurna dalam ketidaksempurnaan kita, kepada-Mu kucurahkan segenap rasa syukur atas rahmat-Mu yang begitu indah, Engkau hadirkan dalam garis takdir kehidupan ini. Dengan belas kasih-Mu, aku tegar dalam menghadapi setiap rintangan yang menghalangi jalan untuk menyatu dengan-Mu, Engkau yang Maha Memiliki Ilmu. Dengan pertolongan-Mu, melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan akhirnya proses belajar di Program Studi Strata I, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin berhasil penulis selesaikan.

Kuasa waktu telah menggariskan batasan-batasannya tentang arti sebuah kehidupan, tentang hidup yang terus berlalu dan berproses dalam dimensinya. Dan karena waktu pula maka harus ada awal dan ada akhir. Pada akhirnya, episode penutup dari rangkaian perjalanan panjang dan melelahkan di kampus merah ini sampai pada titik akhir. Dalam kenangan yang tersimpang di dalam permainan waktu, banyak lembar sejarah yang terukir di kampus merah kebanggaan banyak orang ini

(tapi jujur saat ini aku bingung pada sisi mananyakah kampus ini memiliki kebanggaan). Saat pertama kali menginjakkan kaki di institusi yang diharapkan sebagai tempat meretasnya rahim peradaban yang mencerdaskan dengan manusia intelektualnya, kulangkahkan kaki bersama dengan ribuan langkah kaki lainnya dengan perasaan penuh kemenangan bercampur kebanggaan, terbayang sebuah mimpi dalam satu cita-cita, menjadi orang sukses. Perjalanan waktu kemudian mengajarkan banyak hal kepada penulis; tentang kebanggaan yang sirna oleh budaya anarkis, oleh orang-orang semu yang memenuhi kampus dan tentang segalanya yang menyadarkan penulis bahwa mimpi itu tidak selalu berakhir dengan indah. Banyak harapan yang berbenturan dengan kekecewaan dan selalu saja menuntut sikap kompromistis,. Katanya dalam hidup ini kadang kita dituntut banyak untuk berdamai dengan kenyataan.

Telah kuhabiskan separuh hidupku di kampus ini untuk sebuah tujuan, belajar menjadi manusia yang seutuhnya. Pada sisi lain, ketika proses pembelajaran berlangsung di ruang-ruang kelas, kutemukan diriku tak lebih dari sesosok tubuh yang diproyeksikan untuk menjadi sebuah mesin pekerja kapitalis yang serba instan sesuai dengan kebutuhan pasar, jauh dari karakter sebuah dunia pendidikan yang mengedepankan nilai intelektualitas dan moralitas sebagai syarat mutlak untuk menjadi manusia seutuhnya. Mungkin tak salah jika kukatakan kalau nama besar kampus ini telah berhasil menipu/membius puluhan ribu orang untuk masuk disini, menanam sejuta mimpi indah dan setelah itu banyak diantaranya selesai dari kampus ini dengan kering kerontong dari spirit intelektulitas, keluar dengan keadaan persis seperti gambaran lirik lagu "*sarjana muda-nya*" Iwan Fals.

Di tengah kehidupan bermasyarakat, sudah menjadi kehendak sejarah yang menasbihkan dirinya ke dalam sebuah pentas dan narasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang tak pernah lepas dari sebuah skenario kepentingan yang pada akhirnya akan semakin membiaskan makna dan hakikat dari nilai perjuangan yang pernah ada di negeri ini. Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam tatanan masyarakat dan pemerintahan kita telah menempatkan dirinya pada dua garis yang seolah tak akan pernah bertemu. Ketika gerakan reformasi terjadi pada tahun 1998, segenap elemen masyarakat pun sepertinya menyadari akan banyaknya ketimpangan dan kekurangan yang telah terjadi pada bangsa dan negara Indonesia, dan kita pun kemudian ramai-ramai berbicara, membicarakan sebuah bentuk, sebuah tatanan yang dapat membawa bangsa dan negara ini keluar dari krisis multidimensi dengan kondisi masyarakatnya yang sejahtera. Impian akan lahirnya sebuah tatanan 'Indonesia Baru' dengan Masyarakat Madani (*Civil Society*), atau dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*), yang berakar dari perjuangan gerakan reformasi beberapa tahun silam tentu menjadi impian kita semua. Akan tetapi pada situasi seperti sekarang ini, semuanya terjadi dalam posisi yang serba absurd. Reformasi pemerintahan dengan beberapa agenda perubahannya sangat mengecewakan masyarakat.

Otonomi daerah, sebagai salah satu implementasi atau bagian dari reformasi pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir ini juga banyak mendapat sorotan dari masyarakat, karena ditengarai telah menyimpang dari cita-cita reformasi. Pemerintahan daerah dianggap kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya yang ditandai lewat serangkaian kebijakan dan program pembangunannya yang tidak

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Secangkir Kopi	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Batasan Masalah.....	8
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2. Kegunaan Penelitian.....	9
Bab II Metode Penelitian	10
2.1. Metode Pengumpulan Data	10
2.2. Jenis dan Sumber Data	10
2.3. Metode Analisis	11
2.4. Sistematika Pembahasan.....	17
Bab III Landasan Teori	19
3.1 Desentralisasi	19
3.2. Otonomi Daerah	21

3.2.1 Maksud dan Tujuan Otonomi Daerah	22
3.2.2. Prinsip Otonomi Daerah.....	23
3.2.3. Asas-Asas Otonomi Daerah	24
3.3. Aparatur Pemerintah Daerah.....	25
3.4. Manajemen Birokrasi Pemerintahan Daerah	27
3.5. <i>Good Governance</i>	33
3.5.1. Pengertian <i>Good Governance</i>	34
3.5.2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	35
3.5.3. Elemen-Elemen <i>Good Governance</i>	37
3.6. Anggaran Kinerja.....	39
3.6.1. Pengertian Anggaran Kinerja.....	39
3.6.2. Pengukuran Kinerja.....	41
3.6.3. Indikator Kinerja.....	42
3.6.4. Penetapan Standar Indikator Kinerja	45
3.6.5. Penerapan Anggaran Kinerja	46
3.7. Penganggaran Daerah.....	49
3.7.1. Konsep Anggaran Daerah	49
3.7.2. Pentingnya Anggaran Daerah	51
3.7.3. Fungsi Anggaran Daerah.....	52
3.7.4. Prinsip-prinsip Anggaran Daerah.....	55
3.8. Keuangan Daerah.....	56
3.9. Pengukuran Value For Money	57
3.9.1. Konsep Value For Money	57

3.9.2. Indikator Value For Money	59
3.9.3. Pengukuran Value For Money	60
Bab IV Gambaran Umum Objek Penelitian.....	62
4.1. Tentang Provinsi Sulawesi Selatan	62
4.1.1. Sejarah Singkat Prov. Sulsel	62
4.1.2. Keadaan Geografis Prov. Sulsel.....	63
4.1.3. Kebijakan Pemerintahan Prov. Sulsel	64
4.2. Sekretariat Daerah Prov. Sulsel.....	72
4.2.1. Gambaran Umum Instansi.....	72
4.2.2. Struktur Organisasi.....	74
Bab V Analisis Kinerja Keuangan Pendekatan <i>Value For Money</i>	85
5.1. Evaluasi Kinerja Setda Prov. Sulsel Dengan Pendekatan <i>Value For Money</i> Untuk Tahun Anggaran 2004.....	86
5.2. Uji <i>Validitas</i> Dan <i>Realibilitas</i> Data.....	232
5.3. Analisis Deskriptif Kinerja Keuangan Belanja Publik Setda Prov. Sulsel Dengan Pendekatan <i>Value For Money</i>	243
Bab VI Penutup.....	249
6.1. Kesimpulan	249
6.2. Saran.....	251
Daftar Pustaka	xi
Lampiran	xii

DAFTAR TABEL

Nomor	kalimat	hal
Tabel 2.1	Skala Likert untuk Pembobotan Kuisisioner	13
Tabel 2.2	Karesteristik Responden untuk Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	14
Tabel 2.3	Karesteristik Responden untuk Kegiatan Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi Daerah	15
Tabel 2.4	Karesteristik Responden untuk Kegiatan Bidang Peningkatan Kelancaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik.....	15
Tabel 2.5	Interval Skala Pengukuran Efesiensi dan Efektivitas.....	16
Tabel 5.1	Tiga Jenis Kegiatan Biro KAPP Yang Memiliki anggaran Terbesar.....	87
Tabel 5.2	Distribusi Pernyataan Responden atas Kegiatan Pembelajaran TOT Al-Qur'an	89
Tabel 5.3	Distribusi Pernyataan Responden atas Kegiatan Pembelajaran TOT Al-Qur'an	89
Tabel 5.4	Distribusi Pernyataan Responden atas Kegiatan Pembelajaran TOT Al-Qur'an	90
Tabel 5.5	Distribusi Pernyataan Responden atas Kegiatan Pembelajaran TOT Al-Qur'an	90
Tabel 5.6	Distribusi Pernyataan Responden atas Kegiatan Pembelajaran TOT Al-Qur'an	91
Tabel 5.7	Distribusi Akumulatif pernyataan Responden Terhadap Kegiatan Pembelajaran TOT Al-qur'an	92
Tabel 5.8	Distribusi Pernyataan Responden atas Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan.....	95
Tabel 5.9	Distribusi Pernyataan Responden atas Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan.....	96

Tabel 5.10	Distribusi Pernyataan Responden atas Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan.....	96
Tabel 5.11	Distribusi Pernyataan Responden atas Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan.....	97
Tabel 5.12	Distribusi Pernyataan Responden atas Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan.....	98
Tabel 5.13	Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan.....	99
Tabel 5.14	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga, Pendidikan, Budaya dan Seni	102
Tabel 5.15	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga, Pendidikan, Budaya dan Seni	103
Tabel 5.16	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga, Pendidikan, Budaya dan Seni.....	103
Tabel 5.17	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga, Pendidikan, Budaya dan Seni.....	104
Tabel 5.18	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga, Pendidikan, Budaya dan Seni.....	105
Tabel 5.19	Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden terhadap Kegiatan Pembinaan kepemudaan, Olahraga, Pendidikan Budaya, dan Seni.....	106
Tabel 5.20	Tiga Jenis Kegiatan Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Yang Memiliki Anggaran Terbesar.....	108
Tabel 5.21	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Operasional GERBANG EMAS	110
Tabel 5.22	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Operasional GERBANG EMAS	111
Tabel 5.23	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Operasional GERBANG EMAS	111



Tabel 5.24	Distrbusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Operasional GERBANG EMAS	
Tabel 5.25	Distrbusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Operasional GERBANG EMAS	113
Tabel 5.26	Distrbusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Kegiatan Operasional GERBANG EMAS.....	114
Tabel 5.27	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD.....	117
Tabel 5.28	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD.....	118
Tabel 5.29	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD.....	118
Tabel 5.30	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD.....	119
Tabel 5.31	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD.....	120
Tabel 5.32	Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD	121
Tabel 5.33	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah	124
Tabel 5.34	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah	125
Tabel 5.35	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah	125
Tabel 5.36	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah	126
Tabel 5.37	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah	127
Tabel 5.38	Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden terhadap Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah.....	128

Tabel 5.39	Tiga Jenis Kegiatan Biro Dekonsentrasi Yang Memiliki Anggaran Terbesar	130
Tabel 5.40	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemprov	132
Tabel 5.41	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemprov	133
Tabel 5.42	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemprov	133
Tabel 5.43	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemprov	134
Tabel 5.44	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemprov	135
Tabel 5.45	Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemprov	136
Tabel 5.46	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemprov	139
Tabel 5.47	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemprov	140
Tabel 5.48	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemprov	140
Tabel 5.49	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemprov	141
Tabel 5.50	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemprov	142
Tabel 5.51	Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemprov	143
Tabel 5.52	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemprov	146

Tabel 5.53	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemprov	147
Tabel 5.54	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemprov	148
Tabel 5.55	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemprov	148
Tabel 5.56	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemprov	149
Tabel 5.57	Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden terhadap Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemprov.....	150
Tabel 5.58	Tiga Jenis Kegiatan Biro Otoda Yang Memiliki Anggaran Terbesar.....	152
Tabel 5.59	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan yang Memfasilitasi Penataan Daerah.....	154
Tabel 5.60	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan yang Memfasilitasi Penataan Daerah.....	155
Tabel 5.61	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan yang Memfasilitasi Penataan Daerah.....	155
Tabel 5.62	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan yang Memfasilitasi Penataan Daerah.....	156
Tabel 5.63	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan yang Memfasilitasi Penataan Daerah.....	157
Tabel 5.64	Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden terhadap Kegiatan yang Memfasilitasi Penataan Daerah.....	158
Tabel 5.65	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pemerintahan Daerah	161
Tabel 5.66	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pemerintahan Daerah	162

Tabel 5.67	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pemerintahan Daerah	163
Tabel 5.68	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pemerintahan Daerah	163
Tabel 5.69	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pemerintahan Daerah	164
Tabel 5.70	Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pemerintahan Daerah	165
Tabel 5.71	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pemerintahan Daerah	168
Tabel 5.72	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pemerintahan Daerah	169
Tabel 5.73	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pemerintahan Daerah	170
Tabel 5.74	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pemerintahan Daerah	170
Tabel 5.75	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pemerintahan Daerah	171
Tabel 5.76	Distribusi Pernyataan Responden terhadap Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pemerintahan Daerah.....	172
Tabel 5.77	Dua Jenis Kegiatan Biro Humas dan Protokoler	174
Tabel 5.78	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi	176
Tabel 5.79	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi	177
Tabel 5.80	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi	177
Tabel 5.81	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi	178

Tabel 5.82	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi	179
Tabel 5.83	Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi	180
Tabel 5.84	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan <i>Wireless Link</i>	183
Tabel 5.85	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan <i>Wireless Link</i>	183
Tabel 5.86	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan <i>Wireless Link</i>	184
Tabel 5.87	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan <i>Wireless Link</i>	185
Tabel 5.88	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan <i>Wireless Link</i>	185
Tabel 5.89	Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan <i>Wireless Link</i>	186
Tabel 5.90	Tiga Jenis Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi Yang Memiliki Anggaran Terbesar	188
Tabel 5.91	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru	190
Tabel 5.92	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru	191
Tabel 5.93	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru	191
Tabel 5.94	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru	192
Tabel 5.95	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru	193
Tabel 5.96	Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru.....	194

Tabel 5.97	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan BinteK/Kursus PPNS	197
Tabel 5.98	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan BinteK/Kursus PPNS	198
Tabel 5.99	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan BinteK/Kursus PPNS	198
Tabel 5.100	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan BinteK/Kursus PPNS	199
Tabel 5.101	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan BinteK/Kursus PPNS	200
Tabel 5.102	Distribusi Akumulati Pernyataan Responden Terhadap Pelaksanaan Kegiatan BinteK/Kursus PPNS.....	201
Tabel 5.103	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan.....	204
Tabel 5.104	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan.....	205
Tabel 5.105	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan.....	205
Tabel 5.106	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan.....	206
Tabel 5.107	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan.....	207
Tabel 5.108	Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan.....	208
Tabel 5.109	Tiga Jenis Kegiatan Biro Perlengkapan Yang Memiliki Anggaran Terbesar.....	210
Tabel 5.110	Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintahan Prov. Sulsel.....	212



Tabel 5.111 Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintahan Prov. Sulsel	213
Tabel 5.112 Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintahan Prov. Sulsel	214
Tabel 5.113 Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintahan Prov. Sulsel	214
Tabel 5.114 Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintahan Prov. Sulsel	215
Tabel 5.115 Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintahan Prov. Sulsel.....	216
Tabel 5.116 Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset.....	219
Tabel 5.117 Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset.....	220
Tabel 5.118 Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset.....	221
Tabel 5.119 Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset.....	222
Tabel 5.120 Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset.....	222
Tabel 5.121 Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset.....	223
Tabel 5.122 Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemprov. Sulsel.....	227

Tabel 5.123 Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemprov. Sulsel.....	228
Tabel 5.124 Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemprov. Sulsel.....	229
Tabel 5.125 Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemprov. Sulsel.....	229
Tabel 5.126 Distribusi Pernyataan Responden Atas Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemprov. Sulsel.....	230
Tabel 5.127 Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemprov. Sulsel.....	231
Tabel 5.128 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Pembelajaran Al-Qur'an	233
Tabel 5.129 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni.....	234
Tabel 5.130 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan.....	234
Tabel 5.131 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Operasional Gerbang Emas	234
Tabel 5.132 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD.....	235
Tabel 5.133 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Peningkatan Produksi Daerah.....	235
Tabel 5.134 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Pengadaan Tanah Pemprov. Sulsel.....	235
Tabel 5.135 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan.....	236
Tabel 5.136 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Pengadaan Prasarana Pemerintahan	236

Tabel 5.137 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Fasilitas Penguatan Otoda	236
Tabel 5.138 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Sistem Pelaporan Pemerintahan Daerah	237
Tabel 5.139 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Fasilitas Penataan Daerah.....	237
Tabel 5.140 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Penerbitan Majalah Sinergi	237
Tabel 5.141 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Pengadaan Jaringan <i>Wireless Link</i>	238
Tabel 5.142 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Perancangan Perda-Perda Baru	238
Tabel 5.143 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Bintek/Kursus PPNS Pemerintah Daerah	238
Tabel 5.144 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan	239
Tabel 5.145 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur	239
Tabel 5.146 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Inventarisasi dan Pemberdayaan Asset	239
Tabel 5.147 Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Pemetaan Tanah Pemprov Sulsel.....	240
Tabel 5.148 Pengukuran <i>Value For Money</i> Terhadap Kegiatan Belanja Operasional dan Pemeliharaan dari Belanja Publik Tahun Anggaran 2004	244

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kehendak sejarah. Mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan Republik Indonesia, mengantarkan bangsa Indonesia ke era reformasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bidang pemerintahan, reformasi ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kehadiran kedua undang-undang ini membawa nuansa baru pemerintahan yang berparadigma desentralistik, menggantikan nuansa lama yang cenderung sentralistik. Sistem desentralisasi diterapkan secara utuh pada tingkat kabupaten dan kota. Penerapan sistem ini sangat menarik, sebagai hasil optimal dari kesepakatan untuk mengatasi silang pendapat mengenai bentuk pemerintahan Daerah yang tepat bagi negara Indonesia yang menganut sistem negara keasatuan.

Dalam perkembangannya pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 memberikan efek yang luar biasa terhadap dinamika pemerintahan Indonesia. Tuntutan perubahan dan perkembangan wacana reformasi yang semakin cepat di tengah-tengah masyarakat, mengharuskan pemerintah banyak melakukan transformasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan seperti merombak ataupun mengeluarkan peraturan baru demi kelangsungan reformasi pemerintahan.

Bertolak dari dinamika pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah yang mengalami perkembangan yang cepat maka pemerintah kemudian mengubah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengubah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan perubahan kedua UU ini diharapkan agar dimensi reformasi pemerintahan yang sedang berjalan tidak hanya sekedar perubahan format lembaga semata, akan tetapi juga mencakup pembaruan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga publik pemerintahan secara ekonomis, efisien, efektif, dan transparan serta akuntabel sehingga cita-cita reformasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) benar-benar dapat dicapai.

Wacana reformasi yang begitu kuat, juga telah mendorong pemerintah melakukan transformasi manajemen pemerintahan (populer juga sebagai '*The New Public Management*'). Proses transformasi manajemen pemerintahan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan tergalinya potensi dan keanekaragaman daerah serta terciptanya manajemen pemerintahan yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari prinsip *good governance*.

Transformasi manajemen pemerintahan telah dilakukan seiring dengan berlangsungnya proses reformasi sistem pemerintahan di Indonesia. Proses tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari penataan kelembagaan (*Institutional Arrangement*), reformasi kepegawaian (*Civil Servant Reform*) sampai pada reformasi pengelolaan keuangan negara (*New Financial Management Reform*). Menurut Sjahrudin Rasul (Sjahrudin Rasul, 2003:1) terdapat beberapa alasan yang menjadi latar belakang perubahan manajemen pemerintahan saat ini antara lain:

1. Akuntabilitas yang tidak jelas, baik mencakup apa, mengapa, bagaimana, maupun kepada siapa harus berakuntabilitas;
2. Tujuan dan sasaran-sasaran strategis unit-unit pemerintahan cenderung untuk ditetapkan secara mengambang (umumnya tidak spesifik dan tidak terukur);
3. Insentif cenderung menciptakan perilaku-prilaku korup, seperti dorongan untuk menghabiskan seluruh saldo anggaran pada saat-saat akhir periode anggaran;
4. Aset-aset pemerintahan yang dipindahtangankan ke pihak ketiga (privatisasi) tanpa standar perlakuan yang jelas;
5. Defisit dan akumulasi jumlah hutang yang dikaburkan oleh sistem akuntansi berbasis kas;
6. Daya respon aparat yang umumnya cenderung lambat dalam menyikapi perubahan lingkungan.

Salah satu tonggak penting dari transformasi manajemen pemerintahan di Indonesia saat ini yang dimaksudkan untuk menyikapi berbagai permasalahan di atas, yakni pemerintah melakukan pembaruan sistem pengelolaan keuangan negara yang

ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Semangat pembaruan terutama terlihat dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang berusaha mengakomodasikannya dengan penyelenggaraan *good governance*, antara lain dengan diperkenalkannya asas akuntabilitas berorientasi hasil (*Result Oriented Accountability*) atau yang lebih dikenal dengan akuntabilitas kinerja (*Performance Accountabilty*) dan transparansi (*Transparency*) dalam pengelolaan keuangan negara.

Namun demikian sebenarnya pada tingkatan pemerintahan daerah sebelum diberlakukannya UU No.17 Tahun 2003 di atas, penerapan anggaran berbasis kinerja sudah lebih dahulu diterapkan. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (khususnya pada Pasal 20), dan Peraturan Pemerintah No. 108 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Jika diperhatikan secara mendalam arahan yang diberikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 105 Tahun 2000 dan PP 108 Tahun 2000, ataupun UU No. 17 Tahun 2003 yang telah disahkan oleh pemerintah sudah sangat baik. Tetapi benarkah ia dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang baik berdasarkan pada prinsip transparan, akuntabel, ekonomis, efisiensi, dan efektifitas secara sinergis dan berkesinambungan? Jawabannya tergantung pada bagaimana pemerintah daerah memahami dan menerapkan formula dan rumusan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas. Tindak lanjut dari berbagai penerapan peraturan di atas dapat dilakukan melalui evaluasi kebijakan keuangan daerah oleh pemerintah daerah.

Saat ini terdapat banyak hal yang dapat dijadikan alat untuk melihat keseriusan dan ketaatan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP), dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tersebut, antara lain dapat kita lihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam setiap tahun anggaran yang ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah.

Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah daerah (gubernur atau bupati) adalah dengan melihat kinerja keuangan daerahnya melalui perhitungan dan analisis terhadap target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-nya (APBD), baik dari sisi *input, output, outcome, impact, dan benefit*.

Akan tetapi kemudian timbul permasalahan dalam penilaian pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah saat ini. Sistem perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap APBD masih dikritik oleh masyarakat karena banyak terjadi pemborosan dana (*Mark Up*), kebocoran dana publik/korupsi, dan program-program yang tidak layak secara ekonomis/inefisiensi. Padahal sistem anggaran kinerja mengharuskan melakukan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran secara tertib, taat pada aturan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Pasal 4, PP 105 Tahun 2000).

Dengan terdapatnya permasalahan pada aspek perencanaan dan pengelolaan APBD saat ini, maka implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000

yang dijadikan standar untuk penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pencapaian target dan realisasi dari program dan kebijakan baik dalam komponen pendapatan, komponen belanja, dan komponen pembiayaan menjadi lemah posisinya. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana proses penganggaran yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap penilaian, serta apakah pencapaian realisasi anggaran telah berlangsung secara ekonomis, efisiensi, dan efektif.

Dengan terdapatnya kelemahan pada penilaian atau pengukuran kinerja saat ini yang hanya didasarkan pada target dan realisasi saja untuk mengetahui *input*, *output*, dan *outcome*, maka perlu dipertimbangkan cara lain sebagai bahan perbandingan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, khususnya pada aspek finansial (dalam hal ini APBD). Salah satu cara yang dapat dipertimbangkan untuk penilaian kinerja tersebut, mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai pada tahap pelaksanaan anggaran adalah konsep *Value For Money*. Jika dilihat secara mendalam sebenarnya konsep *value for money* bukan sesuatu yang baru, bahkan *value for money* merupakan salah satu prinsip penting dari anggaran kinerja dan *good governance*.

Value for money berarti diterapkannya tiga (3) prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah kualitas tertentu pada harga yang paling rendah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan output maksimal dengan jumlah input yang serendah-rendahnya.

Efektifitas berarti penggunaan APBD harus mencapai target atau tujuan kepentingan publik. *Value for money* dalam perencanaan anggaran sangat menekankan pada penggunaan 'standar biaya terendah'.

Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu unit pemerintahan dalam lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan juga telah menerapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan bentuk anggaran yang berbasis kinerja. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melihat bagaimana Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan konsep pengukuran *Value For Money* dalam penyusunan Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan pelaksanaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) serta melakukan penelitian dan menulis skripsi ini dengan judul "**Analisis Kinerja Keuangan Belanja Kegiatan Dengan Pendekatan *Value For Money* Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi masalah pokok adalah bagaimana Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan konsep pengukuran *value for money* terhadap setiap aktivitas belanjanya, sehingga anggaran yang direncanakan dan digunakan dapat memenuhi prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana prinsip dari anggaran berbasis kinerja sesuai dengan tuntutan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi masalah pengukuran kinerja *value for money* hanya pada 2 (dua) nilai pokok yakni, nilai efisiensi dan nilai efektivitas. Dengan adanya pembatasan ini maka diasumsikan bahwa seluruh kegiatan yang telah direalisasikan oleh instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan dianggap sudah memenuhi unsur nilai ekonomis. Selain itu dalam penelitian ini. Kebijakan dan program kegiatan yang akan diteliti adalah kegiatan dari belanja operasional dan pemeliharaan dalam Belanja Publik Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengingat pentingnya pengelolaan kegiatan dari belanja publik ini karena terkait secara langsung dengan kebutuhan masyarakat, serta dalam komponen belanja publik ini belanja operasional dan pemeliharaan memiliki alokasi anggaran yang cukup tinggi. Fokus penelitian penulis batasi hanya untuk tahun anggaran 2004.

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengukur nilai *Value For Money* dari realisasi Kegiatan yang dianggarkan dari Belanja Operasional dan Pemeliharaan dalam Belanja Publik Setda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2004.

1.5.2. Kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebagai masukan bagi instansi pemerintah daerah dalam hal pengukuran kinerja dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
2. Sebagai salah satu media untuk memperdalam ilmu akademik penulis, dan memahami lebih dalam penerapan ilmu pengetahuan pada tataran teori dan aplikatifnya.
3. Sebagai referensi bagi penulis dan pihak lain yang tertarik dengan kajian mengenai pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Metode penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan langsung di instansi pemerintahan dalam hal ini melalui Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara wawancara dan kuisioner dengan pihak-pihak terkait.
2. Metode penelitian kepustakaan (*Libray Research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
3. Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

2.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait baik dari instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan maupun pihak lain yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

2. Data kuantitatif yaitu berupa realisasi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekda Provinsi Sulawesi Selatan dan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2004 serta data pendukung lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan (*Field Reseach*) pada instansi Sekda Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.3. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif (*Descriptive Kuantitative Analysis Method*), yaitu dengan menerapkan konsep pengukuran *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan, kemudian menganalisis unsur-unsur *value for money* yaitu dengan menghitung tingkat efisiensi dan efektifitas dari realisasi anggaran operasional.

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja *value for money* adalah memahami aktivitas operasional organisasi dengan menganalisis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara lebih spesifik pengukuran *Value For Money* sebagaimana yang disampaikan oleh Mardiasmo (2003:4) dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini:

a. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan rasio antara *output* dan *input*.
Semakin besar rasio berarti semakin tinggi nilai efisiensi.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Dimana, nilai output merupakan hasil prosentase perhitungan realisasi fisik di lapangan dari setiap kegiatan yang ada, sedangkan nilai *input* merupakan jumlah prosentase antara dana yang digunakan dengan dana yang dianggarkan oleh pemerintah/Setda.

c. Pengukuran Efektivitas

Secara sederhana efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara *outcome* dan *output*. Semakin tinggi rasio berarti semakin efektif.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcomes}}{\text{Output}}$$

Dimana, *outcomes* merupakan penilaian publik / pelanggan terhadap hasil dari setiap output program pemerintah/Setda. Sedangkan *output* merupakan penilaian pemerintah/Sekda terhadap keluaran dari program dan kegiatan yang telah direalisasikan.

Dalam penelitian ini juga digunakan kuisisioner yang diedarkan kepada publik/pelanggan (responden) untuk mengetahui nilai *outcomes* dari setiap kegiatan sebagai dasar untuk mengukur nilai efektivitas kegiatan dari Setda Provinsi Sulawesi

Selatan dalam tahun anggaran 2004. Peng
 terdiri atas beberapa pilihan jawaban. Setiap
 dalam bentuk kuantitatif untuk memudahkan
 Adapun kuisisioner yang digunakan seperti pada la
 ini menggunakan skala Likert, adalah sebagai berikut

purpose sampling (sampel
 tujuan/sasaran dari
 dari tiap-
 kan

Tabel 2.1
Skala Likert

Penilaian	Score	Interval	persentase
Sangat puas/berhasil	5	21 s/d 25	90 s/d 100
Cukup puas / berhasil	4	16 s/d 20	80 s/d 89,99
Puas / berhasil	3	11 s/d 15	70 s/d 79,99
Kurang puas / berhasil	2	6 s/d 10	60 s/d 69,99
Tidak puas / berhasil	1	0 s/d 5	< 59,99

Sumber: Diolah sendiri berdasarkan Sistem Lakip LAN

Terdapat 5 (lima) pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner ini untuk mengetahui tingkat kepuasan publik/pelanggan dari setiap kegiatan yang dijadikan sampel kegiatan. Jawaban dari tiap responden selanjutnya diuji validitas dan reliabilitasnya untuk melihat konsistensi dari responden pada masa yang akan datang mengenai pertanyaan yang diberikan. Validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan reliabilitas menunjukkan derajat konsistensi data dalam interval waktu tertentu.

Jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 200 orang dengan distribusi 10 orang responden perkegiatan. Teknik yang digunakan dalam

menentukan sampel responden adalah dengan metode *purpose sampling* (sampel kuota). Para responden yang dipilih adalah mereka yang menjadi tujuan/sasaran dari kebijakan dan program kegiatan pemerintah. Penentuan jumlah responden dari tiap-tiap profesi didasarkan pada pertimbangan tertentu yakni mereka yang diperkirakan menjadi sasaran utama dari kegiatan yang dijadikan sampel kegiatan.

Dengan demikian karakteristik responden akan berbeda proporsi objeknya antara satu biro/kegiatan dengan biro/kegiatan lainnya. Hal ini dilakukan mengingat pada Setda Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari beberapa biro yang masing-masing mempertanggung jawabkan kegiatannya dan juga mempunyai orientasi tujuan dan sasaran kegiatan yang berbeda pula. Berikut dapat diperlihatkan karakteristik responden berdasarkan biro/kegiatan di instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan

1. Biro Kesejahteraan, Agama, dan Pemberdayaan Perempuan yang bertanggung jawab pada pembinaan kemasyarakatan.

Tabel 2.2

Karakteristik Responden Untuk Setiap Kegiatan

Profesi	Jumlah	Persentase (%)
Masyarakat	4	40
Mahasiswa/Pelajar	3	30
Pegawai Negeri	2	20
Wiraswasta/Karyawan	1	10
Jumlah	10	100

2. Biro Ekonomi dan Pembangunan yang bertanggung jawab pada pengembangan usaha dan investasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.3

Karakteristik Responden Untuk Setiap Kegiatan

Profesi	Jumlah	Persentase (%)
Wiraswasta/Karyawan	4	40
Masyarakat	3	30
Pegawai Negeri	2	20
Mahasiswa/Pelajar	1	10
Jumlah	10	100

3. Biro Dekonsentrasi, Biro Otonomi Daerah, Biro Humas dan Protokol, Biro Hukum dan Organisasi, dan Biro Perlengkapan yang bertanggung jawab pada kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 2.4

Karakteristik Responden Untuk Setiap Kegiatan

Profesi	Jumlah	Persentase (%)
Pegawai Negeri	4	40
Masyarakat	3	30
Mahasiswa/Pelajar	2	20
Wiraswasta/Karyawan	1	10
Jumlah	10	100

Selanjutnya untuk pengukuran nilai efisiensi dan efektivitas dari setiap realisasi kegiatan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka digunakan interval skala. Untuk instansi Pemerintah pengukuran ini sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi pemerintah daerah, tetapi secara umum diatur dalam modul LAKIP. Adapun skala yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

Tabel 2.5
Interval Skala.

No.	Percentase	Penilaian
1.	90 s/d 100	Sangat efisien/sangat efektif
2.	80 s/d 89,99	Cukup efisien /cukup efektif
3.	70 s/d 79,99	Efisien / efektif
4.	60 s/d 69,99	Kurang efisien /kurang efektif
5.	< 59,99	Tidak efisien /tidak efektif

Sumber: Diolah sendiri berdasarkan Sistem Lakip LAN

Dalam penelitian dari skripsi ini terlebih dahulu ditentukan sampel terhadap kegiatan-kegiatan dari keseluruhan unit kerja dalam lingkup Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Penentuan sampel kegiatan ini diambil dengan teknik *purpose sampling*. Sampel yang diambil masing-masing sebanyak tiga jenis kegiatan dari setiap Biro. Dasar yang dijadikan kriteria dalam pengambilan sampel kegiatan adalah jenis kegiatan di masing-masing biro yang memiliki alokasi anggaran tertinggi dari belanja operasional dan pemeliharaan dalam Belanja Publik. Pengambilan sampel ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara keseluruhan kegiatan instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004.

2.4.Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah , batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai metode penelitian, jenis dan sumber data, metode analisis, dan sistematika pembahasan.

BAB III : Landasan Teori

Bab ini menguraikan teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini serta teori-teori dan pemikiran ahli yang mendukung pembahasan masalah dalam penelitian.

BAB IV : Tinjauan Umum Objek Penelitian

Bab ini menerangkan informasi mengenai Provinsi Sulsel secara umum dan Unit Pemerintahan Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara khusus yang menyangkut tentang tempat, tugas, fungsi, dan struktur organisasinya.

BAB V : Pembahasan

Bab ini membahas mengenai bagaimana pengelolaan keuangan pada Instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan serta bagaimana menerapkan dan mengukur konsep *Value For Money* terhadap penggunaan anggaran operasional dan pemeliharaan dengan menggunakan perhitungan rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

BAB VI : Penutup

Bab ini menerapkan mengenai kesimpulan atas pembahasan masalah serta saran-saran yang diberikan kepada Instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan khususnya dan semua unit pemerintahan daerah umumnya berdasarkan hasil penelitian ini.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. Desentralisasi

Sistem dan kebijakan yang sentralistik yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru pada saat berkuasa oleh banyak pihak dianggap sebagai salah satu pemicu dari krisis ekonomi yang berujung pada krisis multidimensional yang dialami bangsa dan negara kita saat ini. Hal ini mungkin dapat dibenarkan dengan melihat potret pembangunan daerah-daerah di Indonesia. Dapat kita lihat betapa tidak meratanya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh daerah-daerah di Provinsi Papua sangat tertinggal, padahal triliyunan dana dihasilkan dari kekayaan alamnya yang sangat melimpah, Maluku juga demikian adanya padahal kekayaan lautnya sungguh luar biasa. Daerah-daerah di Pulau Sulawesi dan Kalimantan mengalami nasib yang sama. Di bagian barat negeri ini terdapat Aceh dan Riau yang juga menjadi penghasil devisa negara tetapi terabaikan dalam kegiatan pembangunan. Devisa negara yang dihasilkan dari daerah-daerah tersebut sebagian besar tersedot untuk kegiatan pembangunan di Pulau Jawa. Melihat situasi seperti di atas seiring dengan berlangsungnya proses reformasi, protes pun bermunculan dari daerah-daerah hingga sampai pada upaya melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wacana dan tuntutan daerah-daerah untuk menjalankan rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi sumber daya yang dimilikinya pun semakin marak.

Jika dilihat dari kacamata ketatanegaraan dan pengertian administrasi pemerintahan memang bisa terjadi kepentingan daerah tidak sepenuhnya terpenuhi oleh pemerintah pusat. Keadaan demikian biasanya terjadi dalam sistem administrasi pemerintahan yang terlalu sentralistik di suatu negara besar dalam hal wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar sehingga timbul banyak permasalahan yang muncul dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Permasalahan yang selalu timbul dalam administrasi pemerintahan yang sentralistik adalah tidak efektifnya pelayanan publik dalam melayani kepentingan lokal. Berikut dapat kita lihat beberapa kelemahan dari pemerintahan yang terlalu sentralistik :

1. Kebijaksanaan pemerintah lebih banyak diambil oleh pemerintah pusat dan memperlakukan daerah secara sama tanpa memperhatikan kondisi dan situasi lokal yang berbeda.
2. Volume dan beban pemerintah pusat secara teknis terlalu besar, berat dan kompleks, sehingga kurang efektif dan efisien.
3. Kurang melibatkan dan kurang mengembangkan potensi dan kemampuan lokal, sehingga kurang memuaskan aspirasi dan harga diri masyarakat lokal.

Oleh karena itu, sebuah sistem yang sentralistik harus diimbangi dengan sistem yang terdesentralisasi dengan memperluas wewenang dan otonomi pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif dan produktif sehingga pada akhirnya mampu mengurangi beban pemerintah pusat yang seharusnya lebih berkonsentrasi pada bidang-bidang strategis.

Secara konseptual desentralisasi memiliki tujuan agar kebijakan pemerintah lebih sesuai dengan kondisi wilayah dan masyarakat setempat. Motivasinya adalah

pertama, karena kebhinekaan dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, pengakuan dan penghormatan atas sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan, berbangsa dan bernegara. *Ketiga*, pendayagunaan pengelolaan potensi daerah. *Keempat*, mendidik dan memberdayakan masyarakat dalam segi kehidupan. *Kelima*, pemerataan kemampuan daerah dengan memperhatikan kondisi setiap daerah yang berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan berwawasan nusantara.

Konsep desentralisasi itu sendiri sebenarnya cukup beragam dengan munculnya berbagai pemikiran. Satu diantaranya dikemukakan oleh DR.Koswara (2001:58) yang menyatakan desentralisasi dibagi menjadi dua macam yaitu (a) desentralisasi teritorial (*territoriale decentralisatie*), yakni pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing (otonom), dan (b) desentralisasi fungsional (*functionele decentralisatie*), yakni pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu. Di dalam desentralisasi semacam itu dikehendaki agar kepentingan-kepentingan tertentu itu diselenggarakan oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan sendiri. Kewajiban pemerintah dalam hubungan ini hanyalah memberikan pengesahan atas segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh kelompok-kelompok kepentingan tersebut.

3.2. Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomie* berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang (TB Silalahi, 1996, mengutip kamus Petit Larousse), jadi otonomi berarti mengatur dengan undang-undang sendiri. Dengan demikian yang dimaksud dengan otonomi adalah pemberian hak dan kekuasaan perundang-undangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri kepada

instansi, perusahaan, dan daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, Otonomi Daerah didefinisikan sebagai hak, kewenangan, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian otonomi daerah cukup beragam dengan munculnya pemikiran-pemikiran tentang pelaksanaan otonomi daerah, antarara lain dari Prof. Dr. Bhenjamin Hussein (Bhenjamin: 2003:6) mengatakan "bahwa otonomi, melalui desentralisasi bukan diberikan kepada pemerintah daerah, DPRD, bukan kepada daerah, tetapi kepada masyarakat setempat", hal itu merupakan esensi dari otonomi daerah". Pendapat lain dikemukakan oleh Sarundajang (2003:76) mengatakan bahwa sebenarnya otonomi adalah segala tugas yang ada pada daerah, atau dengan kata lain apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah.

3.2.1. Maksud dan Tujuan Otonomi Daerah

Keberadaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.


Otonomi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik (Sarundajang, 1999:31). Adapun tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah:

1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik
2. Pengembangan kehidupan berdemokrasi
3. Distribusi pelayanan publik yang semakin baik, adil dan merata.
4. Penghormatan terhadap budaya lokal
5. Perhatian yang lebih atas potensi dan keanekaragaman daerah.

3.2.2. Prinsip Otonomi Daerah

Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh masih diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, akan tetapi otonomi daerah yang luas di daerah tingkat kabupaten dan kota telah mendapat pengawasan dan pengaturan dari pemerintah provinsi, khususnya dalam rangka sinergisasi program pembangunan dan penyelesaian konflik antar daerah.

- 
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan Konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah.
 5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
 6. Kawasan Khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain seperti Badan Otorita, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Kehutanan, Kawasan Perkotaan Baru, Kawasan Wisata dan semacamnya berlaku peraturan daerah otonom.
 7. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
 8. Pelaksanaan atas dekonstrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

3.2.3. Asas-Asas Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, asas-asas pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang

lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan daerah itu.

2. Asas Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab ada di pemerintah pusat dan dikordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya sebagai walik pemerintah pusat.
3. Asas Tugas Perbantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada pemberi tugas

3.3. Aparatur Pemerintahan Daerah

Melihat aspek kualitas aparatur pemerintah daerah dalam memainkan peranannya dalam mengurus rumah tangga daerah, ditemukan berbagai permasalahan yang menyangkut keterbatasan dan kelemahan yang berakibat pada melemahnya aspek pelayanan kepada masyarakat dan tidak optimalnya upaya akselerasi pembangunan di daerah. Masalah- masalah tersebut seperti terjadinya tumpang tindih (*overlapping*), yang mengakibatkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas, pemborosan waktu dan dana. Dari segi visi dan misi, kemampuan aparat pemerintah daerah masih sangat kurang berkualitas dan terkesan represif dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Dalam hal rekrutmen pegawai ke dalam jabatan-jabatan tertentu, ternyata belum selektif dan sistematis sehingga tenaga-tenaga professional dan berbakat

sangat kurang ditemui di kabupaten/kota. Sedangkan tenaga-tenaga yang sudah cukup matang dan berpengalaman, akhirnya ditarik atau terangkat ke daerah provinsi mengejar jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya aparat yang berkualitas di daerah kabupaten/kota sekaligus mengakibatkan kurang mantapnya kinerja personel pegawai di daerah.

Masih lemahnya sistem pengembangan staf mengakibatkan kinerja staf semakin tidak memadai, sehingga kemampuan aparat pemerintah daerah lemah dalam menyelesaikan tugas dan kegiatannya. Pemberian kompensasi yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pegawai berakibat pada rendahnya motivasi kerja dan ini berdampak pada pencapaian dan pelaksanaan tujuan. Selanjutnya banyak pegawai yang meluangkan waktunya untuk mencari tambahan penghasilan di luar dinas karena merasa gaji yang diterima selama ini sangat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini secara langsung berdampak pada kurang maksimalnya pencapaian target kerja pemerintah daerah, karena jeleknya kinerja aparat pemerintah daerah.

Di sisi lain, perubahan masyarakat, yaitu perubahan dari era industri ke era pengetahuan menyebabkan persyaratan-persyaratan kerja berubah, masyarakat berubah dari pekerja tangan menjadi pekerja pikiran. Pekerjaan tersebut dituntut untuk selalu memahami bagaimana cara menghadapi kejutan-kejutan dan bekerja secara spontan, kreatif, berani menempuh resiko dan menciptakan hubungan kemitraan dengan orang lain. Menghadapi perubahan yang begitu cepat aparatur pemerintah daerah, harus professional baik dari segi teknis, administrasi, maupun manajerial. Beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah

daerah pada era globalisasi ini adalah: (a) keterampilan mengidentifikasi masalah, (b) keterampilan memecahkan masalah, (c) keterampilan sebagai perantara strategis (*Strategic Broker Skills*). Oleh karena itu sudah saatnya untuk diterapkan sistem prestasi dalam pemerintahan daerah yang akan mendorong suasana kompetitif yang sehat pada lingkungan kerja. Menyertai sistem prestasi ini, faktor kesejahteraan pegawai negeri harus semakin diperhatikan

3.4. Manajemen Birokrasi Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang baru berkembang, di mana baru beberapa tahun terakhir ini mencoba merubah paradigma dalam sistem percaturan politik bangsa dengan mencoba menjaga nilai independensinya agar ia tidak lagi menjadi kendaraan politik dari kepentingan politik suatu golongan atau kelompok mengingat posisinya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Sebagai aparatur negara Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan nasional dituntut kesetiaan dan ketaatannya pada negara, bekerja secara profesional, memiliki sifat tanggung jawab, berorientasi pada hasil (*outcome*), dan bukan pada masukan (*input*).

Sudah menjadi rahasia umum kalau kinerja dan pelayanan PNS sebagai penyelenggara aktivitas pemerintahan mendapat pandangan yang buruk di dalam lingkungan masyarakat akibat sistem manajemen pemerintahan di Indonesia yang juga masih buruk. Dalam kondisi seperti ini pelayanan birokrasi akan menjadi baik jika penyelenggara negara memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Sistem manajemen pemerintahan tidak akan baik jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, sebagaimana pendapat dari Dharma Setyawan Salam

yang mengatakan: “ penyelenggara negara yang baik, dan memiliki pengetahuan dan keterampilan, yang memadai, jiwa profesionalisme dan kewirausahaan tinggi, tidak akan mampu berbuat banyak manakala sistem manajemen pemerintahannya bobrok” (D.S. Salam, 2002:7). Jadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan suatu negara dapat dilihat dari manajemen birokrasinya.

Manajemen kepegawaian di Indonesia, kembali harus dilihat mengingat citra negatif dari para birokrat dimata masyarakat. Pengertian dari *civil servant*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pelayan publik yang dikenal sebagai pegawai negeri ternyata dalam kenyataan sehari-hari seringkali pegawai negeri/birokrasi berbelit-belit sehingga berimplikasi pada inefisiensi dan inefektifitas dalam melakukan urusan-urusan tertentu yang secara kumulatif akan menghambat tercapainya tujuan organisasi negara sebagai pelayan masyarakat/warga negaranya. Karena itu munculah istilah “*birokratisme*” yang diartikan sebagai prosedur yang berbelit-belit, memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Biasanya kebobrokan birokrasi bersumber dari mental para birokrat (*man behind the gun*) yang menciptakan kondisi sedemikian rupa, sehingga menimbulkan biaya tinggi dan pemborosan waktu. Hal ini diakibatkan oleh etika birokrat yang sangat rendah dan mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum atau masyarakat yang dilayani. Pada kondisi seperti ini yang selalu disalahkan adalah peraturan perundangan-undangan sebagai aturan main dan sistem yang berlaku. Banyak peraturan yang harus dilewati sehingga memakan waktu dan biaya yang tinggi. Ketidakjelasan aturan membuat birokrasi sulit mengembangkan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi organisasi pemerintahan

Mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan kita saat ini, seperti pengaruh lingkungan global, misalnya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), WTO (*World Trade Organization*) sebagai akibat dari revolusi teknologi dan informasi, serta perubahan sistem pemerintahan dan politik dalam negeri mengharuskan Indonesia menyesuaikan birokrasinya dari manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hirarkis menjadi birokrasi dengan manajemen modern dalam arti cepat (*fast*), akurat (*accurate*) dan terpercaya (*reliable*), fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar yang didukung dengan teknologi informasi yang maju.

Paradigma baru manajemen pemerintahan yang dapat dijadikan dasar pengembangan birokrasi di Indonesia adalah pendekatan *New Public Management*. Model *New Public Management* ini sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1980-an, akan tetapi konsep tersebut baru populer pada awal tahun 1990-an setelah beberapa kali mengalami modifikasi, misalnya munculnya konsep "*managerialism*" (Pollit, 1993); "*market-based public administration*" (Lan, Zhiyong, and Rosenbloom, 1992); "*post-bureaucratic paradigm*" (Barzelay, 1992); "*enterprenurial government*" (Osborne and Gaebler, 1992). Konsep *New Public Management* berorientasi pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Dengan penggunaan paradigma *New Public Management* ini, mengharuskan pemerintah/birokrasi untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetisi tender.

Salah satu model pemerintahan yang diharapkan dapat diadopsi oleh para birokrat di Indonesia adalah model yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992)

yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep "*reinventing government*". Perspektif baru pemerintahan menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah:

1. **Pemerintahan katalis;** berfokus pada pemberian pengarahan, bukan pada produksi pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya. Sebaiknya pemerintah memfokuskan diri pada pemberian arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan pada pihak swasta dan/atau sector ketiga (lembaga swadaya masyarakat dan nonprofit lainnya). Pada saat ini, banyak pelayanan publik yang dapat diproduksi oleh sektor swasta dan sector ketiga (LSM). Bahkan, pada beberapa negara penagihan pajak dan retribusi sudah dikelola oleh pihak non-pemerintah.
2. **Pemerintahan milik masyarakat;** memberdayakan masyarakat daripada melayani. Dengan konsep ini pemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (*self-help community*).
3. **Pemerintahan yang kompetitif;** menjadikan iklim kompetisi sebagai pemicu semangat dalam pemberian pelayanan publik. Kompetisi adalah salah satu cara untuk menghemat biaya sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
4. **Pemerintahan yang digerakkan oleh misi;** mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.

5. **Pemerintahan yang berorientasi pada hasil;** membiayai hasil bukan masukan. Pada pemerintahan tradisional, besarnya alokasi anggaran pada suatu unit kerja ditentukan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi. Semakin kompleks masalah yang dihadapi, semakin besar dana yang dialokasikan. Pemerintah wirausaha berusaha mengubah bentuk penghargaan dan insentif diatas dengan membiayai hasil, bukan masukan. Semakin baik kinerja suatu instansi semakin banyak dana yang dialokasikan untuk mengganti dana yang telah dikeluarkan oleh unit kerja.
6. **Pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan;** memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Pemerintahan tradisional seringkali keliru dalam mengidentifikasi pelanggannya. Penerimaan pajak dan retribusi dari masyarakat dalam pemanfaatannya harus mendapat persetujuan dari legislatif (DPR/DPRD). Akibatnya pemerintah seringkali menganggap bahwa DPR/DPRD dan semua pejabat yang ikut dalam pembahasan anggaran adalah pelanggannya. Bila DPR/DPRD yang ikut dalam pembahasan tidak memomorsatukan kepentingan kelompoknya, maka hal ini tidak akan menjadi masalah. Tetapi bila mereka memomorsatukan kepentingan kelompoknya, maka pelanggan yang sebenarnya yaitu masyarakat akan cenderung untuk dilupakan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintahan tradisional akan memenuhi semua kebutuhan dan keinginan birokrasi, sedangkan kepada masyarakat mereka seringkali menjadi arogan. Pemerintahan wirausaha tidak akan seperti itu. Ia akan mengidentifikasi pelanggan yang sesungguhnya. Dengan cara seperti ini tidak berarti

pemerintah melupakan legislatif, tetapi sebaliknya ia menciptakan sistem pertanggungjawaban ganda (dual accountability): kepada legislatif dan masyarakat.

7. **Pemerintahan wirausaha;** mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. Pemerintah tradisional cenderung tidak berbicara tentang upaya untuk menghasilkan pendapatan dari aktivitasnya. Padahal banyak yang bisa dilakukan untuk menghasilkan pendapatan dari proses penyediaan pelayanan publik
8. **Pemerintahan antisipatif;** berupaya mencegah dari pada mengobati. Pemerintahan tradisional yang birokratis cenderung memusatkan diri pada produksi pelayanan publik untuk memecahkan masalah publik. Pemerintah birokratis cenderung bersifat reaktif, sedangkan pemerintahan wirausaha bersifat proaktif, tidak hanya berusaha mencegah masalah, tetapi juga berusaha keras untuk mengantisipasi masa depan dengan menggunakan perencanaan strategis untuk menciptakan visi.
9. **Pemerintahan desentralisasi;** dari hirarki menuju partisipatif dan tim kerja. Lima puluh tahun lalu pemerintahan yang sentralistik dan hirarkis sangat diperlukan. Pengambilan keputusan harus berasal dari pusat, mengikuti rantai komandonya hingga sampai pada staf yang paling berhubungan dengan masyarakat dan bisnis. Pada saat itu, sistem tersebut sangat cocok karena teknologi informasi masih sangat primitif, komunikasi antar lokasi masih lamban, dan aparatur pemerintahan relatif belum terdidik. Tetapi pada saat ini, keadaan sudah sangat berubah, perkembangan teknologi sudah

sangat maju, kebutuhan masyarakat dan bisnis sudah semakin kompleks, dan staf pemerintahan sudah banyak yang berpendidikan tinggi. Sekarang ini pengambil keputusan sudah harus diberikan lebih banyak pada masyarakat, asosiasi-asosiasi, pelanggan dan lembaga swadaya masyarakat.

10. **Pemerintahan berorientasi pada (mekanisme) pasar;** mengadakan perubahan dengan sistem mekanisme pasar (sistem intensif) dan bukan dengan mekanisme administrasi (sistem birokrasi dengan prosedur yang berbelit-belit).

Munculnya konsep *New Public Management* berpengaruh secara langsung terhadap konsep manajemen pemerintahan. Salah satu pengaruhnya dari konsep '*Reinventing Government*' adalah diharapkan berubahnya sistem birokrasi Indonesia sehingga citra birokrasi yang buruk dimata masyarakat dapat diperbaiki dan wacana '*Good Governance*' sebagai semangat dari reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah dapat diwujudkan.

3.5. Good Governance

Munculnya paradigma baru mengenai tata ekonomi dan politik global berimbas pada bentuk pelayanan pemerintahan kepada *stakeholdernya*. Pemerintah dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap aktifitas ekonomi, politik dan sosial kepada masyarakatnya. Paradigma baru yang muncul terhadap tata ekonomi merupakan revisi dari paradigma lama yang memandang bahwa arena global sebagai jalan raya ekonomi, bebas dari pengaruh sosial dan politik, atau dengan kata lain perang institusi pasarlah yang harus dominan dalam kegiatan ekonomi, jika dibandingkan dengan institusi negara. Akibatnya peranan pemerintah

menjadi tidak nampak, dan dalam rentang waktu tertentu hal demikian ini akan berimbas pada kinerja pelayanan pemerintah, khususnya pelayanan kepada masyarakat akan terabaikan dan pemerintah lebih cenderung mengikuti kehendak pasar. Menghadapi situasi seperti ini tentu diperlukan kembali penataan terhadap berbagai aspek pemerintahan atau sering disebut dengan istilah *good governance* agar tercipta suatu pola hubungan yang harmonis antara pasar, negara dan masyarakat. Sebab pada kenyataannya di negara-negara yang telah maju, kemampuan dalam mencapai tujuan pembangunan nasionalnya, ketiga unsur penting di atas tak dapat dipisahkan (*interlock*) antara negara; (*state*), masyarakat madani (*civil society*) dan sektor swasta (*private sector*).

3.5.1. Pengertian *Good Governance*

Sejumlah perspektif muncul dari wacana pelaksanaan *good governance*, dan hal ini mendorong ramainya diskusi dan perdebatan di arena politik dan akademisi. Diantara perspektif yang berkaitan dengan struktur pemerintahan yang timbul adalah: hubungan antara pemerintah dengan pasar; hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya; hubungan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta; hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat (birokrat); hubungan antara lembaga pemerintah daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan; hubungan antara legislatif dan eksekutif; dan hubungan antara pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional (Miftah Toha, 2003:63).

Pengertian dari *good governance* itu sendiri saat ini cukup beragam. Sudirman Said (2002:1) menyebutkan bahwa *good governance* sebagai pengelolaan

pemerintahan yang baik. Kata “baik” di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu yang kemudian lebih khusus disebut sebagai Prinsip-Prinsip Dasar *Good Governance*. Sedangkan Miftah Toha (2003:63) menyatakan, tata pemerintahan yang baik itu merupakan sebuah konsep yang dipergunakan dalam ilmu politik, dimana konsep itu lahir sejalan dengan konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat madani (*civil society*), partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian Mardiasmo (2002:17) mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan urusan-urusan publik.

Pendapat lain tentang *good governance* dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono (Kompas, 3 Juli 2005:6) yang mengatakan “*good governance* harus ditegakkan agar tercipta keadilan, persamaan hak, dan dilaksanakannya sebuah sistem yang transparan dan akuntabel.

3.5.2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Penerapan *good governance* terhadap pemerintahan akan berjalan dengan baik dan berhasil apabila pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip dari *good governance* sebab dapat dikatakan bahwa kunci utama untuk memahami *good governance* tergantung dari pemahaman atas prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan sistem pemerintahan di Indonesia dengan pelaksanaan otonomi daerahnya yang didasari dengan semangat *good governance*. Dengan memahami dan melaksanakan prinsip dari *good governance* ini, maka kinerja pemerintah dapat diukur. Adapaun prinsip-prinsip *good governance* seperti yang diajukan oleh UNDP adalah sebagai berikut:

1. *Participation*, setiap elemen masyarakat diharapkan terlibat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut harus dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of Law*. Kerangka hukum harus dibangun dengan adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik secara langsung harus dapat diperoleh oleh setiap pihak yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani setiap kepentingan stakeholder.
5. *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and Effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision*. Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki perpektif yang luas dan visi yang jauh kedepan.

3.5.3. Elemen-Elemen Good Governance

Isu sentral pelaksanaan *good governance* adalah bagaimana pemerintah dapat menciptakan dan memperluas kepercayaan (*Trust*) antarwarga, profesi, dan negara lain dalam membangun hubungan politik, ekonomi, maupun kemasyarakatan. Kepercayaan dari setiap elemen erat kaitannya dengan cara birokrasi/pemerintahan membangun mekanisme distribusi sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya yang terdapat di dalam setiap elemen masyarakat. Misi utama dari *good governance* adalah bagaimana mengubah wajah pemerintahan dari arena penegasan identitas kelompok menjadi arena demokrasi.

Dalam melaksanakan *good governance* terdapat tiga elemen yang saling terkait dan tak dapat dipisahkan dari sebuah sistem kenegaraan ini. Ketiga elemen ini oleh UNDP (UNDP:2000) dinyatakan sebagai institusi makro yang kedudukannya harus selalu sejajar, lazim disebut dengan '*Troika Good Governance*', yakni negara, pasar, masyarakat. Sedangkan F.A. Alijoyo (2002:3) menyebutkan "negara, pelaku bisnis, dan masyarakat" sebagai *Trilogy of Governance*. Substansi dari ketiga elemen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Elemen Penyelenggaraan Negara (*State*)

Dari sudut penyelenggaraan negara, *governance* diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola urusan bangsa, mengelola mekanisme, proses dan hubungan yang kompleks antarwarga negara yang menjalani kepentingannya. *Governance* pada penyelenggaraan negara sering disebut dengan *Good Government Governance* (GGG)

2. Elemen Pelaku Bisnis/Pasar (*Private Sector*)

Dari sudut pandang pelaku bisnis *governance* biasa juga disebut sebagai *Good Corporate Governance* (GCG) yang diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan. GCG dimaksudkan untuk memberi nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya berlandaskan pada peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

3. Elemen Masyarakat (*Society*)

Dari sudut pandang masyarakat, *governance* biasa juga disebut dengan *Society Governance*, akan tetapi lebih sering disebut dengan istilah *society* saja. Dalam hal ini masyarakat yang terdiri atas individu maupun kelompok akan saling berinteraksi secara sosial, ekonomi dan politik dengan aturan formal maupun informal. *Society* ini meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, dan lainnya.

Kesejajaran tiga elemen di atas mengandung arti akan pentingnya redefinisi peran dan hubungan ketiga institusi (negara, pasar, dan masyarakat) dalam mengelola sumber daya ekonomi, politik, dan sosial budaya yang ada dalam masyarakat. Keterkaitan tiga elemen diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis sehingga terwujud suatu negara yang bersih dan responsif (*clean and responsive state*), semaraknya masyarakat madani (*vibrant civil society*), dan kehidupan bisnis yang bertanggungjawab (*good corporate governance*). Untuk terciptanya 3 elemen ini diperlukan kehadiran institusi negara yang kuat yang dapat mengembangkan dan menegakkan *rule of law* sebagai instrumen untuk mengatur elemen lainnya dari praktek penyimpangan.

3.6. Anggaran Kinerja

Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era *New Public Management* telah mendorong upaya untuk mengembangkan pendekatan anggaran yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran pemerintah. Sistem anggaran kinerja merupakan salah satu anggaran yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan reformasi pemerintahan yang terdiri atas penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan pelayanan publik.

Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sistem anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.

3.6.1. Pengertian Anggaran kinerja

Secara umum terdapat berbagai definisi tentang anggaran kinerja. Indra Bastian (2001:92) mengatakan anggaran kinerja merupakan teknik penyusunan anggaran

berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan unit *cost* dari setiap kegiatan yang terstruktur. Maksud terstruktur di sini dimulai dari pencapaian tujuan, program, dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen. Sedangkan menurut Sjahrudin Rasul (2003:49) yang mengutip pandangan dari Government Performance Result Act (1994) mengatakan:

“Performance budgeting is a systematic approach to help government become more responsive to the taxpaying public by linking program funding to performance and production.”

(“Anggaran kinerja adalah suatu pendekatan sistematis untuk membantu pemerintah menjadi lebih tanggap kepada masyarakat pembayar pajak dengan mengaitkan pendanaan program pada kinerja dan produksi.”)

Masih dalam buku yang sama (Sjahrudin Rasul, 2003:49), mengutip pengertian dari Government of Alberta, Canada sebagai berikut:

“Performance budgeting is a system of planning, budgeting, and evaluation that emphasizes the relationship between money budgeted and result expected.”

(“Anggaran kinerja adalah suatu sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang menekankan pada hubungan antara uang yang dianggarkan dengan hasil-hasil yang diharapkan.”)

Intisari dari berbagai defenisi di atas pada dasarnya merujuk bahwa melalui penerapan anggaran berbasis kinerja yang menyajikan informasi kinerja secara bersamaan dengan jumlah dana yang dibutuhkan akan meningkatkan kualitas proses

pengambilan keputusan (penganggaran). Hal ini disebabkan oleh fokus alokasi anggaran akan lebih diarahkan pada hasil-hasil yang diinginkan. (GAO:1999)

3.6.2. Pengukuran Kinerja


1. Pengertian Pengukuran Kinerja

Ukuran kinerja dan indikator kinerja merupakan dua istilah yang berbeda. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Pengukuran kinerja memberikan penetapan angka untuk pembandingan (LAN dan BPKP, 2000:5)

2. Aspek Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan publikasi Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintahan oleh LAN Jakarta (LAN dan BPKP, 2000:7), maka pengukuran kinerja sangat terkait dengan aspek-aspek yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aspek Finansial, terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan dari setiap instansi pemerintahan;
- b. Aspek Kepuasan Pelanggan (Customer), yaitu bagaimana instansi pemerintah merespon tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dengan memberikan pelayanan yang prima secara terus menerus;
- c. Aspek Operasi Bisnis Internal, ditujukan untuk informasi bisnis internal guna memastikan bahwa kegiatan pemerintah sudah *in-concert* (seirama) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam rencana strategis;

- 
- d. Aspek Kepuasan Pegawai dalam setiap organisasi, pegawai merupakan aset yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi dan peran strategis;
 - e. Aspek Kepuasan Komunitas dan *Stakeholders*, Informasi dan pengukuran kinerja harus didesain untuk mengakomodasi kepuasan dari para stakeholder;
 - f. Aspek Waktu, ukuran waktu merupakan variabel penting dalam desain pengukuran kinerja untuk kebutuhan perputaran informasi yang cepat untuk membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat

3.6.3. Indikator Kinerja

Pengertian indikator kinerja berdasarkan penyampaian LAN dan BPKP (2000:5) diartikan sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat diukur dan digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik pada tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun setelah kegiatan selesai (*ex-post*). Indikator kinerja juga dapat digunakan untuk melihat kemajuan dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi instansi pemerintahan. Dengan demikian tanpa indikator kinerja akan menyulitkan pihak yang ingin memberikan penilaian terhadap kinerja dari kebijaksanaan/program/kegiatan instansi pemerintahan, yang pada akhirnya akan menyulitkan memberi penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagaimana yang disampaikan oleh Badrul Munir (2003:61) sebagai berikut:

- a. Memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan;
- b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan termasuk dalam menilai kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya;
- c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi.

Dalam modul LAN dan BPKP (2000:10) dijelaskan bahwa sebelum menyusun dan menetapkan indikator kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat dalam penyusunan indikator kinerja, dimana syarat ini berlaku untuk semua kelompok kinerja. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Spesifik dan jelas, sehingga mudah dipahami dan meminimalisasi kemungkinan kesalahan interpretasi;
- b. Dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif; yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama;
- c. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
- d. Dapat dicapai dan bermanfaat, untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak;
- e. Efektif, data yang digunakan berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Setelah menetapkan program dan aktivitas dari organisasi dan mengidentifikasi elemen-elemen dari program tersebut, maka data dan informasi yang tersedia dapat digunakan untuk merancang indikator kinerja guna mengukur, menganalisa dan melakukan evaluasi kinerja organisasi. Indikator kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Indikator Masukan (*Input*). Indikator masukan mengukur jumlah sumber daya seperti dana, SDM, peralatan, material, dan masukan lain yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
2. Indikator Keluaran (*Output*). Indikator keluaran merupakan hasil langsung yang dicapai dari input suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, organisasi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana.
3. Indikator Hasil (*Outcome*). Indikator hasil merupakan pencerminan dari berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator Manfaat (*Benefit*). Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh secara langsung dari indikator hasil. Manfaat baru tampak setelah beberapa tahun kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal.
5. Indikator Dampak (*Impact*) Indikator dampak memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.

3.6.4. Penetapan Standar Indikator Kinerja

Setelah menentukan semua indikator kinerja yang berkaitan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan standar capaian kinerja untuk setiap indikator yang telah ditentukan. Cara yang sering digunakan dalam penetapan standar indikator kinerja adalah dengan menggunakan metode DELPHI, yaitu menanyakan kepada pihak yang berpengalaman dalam bidang tertentu yang dikuasainya. Dalam penetapan standar indikator kinerja harus memperhatikan beberapa kriteria. Adapun kriteria tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Dapat dicapai (*attainable*), yakni sesuai dengan usaha-usaha yang dilakukan pada kondisi yang diharapkan akan dihadapi.
- b. Ekonomis, yakni biaya seharusnya rendah dikaitkan dengan kegiatan yang dicakup.
- c. Dapat diterapkan (*aplicable*), yakni sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. Jika terjadi perubahan kondisi, harus dibangun standar yang setiap saat dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada (*built-inflexibility*)
- d. Konsisten, yang akan membantu keseragaman komunikasi dan operasi ke seluruh fungsi organisasi.
- e. Menyeluruh (*all-inclusive*), yang mencakup semua aktivitas yang saling berkaitan.
- f. Dapat dimengerti (*Understandable*) yang diekspresikan dengan mudah, jelas, untuk menghindari kesalahan komunikasi atau keaburan

- g. Dapat diukur (*measureable*), yakni harus dapat dikomunikasikan dengan presisi
- h. Stabil, yakni harus memiliki jangka waktu yang cukup untuk dapat memprediksi dan menyediakan usaha-usaha yang dilakukan.
- i. Dapat diadaptasi (*adaptable*), yakni didesain sedemikian rupa sehingga elemen-elemen dapat ditambah, diubah, dan dibuat baru tanpa melakukan perubahan pada seluruh struktur.
- j. Legitimasi, maksudnya mendapat pengakuan secara resmi dari berbagai pihak.
- k. Seimbang (*equitable*), dapat diterima sebagai suatu dasar perbandingan oleh pihak yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan.
- l. Fokus pada pelanggan, dimana harus terarah pada hal-hal penting yang diinginkan pelanggan (*intern dan extern*) seperti siklus waktu, mutu, kinerja skedul biaya, dan kepuasan pelanggan.

3.6.5. Penerapan Anggaran Kinerja

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas lama yang sudah dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun

asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Penerapan anggaran kinerja di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan salah satu landasan konstitusional yang mengharuskan pengelolaan keuangan negara dan daerah dikelola berdasarkan anggaran kinerja. Akan tetapi pada tingkat pengelolaan keuangan daerah (APBD) sebelum dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 2003 sudah diwajibkan untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah (PP) 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, PP 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan secara teknis diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan.

Misi utama dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas adalah adanya keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari pelaksanaan desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dari diberlakukannya otonomi daerah. Selain itu,

pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan dari pemerintah pusat, tetapi harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini dapat lebih responsif dan akomodatif.

Otonomi daerah dengan nuansa manajemen keuangan daerah harus memperlihatkan pengelolaan keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan anggaran kinerja dalam sistem penganggaran daerah dilatarbelakangi oleh hal-hal seperti berikut ini:

- a. Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik;
- b. Sistem, prosedur, format, dan struktur APBD yang berlaku selama ini tidak mampu mendukung tuntutan perubahan; dan
- c. Terdapat upaya yang kuat untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelolaan keuangan daerah dan unit-unit pelayan publik.

Sistem anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Untuk itu guna mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah maka berdasarkan PP 105 Tahun 2000 Pasal 20 Ayat (1), terlebih dahulu harus dikembangkan (a) Standar Analisa Belanja, yaitu penilaian beban atas beban kerja dan biaya terhadap satuan kegiatan; (b) Tolak Ukur Kinerja, adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada

setiap unit organisasi perangkat daerah; dan (c) Standar Biaya, yaitu harga satuan unit biaya yang berlaku pada masing-masing daerah kerja

3.7. Penggaran Daerah.

3.7.1. Konsep Anggaran Daerah

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi pemerintah daerah, penganggaran merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Hal ini tentu berbeda dengan sektor swasta, di mana pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada anggaran daerah justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Dengan demikian anggaran daerah merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Penganggaran daerah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran daerah dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategis (Renstra) telah selesai dilakukan. Dalam hal ini anggaran merupakan hasil artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategis yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan rencana yang sudah disusun. Anggaran dalam hal ini merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan

organisasi. Aspek- aspek yang harus tercakup dalam anggaran daerah meliputi; aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas.

Pengertian dari anggaran disampaikan oleh Assegaf Ibrahim Abdulah (Kamus Akuntansi, 2001) sebagai "Suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis tentang perkiraan pendapatan dan biaya. Atau penjabaran rencana kedalam angka kuantitatif ". Sedangkan menurut Badrul Munir (2003:26) menyebutkan anggaran daerah merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan daerah, meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran daerah berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah pada masa yang akan datang sehingga setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam periode tertentu dan berisi rencana kegiatan yang dipersentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran daerah merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Anggaran daerah harus dapat memenuhi kriteria:

1. Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat.

2. Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen–departemen pemerintah, pemerintah provinsi atau daerah .

3.7.2 Pentingnya Anggaran Daerah

Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki oleh pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut.

Pada posisi ini anggaran penting sebagai alat ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keputusan anggaran yang dibuat oleh Pemda atau Pemprov seharusnya dapat merefleksikan prioritas pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dengan baik. Dalam lingkup daerah, anggaran merupakan *blue print* keberadaan sebuah daerah, dalam hal ini anggaran daerah menjadi sangat penting karena beberapa alasan, antara lain:

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial–ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*) dan *trade-offs*.

3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran daerah merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

3.7.3. Fungsi Anggaran Daerah

Anggaran daerah mempunyai beberapa fungsi utama yang penting untuk diketahui dan dijadikan acuan dalam penyusunan APBD. Fungsi anggaran daerah adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan.

Anggaran merupakan alat untuk perencanaan (*planning tool*) manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Dari aspek perencanaan, anggaran daerah dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan apa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

Dengan demikian, anggaran sebagai alat perencanaan dapat digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan;
- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya;
- c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan
- d. Merumuskan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian.

Sebagai alat pengendalian (*control tool*) anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending*, dan salah sasaran yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Pengendalian anggaran daerah dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

- a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;
- b. Menghitung selisih anggaran;
- c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians;
- d. Merevisi standar biaya atau target tahun anggaran berikutnya.

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal.

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*) pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut akan diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi

4. Anggaran Sebagai Alat Politik.

Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian

bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen sektor publik oleh manajer sektor publik.

5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi.

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran, sehingga anggaran daerah merupakan alat koordinasi dalam pemerintahan. Anggaran daerah yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu anggaran daerah juga berfungsi sebagai alat komunikasi unit-unit kerja dalam lingkup eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan secara transparan ke seluruh jajaran organisasi pemerintahan untuk dilaksanakan.

6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja.

Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target dan realisasi anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik akan diukur berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi.

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara efisien, efektif, dan ekonomis dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik.

Anggaran daerah harus dapat difungsikan sebagai sarana penciptaan ruang publik (*publicsphere*) yang sehat dan efektif dengan membuka ruang publik kepada masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya

3.7.4. Prinsip-Prinsip Anggaran Daerah

Mengingat ruang lingkupnya yang luas dan terkait dengan kepentingan dasar publik, maka penyusunan, penetapan, dan pengelolaan anggaran daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip anggaran, yang meliputi:

1. **Otorisasi oleh legislatif.** Maksudnya adalah anggaran harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
2. **Komprehensif.** Maksudnya adalah anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu pada dasarnya adanya dana nonbudgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang komprehensif.
3. **Keutuhan anggaran.** Maksudnya adalah semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).
4. **Nondiscretionary Appropriation.** Maksudnya adalah jumlah yang mendapat persetujuan dari legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
5. **Periodik.** Maksudnya anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitalunan.
6. **Akurat.** Maksudnya adalah setiap estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan *in-efisiensi* anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overesimate* pengeluaran.

7. **Jelas.** Maksudnya adalah anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami oleh masyarakat, dan tidak membingungkan.
8. **Diketahui publik.** Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas, sebagai wujud dari *good governance*.

Kedelapan prinsip di atas merupakan syarat yang harus dijadikan dasar pemikiran bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyusunan anggaran daerahnya. Pada dasarnya kedelapan prinsip tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dan apabila terdapat satu prinsip saja yang dilanggar oleh pemerintah daerah maka akan berdampak pada citra dan pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

3.8. Keuangan Daerah

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sistem perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan keuangan daerah sehingga terjadi pemerataan sumber daya keuangan dalam rangka membiayai tanggung jawab otonominya.

Abdul Halim (2002:19) mengutip pendapat dari Mamesah (1995) mengartikan keuangan daerah sebagai "semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang

lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dari definisi tersebut terdapat dua hal yang perlu dijelaskan yaitu:

Keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola secara langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah, sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan adalah meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Peraturan keuangan daerah yang baru membawa konsekuensi berubahnya juga bentuk APBD. Dalam APBD yang baru elemen-elemennya telah berubah menjadi tiga bagian yaitu penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD sebelumnya. Adanya pembiayaan dimaksudkan untuk memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan definisi pendapatan sebagai hak pemerintah daerah, sedangkan pinjaman belum tentu menjadi hak pemerintah daerah. Selain itu dalam APBD yang baru ini memungkinkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

3.9. Pengukuran *Value For Money*

3.9.1 Konsep *value for money*

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik sebagai tuntutan dari penerapan anggaran yang berbasis kinerja. Hal ini terjadi karena sektor publik di Indonesia baik pada tingkat pusat ataupun pada tingkat daerah masih sering dinilai sebagai lembaga yang

inefisien, selalu boros dalam menggunakan dana, terjadi kebocoran anggaran yang tinggi (korupsi), dan selalu merugi dalam melakukan aktivitasnya. Tuntutan baru muncul agar pemerintah daerah memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama yaitu: ekonomis, efisien, efektif dengan cakupan sebagai berikut:

1. **Ekonomis:** dalam arti kehematan yang mencakup hati-hati dan cermat (*predency*) dalam pengadaan alokasi sumber daya, serta pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait pada sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Ekonomi menggambarkan hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*) atau dengan kata lain ekonomi adalah praktek pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu ada.
2. **Efisiensi:** berhubungan erat dengan konsep produktivitas dalam arti berdaya guna dalam penggunaan sumber daya, dimana penggunaan sumber daya diminimalkan dan hasilnya yang dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing cost*). Efisiensi merupakan

perbandingan output/input (*cost of output*) yang digunakan dengan dikaitkan pada standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Proses kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

3. **Efektifitas:** pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran dari target kegiatan (berhasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Proses kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir (*spending wisely*).

3.9.2 Indikator Value For Money

Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian yaitu: (1) indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi), dan (2) indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (seperti staf, upah, dan biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan. Sedangkan indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program.

Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Karena disatu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Atau dilain pihak sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan

akan tetapi mungkin dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan efisien. Jika suatu program efektif dan efisien maka program yang dijalankan dapat dikatakan *cost-effectiveness*. Indikator efektivitas biaya merupakan kombinasi informasi efisiensi dan efektivitas dan dapat memberikan ukuran kinerja *bottom line* yang dalam sektor publik diidentikkan dengan pelayanan publik.

3.9.3 Pengukuran *Value For Money*

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja *value for money* adalah memahami aktivitas operasional organisasi dengan menganalisis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara lebih spesifik dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini:

a. Pengukuran Ekonomis

Pengukuran ekonomis hanya mempertimbangkan masukan (input) yang dipergunakan. Dalam hal ini ekonomi merupakan ukuran relatif. Berbagai pertanyaan yang perlu diperhatikan dalam pengukuran ekonomi, antara lain; (i) Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi; (ii) Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi sejenis yang dapat diperbandingkan; dan (iii) Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansial secara maksimal. Tiga pertanyaan ini dapat dikatakan sebagai pertanyaan mendasar, dan selanjutnya masih dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mengetahui tingkat ekonomisnya.

b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dan input. Semakin besar rasio berarti semakin tinggi nilai efisiensi. Dalam pengukuran indikator *value for money* efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu; efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumberdaya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumberdaya input pada tingkat output tertentu

c. Pengukuran Efektivitas

Berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dapat diukur dengan tingkat efektivitas dari kegiatan organisasi tersebut. Apabila organisasi berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.



BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Tentang Provinsi Sulawesi Selatan

4.1.1. Sejarah Singkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada awalnya Sulsel merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Gubernur Provinsi Sulawesi yang pertama adalah Dr. G.S.S.J. Sam Ratulangi yang bertugas dalam menyusun pemerintahan sekaligus mensosialisasikan berita proklamasi kemerdekaan RI ke seluruh wilayah Provinsi Sulawesi.

Namun keberadaan Provinsi Sulawesi tidak berlangsung lama sebab kemudian tentara sekutu berusaha menyusup ke dalam unsur-unsur pemerintahan Belanda yang dikenal sebagai *Nederlands Indie Civil Administration* (NICA) yang ingin kembali berkuasa setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Ke-Dua.

Pada bulan April tahun 1946 Belanda berhasil menyelenggarakan suatu konferensi di Malino. Konferensi ini kemudian memprakarsai terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Kemudian diadakan konferensi lanjutan di Bali akhir Desember tahun 1946, dan terbentuklah Negara Indonesia Timur (NIT) sebagai salah satu bagian dari RIS dalam bentuk satu ikatan dengan Negeri Belanda (Negara Uni). Dalam pembentukan NIT ini Makassar kemudian ditetapkan sebagai ibukota NIT, sementara Sulsel menjadi salah satu bagian dari 13 daerah otonom dalam wilayah NIT. Sulawesi Selatan sendiri membentuk pemerintahan gabungan yang disebut ikatan Sulawesi Selatan, terdiri dari kerajaan-kerajaan di daerah ini

Pada tahun 1957 Provinsi Sulawesi dipecah menjadi 13 daerah otonom setingkat kabupaten dengan Makassar sebagai Kota Praja-nya. Tiga tahun kemudian

yakni pada tahun 1960 Provinsi Sulawesi resmi dibagi menjadi 2 bagian masing-masing Sulawesi Selatan Tenggara dengan ibukota Makassar dan Sulawesi Utara Tengah dengan Manado sebagai ibukotanya.

Sulawesi Selatan resmi mendapatkan status Provinsi pada tahun 1964 melalui penetapan UU No. 13 Tahun 1964 yang semula berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964. Dengan UU ini Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dipecah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Makassar sebagai ibukotanya dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Kendari sebagai ibukotanya.

Setelah Provinsi Sulsel bertahan selama kurang lebih 40 tahun, maka pada pertengahan tahun 2004, Provinsi Sulawesi Selatan kembali dimekarkan menjadi dua provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat

4.1.2. Keadaan Geografis Provinsi Sulawesi Selatan

Sulawesi dikenal dengan nama *Celebes* sebuah pulau yang indah permai dengan luas tanah 227 ribu kilometer persegi. Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kondisi geografis yang berbukit-bukit membentang dari bagian utara sampai ke selatan. Antara bentangan tersebut terdapat dataran rendah yang potensial untuk lahan pertanian dan pertambakan.

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan ketinggian dari permukaan air laut dapat dibagi dalam beberapa bagian wilayah yaitu dengan ketinggian antara 0-100 meter di atas permukaan laut (dpl) seluas 1.179.876 hektar atau 18,39% dari luas wilayah Sulsel, antara 100-500 meter dpl seluas 1.012.340 hektar atau 15,75% dari luas wilayah Sulsel, antara 500-1000 meter dpl seluas

1.684.496 hektar atau 26,24% dari luas wilayah Sulsel, dan di atas 1000 meter dpl seluas 2.369.592 hektar atau mencapai 36,65% dari luas wilayah Sulsel. Hal ini berarti sebagian besar luas daerah Sulsel berada pada daerah yang cukup tinggi.

Luas wilayah Provinsi Sulsel yang mencakup wilayah darat dan perairan pada tahun 2003 yakni sekitar 62.361,71 kilometer persegi. Sementara jumlah penduduknya pada tahun 2003 jumlah penduduknya sekitar 8.213.864 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sejak tahun 1999-2003 sebesar 1,53%.

4.1.3. Kebijakan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan

A. Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) 2000-2005 Sulawesi Selatan

Dinamika lingkungan strategis yang memperlihatkan kecenderungan untuk berubah dengan laju yang semakin cepat menyebabkan pola perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang mengacu kepada format rencana jangka panjang (*Long Term Planning*) menjadi kurang sesuai. Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang dicirikan dengan perumusan rencana pembangunan yang bersifat rinci yang akan dilakukan oleh setiap sektor dan daerah selama 5 tahun ke depan, saat ini tidak akan mampu lagi memberikan hasil yang optimal, karena materi rencana yang disusun pada beberapa tahun sebelumnya sering menjadi tidak relevan lagi akibat dinamika lingkungan strategis yang memperlihatkan kecenderungan berubah dengan laju yang semakin cepat.

Di samping itu, penyusunan rencana yang dilaksanakan secara terpusat menyebabkan nuansa-nuansa kebhinekaan wilayah cenderung terabaikan yang akhirnya bermuara pada proses dan hasil pembangunan yang "asing" bagi masyarakat lokal. Pola perencanaan ini, secara langsung maupun tidak langsung juga

menghambat pengembangan dan penyaluran kreatifitas wilayah dan masyarakat lokal dalam memprakarsai dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Melihat situasi lingkungan yang semakin cepat berubah dan perubahan situasi politik dalam negeri, maka pemerintah segera melakukan modifikasi pada pola perencanaan dan pendekatan pembangunan nasional. Modifikasi yang dimaksud adalah berupa diadopsinya pola rencana strategis (*strategic planning*) dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah sebagai bagian dari pergeseran pendekatan pembangunan yang berciri sentralistis menuju desentralistis.

Program Pembangunan Daerah (Propeda) adalah perwujudan dari pola perencanaan strategis. Olehnya, Propeda hanya memuat program-program pembangunan yang pokok, mendasar serta mendesak untuk dilaksanakan, sebagai upaya utama untuk memecahkan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Propeda Sulawesi Selatan disusun dengan memperhatikan dua arahan utama. Pertama adalah Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2001 - 2005, dan yang kedua adalah Garis-Garis Besar Haluan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan tahun 2000 - 2004.

Tidak semua permasalahan di tingkat nasional merupakan permasalahan di wilayah Sulawesi Selatan dan atau dapat diselesaikan di tingkat Provinsi, sebaliknya tidak semua permasalahan Provinsi Sulawesi Selatan tercantum pada Propenas. Oleh sebab itu, substansi Propeda Sulawesi Selatan merupakan kombinasi dari upaya-upaya pemecahan permasalahan pembangunan nasional yang dapat dilakukan di tingkat Provinsi serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya-upaya pembangunan yang diperlukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Provinsi Sulawesi

Selatan sebagaimana yang diamanahkan pada Garis-garis Besar Haluan Pembangunan Daerah (GBHD) Sulawesi Selatan tahun 2000-2004.

Semua upaya pembangunan dimaksud, baik yang dijabarkan dari Propenas maupun yang merefleksikan kebutuhan spesifik Sulawesi Selatan, dirumuskan dengan senantiasa mengacu kepada nilai-nilai serta arahan kebijakan yang diamanahkan oleh GBHD Sulawesi Selatan. Dengan demikian, pola pemecahan permasalahan pembangunan nasional di Sulawesi Selatan tidak akan selalu serupa dengan pola pemecahan masalah yang sama yang dilakukan di wilayah Provinsi yang lain.

Propeda Sulawesi Selatan bukan hanya merupakan penjabaran program-program pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan saja, tetapi merupakan program pembangunan provinsi yang akan dilaksanakan oleh setiap unsur dan atau kelompok masyarakat dan pemerintah sendiri. Propeda merupakan perwujudan komitmen pemerintah dan masyarakat Sulawesi Selatan tentang upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan secara bersama dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Dengan posisi seperti ini, maka Propeda akan menjadi acuan utama penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi setiap lembaga pemerintahan di Sulawesi Selatan. Di samping itu, Propeda ini juga menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Setiap kabupaten dan kota dalam penyusunan Propedanya diharapkan pula senantiasa mengacu kepada Propeda provinsi, agar pembangunan setiap daerah dapat saling terkait dan saling menunjang dalam upaya pencapaian

tujuan dan sasaran masing-masing dalam kerangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi Provinsi dan nasional.

B. Rencana Strategis Provinsi Sulawesi Selatan 2003-2008

Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003-2008 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan tindak lanjut dari penjabaran Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Sulawesi Selatan, dengan tetap memperhatikan tugas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. RENSTRA Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008 disusun dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Dengan adanya RENSTRA ini diharapkan kinerja organisasi dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih ditingkatkan dalam rangka menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Selain itu juga diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan peran serta pihak dalam arti dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda dan sekaligus dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pencapaian kinerja baik terhadap gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat I ataupun setiap instansi pemerintahan yang terdapat dalam lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sifat RENSTRA Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah: pertama, lebih memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran

yang dinamis (*moving target*); kedua, mengikuti kecenderungan baru; ketiga, lebih berorientasi pada tindakan antisipatif.

Tujuan penyusunan RENSTRA Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Sasaran penyusunan RENSTRA Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Tersedianya kebijakan dan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;
2. Tersedianya rumusan program strategis yang merupakan indikator program APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan sekaligus sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja pemerintah provinsi;
3. Terwujudnya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD provinsi.

RENSTRA Provinsi Sulawesi Selatan sebagai suatu perencanaan strategis pada intinya mengacu pada visi, misi, dan program berbasis pada analisis lingkungan strategis. Adapun visi Pemerintah Sulawesi Selatan sebagaimana tertera dalam Garis-garis Besar Haluan Pembangunan Daerah (GBHD) dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan ditegaskan bahwa Visi Sulawesi Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut

“Mewujudkan Sulawesi Selatan menjadi wilayah terkemuka di Indonesia melalui pendekatan kemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan”

Visi 2020 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Memperhatikan kewenangan otonomi Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000 serta memperhatikan analisis perkembangan lingkungan strategis, maka dirumuskan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2003-2008 sebagai berikut :

“Sulawesi Selatan menjadi lebih maju dan terkemuka dalam penerapan otonomi dengan berorientasi pada pemerintahan yang baik”

Lebih maju dimaksudkan posisi Sulawesi Selatan lebih baik dari kondisi sekarang. Terutama diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Terkemuka dalam penerapan otonomi dimaksudkan bahwa aparat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lebih terpercaya, efisien dan efektif dibanding dengan Provinsi lain dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri

Berorientasi pada pemerintahan yang baik dimaksudkan adalah sekalipun pelaksanaan otonomi berubah karena dinamika perkembangan lingkungan strategis namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik (good governance) dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Berdasarkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas yang pada hakikatnya diarahkan untuk mendukung diwujudkannya Visi Sulawesi Selatan Tahun 2020, maka dirumuskan Misi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan pendidikan dan pengamatan nilai agama dan budaya dalam segala aspek kehidupan.
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan daya saing usaha swasta dan masyarakat;
3. Menata kelembagaan pemerintah menjadi lebih terpercaya, efisien dan efektif;
4. Mendorong pemerintahan kabupaten/kota dalam memfasilitasi kelembagaan masyarakat menjadi lebih mandiri;
5. Mendorong pengembangan peran wilayah Sulawesi Selatan secara lebih efektif sebagai pusat pelayanan Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, maka harus dibingkai dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Nilai-nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. *Resopa temimanginggi namalomo naletei pammase dewata*. Ini bermakna bahwa upaya pembangunan daerah akan berhasil melalui kerja keras yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- b. *Sipakatau*, menjalin kerjasama dengan prinsip saling menghargai.

- c. *Siri na pacce*, menghargai kebhinekaan yakni menghargai keberagaman untuk kebersamaan dalam bingkai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat sebagai kekayaan budaya yang menjamin terselenggaranya pembangunan yang berkesinambungan.
- d. Kesadaran Kosmologis, menyadari bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta, oleh karena itu harus senantiasa menjaga interkoneksi harmonis dengan alam semesta berdasarkan kepercayaan dan kecintaan kepada Sang Pencipta.
- e. Keterbukaan dan Akuntabilitas, kehidupan kemasyarakatan dikelola berdasarkan prinsip transparansi, jujur dan bertanggung jawab.
- f. *Assamaturuseng (Passamaturukang)*, merupakan syarat-syarat dalam menata kehidupan masyarakat yang berbasis pada kesepakatan dan konsensus, dimana kesepakatan merupakan kiat untuk mempertanggungjawabkan berbagai aspirasi masyarakat dan sebagai basis dalam menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan strategi dasar terhadap pemerintahan di Sulawesi Selatan sebagai berikut:

“Meningkatkan pelayanan yang efisien dan efektif untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik, mempercepat terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai pusat keunggulan pengembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang intinya mengembangkan sumber daya manusia yang lebih dinamis”

Sesuai dengan strategi di atas, dengan tetap mengacu pada agenda pembangunan yang ditetapkan dalam PROPEDA, maka dirumuskan pokok kebijakan pemerintah Sulawesi Selatan yang menjadi acuan bagi setiap instansi pemerintahan dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan pemerintah ini disusun dengan pendekatan kemandirian lokal, berbasis pada konsep tatanan yang didefinisikan sebagai perwujudan interkoneksi antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Keempat pokok kebijakan pembangunan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia;
2. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Wilayah;
3. Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
4. Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat.

4.2. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Setelah melihat gambaran mengenai Provinsi Sulawesi Selatan baik dari sisi geografisnya maupun dari sisi kebijakan dan program pemerintahannya, maka secara khusus akan kita gambarkan instansi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara langsung dan tidak langsung bertugas menjabarkan kebijakan dan program pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan

4.2.1. Gambaran Umum Instansi

Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Selatan berkedudukan di Kompleks Kantor Gubernur Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 No. 269 Makassar.

Setda Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Kedudukan Setda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Perda tersebut adalah sebagai unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Setda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu instansi yang sangat berperan penting dalam kegiatan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan terlebih dalam era otonomi daerah saat ini, khususnya membantu kinerja gubernur dalam hal kelancaran administrasi demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya

Tugas pokok Setda adalah membantu gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Daerah Provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Setda Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut

1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah provinsi.
2. Menyelenggarakan administarasi pemerintahan.
3. Pegelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan provinsi.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi umum dari Setda Provinsi Sulawesi Selatan ini selanjutnya menjadi spesifik pada masing-masing biro dan sub biro yang diatur dan

ditentukan dalam operasionalisasi organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat sembilan biro di Setda ini yang mempunyai tugas dan fungsi khusus. Kesembilan biro tersebut adalah sebagai berikut

4.2.2. Struktur Organisasi

Pada umumnya struktur organisasi adalah suatu gambaran skematis tentang hubungan kerja, dalam rangka mencapai tujuan bersama, dengan cara menghubungkan fungsi dari suatu badan dan menetapkan hubungan antarpegawai dalam melaksanakan tugasnya. Struktur organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerja sama antara satu dengan yang lainnya (lihat gambar 1). Susunan organisasi pada Setda Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 adalah sebagai berikut:

1. **Sekretaris Daerah.** Sekretaris Daerah adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan seluruh tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada gubernur.

2. **Asisten Sekretaris Daerah**

- a. **Asisten Ketataprajaan**

Asisten Ketataprajaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan otonomi daerah provinsi dan kewenangan dekonsentrasi, serta tugas pembantuan, mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah dan pembinaan organisasi/tatalaksana pemerintah

provinsi serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pedoman dalam rangka pembeinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota

Untuk menjalankan tugas tersebut di atas Asisten Ketataprajaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang desentralisasi/otonomi daerah dan tugas pembantuan serta dekonsentrasi pada badan, dinas dan kantor lingkup pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.
2. Perumusan kebijaksanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
3. Perumusan kebijaksanaan pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan produk hukum daerah.
4. Perumusan kebijakan Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah provinsi.
5. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pedoman dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.
6. Melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan bidang ketataprajaan.

b. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan.

Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan membina perekonomian daerah dan administrasi pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan, serta kesejahteraan sosial dengan badan, dinas dan kantor lingkup pemerintahan daerah serta lembaga terkait.
2. Melaksanakan koordinasi perekonomian daerah, administrasi, pembangunan daerah dan administrasi keuangan daerah.
3. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan pengembangan dan pembinaan perekonomian daerah.
4. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan daerah serta administrasi pembangunan secara wilayah.
5. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan penyusunan anggaran, pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan daerah.

c. Asisten Administrasi

Asisten Administrasi mempunyai tugas pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perlengkapan, tata usaha dan arsip, urusan rumah tangga serta kepegawaian lingkup Sekertariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Asisten Administrasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan program kebutuhan perbekalan dan pengolahan perlengkapan, serta menyiapkan pembinaan administrasi perlengkapan.
2. Perumusan kebijakan pembinaan urusan rumah tangga, tatausaha, kearsipan, humas dan protokol serta sandi dan telekomunikasi.
3. Perumusan kebijakan pembinaan kepegawaian dan pengelolaan keuangan lingkup Sekretariat Daerah.

3. Biro

Terdapat sembilan biro yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Kesembilan biro tersebut adalah sebagai berikut:

a. Biro Bina Otonomi Daerah

Tugas Pokok:

Biro Bina Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pembinaan pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dan tugas pembantuan, pelayanan administrasi perangkat daerah dan legislatif daerah serta kerjasama antar daerah, memfasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah serta penataan daerah.

Fungsi:

1. Menyiapkan bahan dalam rangka kebijaksanaan penataan kewenangan provinsi.
2. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kewenangan provinsi.
3. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan kewenangan kabupaten/kota
4. Menyiapkan bahan dan pengelolaan administrasi pemekaran, pembentukan, penggabungan, dan penghapusan daerah otonom.
5. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi proses kerjasama antar daerah.
6. Menyiapkan bahan dalam rangka pengaturan dan pembinaan penyelesaian perselisihan antar daerah.
7. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penataan daerah.

b. Biro Bina Dekonsentrasi;

Tugas Pokok:

Biro Bina Dekonsentrasi mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi perumusan kebijakan di bidang kewenangan dekonsentrasi, pemerintahan desa dan administrasi kependudukan.

Fungsi:

1. Melakukan pembinaan penyelenggaraan tata hubungan kewenangan dekonsentrasi dan kerjasama antar lembaga
2. Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kewenangan di bidang pemerintahan dan otonomi desa
3. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan

c. **Biro Hukum dan Organisasi**

Tugas Pokok:

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan telaah hukum, bantuan hukum dan dekontaminasi, pengkajian peraturan perundang-undangan serta menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan.

Fungsi:

1. Menyiapkan dan merumuskan bahan koordinasi perumusan peraturan daerah dan keputusan gubernur.
2. Menyiapkan dan merumuskan bahan pertimbangan dan bantuan hukum dan HAM kepada semua unsur pemerintah Provinsi.
3. Melakukan dokumentasi hukum dan publikasi serta penyuluhan produk hukum.
4. Menyiapkan dan merumuskan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penataan produk hukum daerah dan kelembagaan.
5. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis evaluasi kinerja perangkat daerah.
6. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatalaksanaan.
7. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis analisis jabatan.

d. Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan



Tugas Pokok:

Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, konsultasi dan pengkajian dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan pembinaan pengembangan perekonomian daerah serta melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka pengadministrasian program pembangunan dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi dan melaksanakan pengendalian administrasi pembangunan daerah.

Fungsi:

1. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan pengkajian kinerja perekonomian Daerah dalam rangka perumusan kebijaksanaan, pengembangan perekonomian daerah serta melakukan pembinaan dan pemantauan.
2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka sinkronisasi keterpaduan pelaksanaan dan peningkatan kinerja pembangunan dan perekonomian daerah serta peningkatan lembaga ekonomi dan badan-badan usaha.
3. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan, pembukuan, dan sosialisasi pedoman standarisasi dan perizinan serta melakukan pembinaan dan pemantauan.

4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penggalangan dan pelaksanaan kerjasama ekonomi serta melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaannya.
5. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan pengkajian perumusan kebijaksanaan dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah serta melakukan pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan.
6. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penilaian dan pengelohan administrasi pembangunan.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan pengembangan perekonomian daerah dan administrasi pembangunan daerah.

e. Biro Keuangan

Tugas Pokok:

Biro Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD, mengelola dan membina administrasi keuangan.

Fungsi:

1. Menyiapkan bahan penyusunan APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD.
2. Menyiapkan petunjuk/pedoman dalam melaksanakan APBD.
3. Menyiapkan dan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
4. Menyelenggarakan administrasi dan pembukuan serta pembinaan administrasi keuangan.

5. Melakukan pengujian kebenaran penagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).
6. Menyiapkan penunjukan pejabat dalam pelaksanaan APBD.
7. Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap realisasi/pelaksanaan APBD.

f. Biro Kesejahteraan, Agama dan Pemberdayaan Perempuan

Tugas Pokok:

Biro Kesejahteraan, Agama, dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi serta kegiatan bidang kesejahteraan, agama, dan pemberdayaan perempuan.

Fungsi:

1. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan pedoman pembinaan bidang keagamaan.
2. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan, pendidikan, pemuda, dan olahraga.
3. Menyiapkan bahan pedoman dan mengkoordinasikan pembinaan dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan perempuan.

g. Biro Perlengkapan

Tugas Pokok:

Biro Perlengkapan mempunyai tugas merumuskan program standarisasi, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan, pelelangan, inventarisasi

Fungsi:

1. Melakukan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan pengadaan barang.
2. melakukan pembinaan dan petunjuk teknis penyimpanan dan pemeliharaan barang.
3. Melakukan pembinaan dan petunjuk teknis pendistribusian barang.

h. Biro Bina Humas dan Protokol

Tugas Pokok:

Biro Humas dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat untuk pemantapan kebijakan pemerintah Provinsi di bidang pemerintahan dan pembangunan serta melaksanakan hubungan keprotokoleran, sandi dan telekomunikasi.

Fungsi:

1. Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan hubungan masyarakat.
2. Melakukan penerangan dan pemberitaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta melakukan publikasi dan dokumentasi.
3. Melaksanakan urusan keprotokoleran, sandi dan telekomunikasi.

i. Biro Umum

Tugas Pokok:

Biro Umum mempunyai tugas menyiapkan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, dan melaksanakan urusan rumah tangga, perjalanan dinas dan tatausaha keuangan Sekertariat Daerah Provinsi

Fungsi:

1. Melakukan urusan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan
 2. Melakukan urusan rumah tangga Sekretariat Daerah.
 3. Mempersiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan kearsipan
 4. Melakukan pembinaan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah
 5. Melakukan urusan tata usaha keuangan Sekretariat Daerah.
4. **Bagian.** Masing-masing biro terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai tugas dan fungsi yang spesifik berdasarkan bagian dari biro yang terkait/bersangkutan.
5. **Sub bagian.** Masing-masing bagian terdiri dari beberapa sub bagian yang mempunyai tugas dan fungsi yang lebih spesifik berdasarkan sub bagian dari bagian yang terkait/bersangkutan.
6. **Kelompok Jabatan Fungsional.** Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan masing-masing. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah

BAB V

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY*

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari beberapa kebijakan dan program Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2004 telah dilaksanakan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, maka dibutuhkan evaluasi penilaian kinerja terhadap anggaran yang telah digunakan sebagai cara pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang publik. Evaluasi pertanggung jawaban dapat menyangkut akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran serta sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dapat dicapai. Dalam hal inilah penilaian atas kinerja organisasi dari instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan perlu dilakukan, sebagai salah satu cara untuk menilai keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2004.

Semenjak dikeluarkannya PP 105 Tahun 2000, maka seluruh instansi pemerintahan melakukan penyusunan dan evaluasi anggaran berbasis kinerja, termasuk instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Pada instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan fokus perhatian dalam evaluasi penilaian kinerja adalah bagaimana mengukur *input*, *output*, dan *outcome* dari setiap pencapaian target dan realisasi kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilakukan..

Dalam penelitian dari skripsi ini di harapkan terdapat metode penilaian lain, untuk mengukur kinerja instansi Setda sebagai bahan perbandingan atas penilaian yang telah ada saat ini, dimana akan dilakukan pengukuran terhadap nilai efisiensi

dan efektivitas terhadap beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Setda Provinsi Sulawesi Selatan dalam tahun anggaran 2004.

5.1. Evaluasi Kinerja Setda Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pendekatan *Value For Money* untuk Tahun Anggaran 2004

Penilaian kinerja *value for money* pada instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan ini akan mengukur 2 unsur penilaian yakni nilai efisiensi dan nilai efektivitas. Sedangkan menyangkut nilai ekonomis diasumsikan telah dipenuhi. Adapun pengukuran efisiensi dan efektifitas dari masing-masing biro yang ada di instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan dapat kita lihat pada pembahasan dalam bab ini.

1. Biro Kesejahteraan, Agama, dan Pemberdayaan Perempuan (KAPP).

Berdasarkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) tahun anggaran 2004, maka Biro KAPP merencanakan 7 jenis kegiatan. Dari 7 unit kegiatan ini, terdapat 6 kegiatan yang dianggarkan dari Belanja Pelayanan Publik. Enam kegiatan Belanja Publik ini keseluruhannya menyangkut Belanja Operasional dan Pemeliharaan. Dalam pengukuran efisiensi dan efektivitas dari 6 unit kegiatan Biro KAPP ini dipilih 3 jenis kegiatan yang memiliki anggaran terbesar. Berikut ini 3 jenis kegiatan dari Biro KAPP yang memiliki anggaran terbesar berdasarkan DASK Tahun Anggaran 2004 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tiga Jenis Kegiatan Biro KAPP yang Memiliki Anggaran Terbesar

NO	UNIT KERJA/KEGIATAN	BELANJA PUBLIK	
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	TOT Pembelajaran Al-Qur'an	500.000.000	500.000.000
2	Pembinaan Kesejahteraan Perempuan	132.740.000	110.374.000
3	Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya dan Seni	115.900.000	115.744.500

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan LPJ Gubernur SulSel terhadap APBD Tahun Anggaran 2004

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

a) Kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur'an

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Dengan demikian seluruh dana yang dianggarkan dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Persentase nilai input dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Input} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\
 &= \frac{500.000.000}{500.000.000} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur output yakni keadaan/realisasi pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro KAPP maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas mencapai persentase angka 100%. Menurut

penanggungjawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase *output* dari kegiatan TOT Al-Qur'an ini mencapai angka 100%.

Setelah nilai *input* dan *output* diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nialai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Angka 100 % ini menunjukkan bahwa kegiatan dari TOT Pembelajaran Al-Qur'an ini sangat efisien, dimana antara nilai input dengan outputnya berbanding sangat maksimal.

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini nilai *outcome* terlebih dahulu harus ditentukan. Pengukuran *outcome* difokuskan pada kepuasan publik/pelanggan. Pengukuran *outcome* diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari kegiatan TOT Al-Qur'an ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai *outcome* dari kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur'an:

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan Kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur'an, dan hasil distribusinya adalah:

Tabel 5.2
Tanggapan responden atas kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur'an

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	0	0
2	Kurang mengetahui	2	20
3	Mengetahui	5	50
4	Cukup mengetahui	2	20
5	Sangat mengetahui	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden 5 orang atau mencapai 50 %.

2. Publik/Pelanggan merasakan adanya manfaat dari Kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur'an, dan hasil distribusinya adalah

Tabel 5.3
Tanggapan responden atas kegiatan TOT Pembelajaran AL-Qur'an

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	0	0
2	Kurang bermanfaat	1	10
3	Bermanfaat	5	50
4	Cukup bermanfaat	1	10
5	Sangat bermanfaat	3	30
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/responden dinilai bermanfaat dengan jumlah responden 5 orang atau mencapai 50 %.

3. Publik/Pelanggan melihat pelaksanaan berjalan dengan baik dari kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur'an, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.4
Tanggapan responden atas kegiatan TOT Pembelajaran AL-Qur'an

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	0	0
2	Kurang baik	2	20
3	Baik	7	70
4	Cukup baik	0	0
5	Sangat baik	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan baik dengan jumlah responden sebanyak 7 orang atau mencapai 70 %.

4. Publik/Pelanggan melihat kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur'an telah sesuai dengan kebutuhan/harapannya, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.5
Tanggapan responden atas pencapaian tujuan/sasaran dari kegiatan TOT Pembelajaran AL-Qur'an

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	3	30
2	Kurang sesuai	2	20
3	Sesuai	4	40
4	Cukup sesuai	0	0
5	Sangat sesuai	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden 4 orang atau mencapai 40 %.

5. Publik/Pelanggan melihat kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur'an telah meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah, dan hasil distribusinya adalah

Tabel 5.6

Tanggapan responden atas kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur'an

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	0	0
2	Kurang meningkatkan	6	60
3	Meningkatkan	2	20
4	Cukup meningkatkan	2	20
5	Sangat meningkatkan	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dengan jumlah responden 6 orang atau mencapai 60 %.

❖ **Analisis Deskriptif mengenai Outcome TOT Pembelajaran Al-Qur'an**

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden. Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara

keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari Kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur'an ini. Hasil kumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.7
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur'an

No	Interval skala	Jumlah	%	keterangan
1	0 s/d 5	0	0	Tidak Puas
2	6 s/d 10	1	10	Kurang Puas
3	11 s/d 15	6	60	Puas
4	16 s/d 20	1	10	Cukup Puas
5	20 s/d 25	2	20	Sangat Puas

Sumber Data: Ditolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan skor jawaban untuk setiap responden, 60% diantaranya berada pada interval 11 s/d 15. Interval 11 s/d 15 ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (*outcome*) untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa puas terhadap Kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur'an ini. Dengan mengambil jumlah mayoritas responden maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 70% (lihat tabel 2.1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai *outcome* dari kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur'an yaitu 70%.

Setelah nilai *outcome* kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\
 &= \frac{70}{100} \times 100\% \\
 &= 70\%
 \end{aligned}$$

Angka 70 % ini menunjukkan bahwa kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur'an ini efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur'an ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase mencapai 100% atau sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitasnya dengan jumlah persentase hanya mencapai 70 % atau efektif, artinya kegiatan ini dilaksanakan sangat efisien dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran, meskipun belum terlalu memuaskan sebab belum dicapai dengan persentase nilai maksimal 100%.

b) Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.132.240.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta, Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp.110.374.000,00 (Seratus Sepuluh Juta, Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah). Dengan demikian terdapat dana sebesar Rp. 21.866.000 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dari yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp 132.240.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Persentase nilai *input* dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Input} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\
 &= \frac{110.374.000}{132.240.000} \times 100\% \\
 &= 83,46\%
 \end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur *output* yakni keadaan/realisasi pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro KAPP maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas mencapai persentase angka 83,25%. Menurut penanggung jawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase *output* dari kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan ini mencapai angka 83,25%.

Setelah nilai *input* dan *output* diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\
 &= \frac{83,25}{83,46} \times 100\% \\
 &= 99,75\%
 \end{aligned}$$

Angka 99,75 % ini menunjukkan bahwa kegiatan dari Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan ini sangat efisien, dimana antara nilai input dengan outputnya berbanding sangat maksimal.

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini pengukuran nilai *outcome* diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait, sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai *outcome* dari kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan.

1. Publik/Pelanggan mengetahui kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.8
Distribusi pernyataan responden atas kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	1	10
2	Kurang mengetahui	5	50
3	Mengetahui	3	30
4	Cukup mengetahui	1	10
5	Sangat mengetahui	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini kurang diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50%.

2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfaat kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan, dan hasil distribusinya adalah

Tabel 5.9
Distribusi pernyataan responden atas kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	2	20
2	Kurang bermanfaat	0	0
3	Bermanfaat	2	20
4	Cukup bermanfaat	2	20
5	Sangat bermanfaat	4	40
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi publik/pelanggan dengan jumlah responden 4 orang atau mencapai 40 %.

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.10
Distribusi pernyataan responden atas kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	1	10
2	Kurang baik	3	30
3	Baik	1	10
4	Cukup baik	5	50
5	Sangat baik	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan cukup baik dengan jumlah responden 5 orang atau mencapai 50%.



4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan dengan kebutuhan/harapan mereka, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.11
Distribusi pernyataan responden atas kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	2	20
2	Kurang sesuai	3	30
3	Sesuai	4	40
4	Cukup sesuai	1	10
5	Sangat sesuai	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden 4 orang atau mencapai 40%.

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah dengan adanya kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.12
Distribusi pernyataan responden atas kegiatan Pembinaan
Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	0	0
2	Kurang meningkatkan	5	50
3	Meningkatkan	4	40
4	Cukup meningkatkan	1	10
5	Sangat meningkatkan	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden 5 orang atau mencapai 50%.

❖ **Analisis Deskriptif mengenai Outcome kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan**

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden. Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.13
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan

No	Interval skala	Jumlah	%	Keterangan
1	0 s/d 5	0	0	Tidak Puas
2	6 s/d 10	3	30	Kurang Puas
3	11 s/d 15	5	50	Puas
4	16 s/d 20	2	20	Cukup Puas
5	20 s/d 25	0	0	Sangat Puas

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan skor jawaban untuk setiap responden, 50% diantaranya berada pada interval 11 s/d 15. Interval 11 s/d 15 ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (*outcome*) untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa puas terhadap Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan ini. Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 70% (lihat tabel 2.1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai *outcome* dari kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan ini yaitu 70%.

Setelah nilai *Outcome* kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\
 &= \frac{70}{83,25} \times 100\% \\
 &= 84,08\%
 \end{aligned}$$

Angka 84,08 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan ini cukup efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase mencapai 100% atau sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitasnya dengan jumlah persentase mencapai 84,08% atau cukup efektif, artinya pelaksanaan kegiatan ini sangat efisien dan juga cukup efektif dan berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran dari yang telah direncanakan pemerintah, sebab hampir mencapai persentase nilai maksimal 100%.

c) Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.115.900.000,00 (Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp. 115.774.500,00 (Seratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah). Dengan demikian terdapat dana sebesar Rp.155.500 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dari yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp.115.900.000,00 (Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Persentase nilai *input* dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Input} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\ &= \frac{115.744.500}{115.900.000} \times 100\% \\ &= 99,87\%\end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur *output* yakni keadaan/realisasi pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro KAPP maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas mencapai persentase angka 100%. Menurut penanggungjawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase *otput* dari kegiatan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni ini mencapai angka 100%.

Setelah nilai *input* dan *output* diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{99,87} \times 100\% \\ &= 100,13\%\end{aligned}$$

Angka 100,13 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Pembinaan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni ini sudah sangat efisien, di mana antara nilai *input* dengan *outputnya* berbanding sangat maksimal.

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini nilai *outcome* terlebih dahulu harus ditentukan. Pengukuran *outcome* diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari kegiatan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai *outcome* dari kegiatan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni.

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan tentang Kegiatan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.14

Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pembinaan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni.

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	0	0
2	Kurang mengetahui	6	60
3	Mengetahui	2	20
4	Cukup mengetahui	1	10
5	Sangat mengetahui	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini kurang diketahui oleh publik/pelanggan, dengan jumlah responden sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %.

2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfaat Kegiatan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.15
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pembinaan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni.

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	0	0
2	Kurang bermanfaat	5	50
3	Bermanfaat	3	30
4	Cukup bermanfaat	2	20
5	Sangat bermanfaat	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %.

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan Kegiatan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.16
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pembinaan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni.

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	1	10
2	Kurang baik	6	60
3	Baik	1	10
4	Cukup baik	1	10
5	Sangat baik	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari dalam tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan kurang baik dengan jumlah responden sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %.

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni dengan kebutuhan/harapan mereka, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.17
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pembinaan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni.

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	2	20
2	Kurang sesuai	4	40
3	Sesuai	3	30
4	Cukup sesuai	0	0
5	Sangat sesuai	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %.

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah dengan adanya Kegiatan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.18
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pembinaan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni.

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	1	10
2	Kurang meningkatkan	3	30
3	Meningkatkan	4	40
4	Cukup meningkatkan	2	20
5	Sangat meningkatkan	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %.

❖ **Analisis Deskriptif mengenai Outcome Kegiatan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni**

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden. Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari Kegiatan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.19
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Pembinaan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni

No	Interval skala	Jumlah	%	Keterangan
1	0 s/d 5	0	0	Tidak Puas
2	6 s/d 10	4	40	Kurang Puas
3	11 s/d 15	3	30	Puas
4	16 s/d 20	3	30	Cukup Puas
5	20 s/d 25	0	0	Sangat Puas

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden berdasarkan hasil perhitungan skor, 40% diantaranya berada pada interval 6 s/d 10. Interval 6 s/d 10 menunjukkan bahwa responden merasa kurang puas dengan pelaksanaan kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (*outcome*) untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa kurang puas terhadap pembinaan di dalam bidang Kepemudaan ini. Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 60% (lihat tabel 2.1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai *outcome* dari kegiatan Kepemudaan, Olahraga, Pendidikan, Budaya dan Seni ini sebesar 60%.

Setelah nilai Outcome kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{60}{100} \times 100\% \\ &= 60\%\end{aligned}$$

Angka 60% ini menunjukkan bahwa kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga, Pendidikan, Budaya dan Seni ini kurang efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga, Pendidikan, Budaya dan Seni ini meskipun pelaksanaannya sudah sangat efisien dengan mencapai persentase 100,13% akan tetapi nilai efektivitasnya dengan jumlah persentase hanya mencapai 60 % atau kurang efektif, artinya kegiatan ini dilaksanakan sangat efisien tetapi kurang efektif atau kurang berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, karena masih sangat jauh dari persentase nilai maksimal 100%

2. Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan.

Berdasarkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) tahun anggaran 2004, maka Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan mempunyai 25 jenis kegiatan. Dari 25 kegiatan ini, semuanya dialokasikan dari Belanja Pelayanan Publik. Kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dari Belanja Publik ini secara umum menyangkut Belanja Operasional dan Pemeliharaan dan hanya sebagian kecil untuk kegiatan Belanja Modal.

Dalam pengukuran efisiensi dan efektivitas dari 25 kegiatan Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan ini dipilih 3 jenis kegiatan yang memiliki anggaran

besar. Berikut ini 3 jenis kegiatan dari Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan yang memiliki anggaran terbesar berdasarkan DASK Tahun Anggaran 2004 :

Tabel 5.20
Tiga Jenis Kegiatan Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Anggaran Terbesar

NO	UNIT KERJA/KEGIATAN	BELANJA PUBLIK	
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Operasional GERBANG EMAS	950.000.000	652.338.900
2	Pengembangan Usaha Baru BUMD	881,323,723	179.315.000
3	Peningkatan Produksi Daerah	296.600.000	295.523.800

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan LPJ Gubernur SulSel terhadap APBD Tahun Anggaran 2004

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

) Kegiatan Operasional GERBANG EMAS

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 950.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di mana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp. 652.338.900,00 (Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Dengan demikian terdapat dana sebesar Rp. 297.661.100,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) dari yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp. 950.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Persentase nilai *input* dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Input} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\
 &= \frac{652.338.900}{950.000.000} \times 100\% \\
 &= 68,67\%
 \end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur *output* yakni keadaan/realisasi pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas mencapai persentase angka 100%. Menurut penanggung jawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase *output* dari Kegiatan Operasional GERBANG EMAS ini mencapai angka 100%.

Setelah nilai *input* dan *output* diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{68,67} \times 100\% \\ &= 145,62\%\end{aligned}$$

Angka 145,62 % ini menunjukkan bahwa kegiatan dari Operasional GERBANG EMAS ini sudah sangat efisien, dimana antara nilai *input* dengan *outputnya* berbanding sangat maksimal.

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini nilai *outcome* terlebih dahulu harus ditentukan. Pengukuran *outcome* diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari Kegiatan

Operasional GERBANG EMAS ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai outcome dari Kegiatan Operasional GERBANG EMAS

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan tentang Kegiatan Operasional GERBANG EMAS, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.21
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Operasional GERBANG EMAS

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	2	20
2	Kurang mengetahui	1	10
3	Mengetahui	2	20
4	Cukup mengetahui	4	40
5	Sangat mengetahui	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan cukup diketahui dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40%.

2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfaat Kegiatan Operasional GERBANG EMAS, dan hasil distribusinya adalah:

Tabel 5.22
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan
Operasional GERBANG EMAS

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	3	30
2	Kurang bermanfaat	2	20
3	Bermanfaat	2	20
4	Cukup bermanfaat	2	20
5	Sangat bermanfaat	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai tidak bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %.

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan Kegiatan Operasional GERBANG EMAS, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.23
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Operasional GERBANG EMAS

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	2	20
2	Kurang baik	3	30
3	Baik	4	40
4	Cukup baik	1	10
5	Sangat baik	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan dengan baik dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %.

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Operasional GERBANG EMAS dengan kebutuhan/harapan mereka, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.24
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Operasional GERBANG EMAS

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	1	10
2	Kurang sesuai	4	40
3	Sesuai	2	20
4	Cukup sesuai	1	10
5	Sangat sesuai	2	20
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %.

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah dengan adanya Kegiatan Operasional GERBANG EMAS, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.25
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Operasional GERBANG EMAS

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	3	30
2	Kurang meningkatkan	3	30
3	Meningkatkan	3	30
4	Cukup meningkatkan	1	10
5	Sangat meningkatkan	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui tidak terdapat pendapat mayoritas dari responden. Terlihat bahwa penilaian responden menyebar pada 3 skala. Responden yang menyatakan bahwa kegiatan ini meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebanyak 3 orang atau 30 %, yang menyatakan kurang meningkatkan sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %, demikian juga dengan responden yang menyatakan tidak meningkatkan juga sebanyak 3 orang atau 30 %.

❖ Analisis Deskriptif mengenai *Outcome* kegiatan Operasional GERBANG EMAS

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden. Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari Kegiatan Operasional GERBANG EMAS ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.26
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Operasional
GERBANG EMAS

No	Interval skala	Jumlah	%	keterangan
1	0 s/d 5	0	10	Tidak Puas
2	6 s/d 10	4	40	Kurang Puas
3	11 s/d 15	3	30	Puas
4	16 s/d 20	3	30	Cukup Puas
5	21 s/d 25	0	0	Sangat Puas

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden berdasarkan hasil perhitungan skor, 40% diantaranya berada pada interval 6 s/d 10. Interval 6 s/d 10 menunjukkan bahwa responden merasa kurang puas dengan pelaksanaan kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (*outcome*) untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa kurang puas terhadap kegiatan Operasional GERBANG EMAS. Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 60% (lihat tabel 2.1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai *outcome* dari kegiatan Operasional GERBANG EMAS sebesar 60%.

Setelah nilai *Outcome* kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{60}{100} \times 100\% \\ &= 60\%\end{aligned}$$

Angka 60% ini menunjukkan bahwa kegiatan Operasional GERBANG EMAS ini kurang efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Operasional GERBANG EMAS memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase mencapai 145,62% atau sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitasnya dengan jumlah persentase hanya 60 % atau kurang efektif, artinya pelaksanaan kegiatan ini sudah sangat efisien akan tetapi kurang efektif atau kurang berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan ini karena masih sangat jauh dari persentase nilai maksimal 100%.

b) Pengembangan Usaha Baru BUMD

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 881.323.723,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp. 179.315.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah). Dengan demikian terdapat dana sebesar Rp.702.008.723,00 (Tujuh Ratus Dua Juta Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dari yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp. 881.323.723,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga

Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) Persentase nilai *input* dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Nilai Input} &= \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\% \\ &= \frac{179.315.000}{881.323.723} \times 100\% \\ &= 20,35\%\end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur *output* yakni keadaan/realisasi pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas mencapai persentase angka 81,67%. Menurut penanggungjawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase *output* dari Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD ini mencapai angka 81,67%.

Setelah nilai *input* dan *output* diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{81,67}{20,35} \times 100\% \\ &= 401,33\%\end{aligned}$$

Angka 401,33 % ini menunjukkan bahwa penggunaan dana dalam kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD ini sudah sangat efisien, dimana antara nilai

input dengan *outputnya* telah berbanding sangat maksimal. Tetapi perlu diketahui bahwa realisasi *output* disini sangat rendah.

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini nilai *outcome* terlebih dahulu harus ditentukan. Pengukuran *outcome* diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai *outcome* dari Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD.

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.27
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan
Pengembangan Usaha Baru BUMD

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	1	10
2	Kurang mengetahui	1	10
3	Mengetahui	5	50
4	Cukup mengetahui	1	10
5	Sangat mengetahui	2	20
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50%.

2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfaat Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.28
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	0	0
2	Kurang bermanfaat	0	0
3	Bermanfaat	6	60
4	Cukup bermanfaat	4	40
5	Sangat bermanfaat	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 6 orang atau mencapai 60%.

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.29
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	0	0
2	Kurang baik	2	20
3	Baik	6	60
4	Cukup baik	2	20
5	Sangat baik	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan



Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan baik dengan jumlah responden 6 orang atau mencapai 60 %.

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD dengan kebutuhan/harapan mereka dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.30
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	0	0
2	Kurang sesuai	1	10
3	Sesuai	2	20
4	Cukup sesuai	4	40
5	Sangat sesuai	3	30
: Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/responden dinilai cukup sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40%

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah dengan adanya Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.31
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan
Pengembangan Usaha Baru BUMD

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	0	0
2	Kurang meningkatkan	1	10
3	Meningkatkan	6	60
4	Cukup meningkatkan	2	20
5	Sangat meningkatkan	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %.

❖ **Analisis Deskriptif mengenai Outcome Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD**

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden. Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.32
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Pengembangan
Usaha Baru BUMD

No	Interval skala	Jumlah	%	Keterangan
1	0 s/d 5	0	0	Tidak Puas
2	6 s/d 10	0	0	Kurang Puas
3	11 s/d 15	3	30	Puas
4	16 s/d 20	7	70	Cukup Puas
5	21 s/d 25	0	0	Sangat Puas

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bahwa jawaban responden berdasarkan hasil perhitungan skor, 70 % diantaranya berada pada interval 16 s/d 20. Interval 16 s/d 20 menunjukkan bahwa responden merasa cukup puas dengan pelaksanaan kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (*outcome*) untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa cukup puas terhadap kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD ini. Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 80% (lihat tabel 2.1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai *outcome* dari kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD ini sebesar 80%.

Setelah nilai *Outcome* kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{80}{81,67} \times 100\% \\ &= 97,91\% \end{aligned}$$

Angka 97,91 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD sangat efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase mencapai 401,33 % atau bahkan sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitasnya juga dengan nilai persentase mencapai 97,91 % atau sangat efektif, artinya kegiatan ini telah dilaksanakan dengan sangat efisien dan juga telah sangat efektif atau sangat berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan ini dengan jumlah persentase mendekati nilai maksimal 100%.

c) Peningkatan Produksi Daerah

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 296.600.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp. 295.523.800,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah). Dengan demikian terdapat dana sebesar Rp.1.076.200,00 (Satu Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) dari yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp. 296.600.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Persentase nilai input dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Input} &= \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\% \\ &= \frac{295.523.800}{296.600.000} \times 100\% \\ &= 99,64\%\end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur *output* yakni keadaan/realisasi pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas mencapai persentase angka 100%. Menurut penanggungjawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase *otput* dari Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah ini mencapai angka 100%.

Setelah nilai *input* dan *output* diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{99,64} \times 100\% \\ &= 100,36\%\end{aligned}$$

Angka 100,36 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Peningkatan Produksi Daerah ini sudah sangat efisien, dimana antara nilai input dengan outputnya berbanding sangat maksimal.

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini nilai *outcome* terlebih dahulu harus ditentukan. Pengukuran *outcome* diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai *outcome* dari Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.33
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	0	0
2	Kurang mengetahui	4	40
3	Mengetahui	5	50
4	Cukup mengetahui	0	0
5	Sangat mengetahui	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan kegiatan ini diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %.

2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfaat dari Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.34
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan
Peningkatan Produksi Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	1	10
2	Kurang bermanfaat	5	50
3	Bermanfaat	1	10
4	Cukup bermanfaat	2	20
5	Sangat bermanfaat	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %.

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.35
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan
Peningkatan Produksi Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	2	20
2	Kurang baik	3	30
3	Baik	4	40
4	Cukup baik	1	10
5	Sangat baik	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan baik dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %.

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah dengan kebutuhan mereka, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.36
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	5	50
2	Kurang sesuai	0	0
3	Sesuai	2	20
4	Cukup sesuai	2	20
5	Sangat sesuai	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %.

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah dengan adanya Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah, dan hasil distribusinya adalah

Tabel 5.37
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan
Peningkatan Produksi Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	2	20
2	Kurang meningkatkan	1	10
3	Meningkatkan	5	50
4	Cukup meningkatkan	2	20
5	Sangat meningkatkan	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %.

❖ Analisis Deskriptif mengenai *Outcome* Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden. Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.38
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Peningkatan
Produksi Daerah

No	Interval skala	Jumlah	%	Keterangan
1	0 s/d 5	0	0	Tidak Puas
2	6 s/d 10	5	50	Kurang Puas
3	11 s/d 15	2	20	Puas
4	16 s/d 20	2	20	Cukup Puas
5	21 s/d 25	1	10	Sangat Puas

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden berdasarkan hasil perhitungan skor, 50 % diantaranya berada pada interval 6 s/d 10. Interval 6 s/d 10 menunjukkan bahwa responden merasa kurang puas dengan pelaksanaan kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (*outcome*) untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa kurang puas terhadap kegiatan Peningkatan Produksi Daerah ini. Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 60% (lihat tabel 2.1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai *outcome* dari kegiatan Peningkatan Produksi Daerah ini sebesar 60%.

Setelah nilai *outcome* kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\
 &= \frac{60}{100} \times 100\% \\
 &= 60\%
 \end{aligned}$$

Angka 60 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Peningkatan Produksi Daerah ini kurang efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Peningkatan Produksi Daerah ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase 100,36 % atau bahkan sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitas dengan jumlah persentase 60 % atau kurang efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ini meskipun sangat efisien dalam pelaksanaannya akan tetapi kurang efektif atau kurang berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan ini karena masih sangat jauh dari persentase nilai maksimal 100%.

3. Biro Dekonsentrasi

Berdasarkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) tahun anggaran 2004, maka Biro Dekonsentrasi mempunyai 12 jenis kegiatan yang dananya dialokasikan dari Belanja Pelayanan Publik. Dua Belas kegiatan yang dianggarkan dari Belanja Publik ini secara umum menyangkut Belanja Operasional dan Pemeliharaan dan hanya sebagian kecil untuk kegiatan Belanja Modal.

Dalam pengukuran efisiensi dan efektivitas dari 12 kegiatan Biro Dekonsentrasi ini dipilih 3 jenis kegiatan yang memiliki anggaran terbesar. Berikut ini 3 jenis kegiatan dari Biro Dekonsentrasi yang memiliki anggaran terbesar berdasarkan DASK Tahun Anggaran 2004 :

Tabel 5.39
Tiga Jenis Kegiatan Biro Dekonsentrasi yang Memiliki Anggaran Terbesar

NO	UNIT KERJA/KEGIATAN	BELANJA PUBLIK	
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Pengadaan Tanah Untuk Pemprov. Sulsel	6.000.000.000	5.808.266.000
2	Peningkatan Sarana Pemerintah Pemprov Sulsel	1.060.000.000	1.060.000.000
3	Penyediaan Prasarana Pendukung Pemprov Sulsel	600.000.000	597.752.000

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan LPJ Gubernur Sulsel terhadap APBD Tahun Anggaran 2004

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

- a) Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.808.266.000,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). Dengan demikian terdapat dana sebesar Rp.191.734.000 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dari yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah). Persentase nilai input dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Input} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\
 &= \frac{5.808.266.000}{6.000.000.000} \times 100\% \\
 &= 96,80\%
 \end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur *output* yakni keadaan pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di

lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro Dekonsentrasi maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas sebesar 100%. Menurut penanggungjawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase output dari Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini mencapai angka 100%.

Setelah nilai *input* dan *output* diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{96,80} \times 100\% \\ &= 103,30\%\end{aligned}$$

Angka 103,30 % ini menunjukkan bahwa kegiatan dari Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini sudah sangat efisien, dimana antara nilai input dengan outputnya berbanding sangat maksimal

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini terlebih dahulu nilai *outcome* harus ditentukan. Indikator pengukuran *outcome* adalah kepuasan masyarakat/pelanggan. Pengukuran *outcome* dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah

Provinsi. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai *outcome* dari Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi :

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.40
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Peningkatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	1	10
2	Kurang mengetahui	1	10
3	Mengetahui	4	40
4	Cukup mengetahui	1	10
5	Sangat mengetahui	3	30
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %.

2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfaat Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.41
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Pemerintah Provinsi

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	1	10
2	Kurang bermanfaat	6	60
3	bermanfaat	2	20
4	Cukup bermanfaat	1	10
5	Sangat bermanfaat	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %.

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.42
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Pemerintah Provinsi

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	0	0
2	Kurang baik	3	30
3	Baik	2	20
4	Cukup baik	4	40
5	Sangat baik	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan cukup baik dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %.

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi dengan kebutuhan/harapan mereka, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.43
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	1	10
2	Kurang sesuai	8	80
3	Sesuai	0	0
4	Cukup sesuai	1	10
5	Sangat sesuai	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 8 orang atau mencapai 80 %.

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah dengan adanya Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi, dan hasil distribusinya adalah

Tabel 5.44
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Pemerintah Provinsi

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	0	0
2	Kurang meningkatkan	1	10
3	Meningkatkan	5	50
4	Cukup meningkatkan	4	40
5	Sangat meningkatkan	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %.

❖ **Analisis Deskriptif mengenai Outcome Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi**

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden. Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.45
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi

No	Interval skala	Jumlah	%	Keterangan
1	0 s/d 5	0	0	Tidak Puas
2	6 s/d 10	2	20	Kurang Puas
3	11 s/d 15	5	50	Puas
4	16 s/d 20	1	10	Cukup Puas
5	21 s/d 25	1	10	Sangat Puas

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden berdasarkan hasil perhitungan skor, 50 % diantaranya berada pada interval 11 s/d 15. Interval 11 s/d 15 menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (*outcome*) untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa puas terhadap kegiatan ini. Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 70% (lihat tabel 2.1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai *outcome* dari kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini sebesar 70%.

Setelah nilai *outcome* kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\
 &= \frac{70}{100} \times 100\% \\
 &= 70\%
 \end{aligned}$$

Angka 70 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase 103,30 % atau bahkan sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitas dengan jumlah hanya mencapai persentase 70 % atau efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ini sudah sangat efisien dalam pelaksanaannya dan juga efektif atau berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan ini, meskipun belum terlalu memuaskan/berhasil sebab belum dicapai dengan persentase nilai maksimal 100%

b) Kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.060.000.000,00 (Satu Milyar Enam Puluh Juta Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.060.000.000,00 (Satu Milyar Enam Puluh Juta Rupiah). Dengan demikian seluruh dana yang dianggarkan dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp. 1.060.000.000,00 (Satu Milyar Enam Puluh Juta Rupiah). Persentase nilai input dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Input} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\ &= \frac{1.060.000.000}{1.060.000.000} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur *output* yakni keadaan pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di

lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro Dekonsentrasi maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas sebesar 100%. Menurut penanggungjawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase *output* dari Kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai angka 100%.

Setelah nilai *input* dan *output* diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Angka 100 % ini menunjukkan bahwa kegiatan dari Peningkatan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah sangat efisien, dimana antara nilai *input* dengan *outputnya* berbanding sangat maksimal

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini terlebih dahulu nilai *outcome* harus ditentukan. Indikator pengukuran *outcome* adalah kepuasan masyarakat/pelanggan. Pengukuran *outcome* dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari Kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan Untuk

Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai *outcome* dari Kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan :

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan Kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi , dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.46
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	1	10
2	Kurang mengetahui	2	20
3	Mengetahui	4	40
4	Cukup mengetahui	2	20
5	Sangat mengetahui	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %.

2. Tanggapan Publik/Pelanggan manfaat dari Kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi , dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.47
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan Sarana
Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	0	0
2	Kurang bermanfaat	2	20
3	Bermanfaat	8	80
4	Cukup bermanfaat	0	0
5	Sangat bermanfaat	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 8 orang atau mencapai 80 %.

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.48
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan Sarana
Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	0	0
2	Kurang baik	2	20
3	Baik	4	40
4	Cukup baik	2	20
5	Sangat baik	2	20
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan baik dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %.

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi dengan kebutuhan/harapan mereka, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.49
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	1	10
2	Kurang sesuai	4	40
3	Sesuai	3	30
4	Cukup sesuai	1	10
5	Sangat sesuai	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah dengan adanya Kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.50
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Peningkatan Sarana
Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi


Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	0	0
2	Kurang meningkatkan	1	10
3	Meningkatkan	5	50
4	Cukup meningkatkan	2	20
5	Sangat meningkatkan	2	20
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %

❖ **Analisis Deskriptif mengenai Outcome Kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi**

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden. Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari Kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 5.51
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi

No	Interval skala	Jumlah	%	Keterangan
1	0 s/d 5	0	0	Tidak Puas
2	6 s/d 10	1	10	Kurang Puas
3	11 s/d 15	3	30	Puas
4	16 s/d 20	6	60	Cukup Puas
5	21 s/d 25	0	0	Sangat Puas

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden berdasarkan hasil perhitungan skor, 60 % diantaranya berada pada interval 16 s/d 20. Interval 16 s/d 20 menunjukkan bahwa responden merasa cukup puas dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (*outcome*) untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa cukup puas terhadap kegiatan ini. Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 80% (lihat tabel 2.1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai *outcome* dari kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini sebesar 80%.

Setelah nilai *outcome* kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{80}{100} \times 100\% \\ &= 80\% \end{aligned}$$

Angka 80 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini cukup efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase 100% atau sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitas dengan jumlah persentase 80 % atau cukup efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ini sangat efisien dalam pelaksanaannya dan cukup efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan ini dengan mendekati persentase nilai maksimal 100%.

c) Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp. 597.752.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta, Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Dengan demikian terdapat dana sebesar Rp. 2.248.000,00 (Dua Juta, Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah). Persentase nilai input dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Input} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\
 &= \frac{597.752.000}{600.000.000} \times 100\% \\
 &= 99,63\%
 \end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur output yakni keadaan pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro Dekonsentrasi maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas sebesar 100%. Menurut penanggungjawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase output dari Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini mencapai angka 100%.

Setelah nilai *input* dan *output* diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{99,63} \times 100\% \\
 &= 100,37\%
 \end{aligned}$$

Angka 100,37 % ini menunjukkan bahwa kegiatan dari Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini sangat efisien, dimana antara nilai input dengan outputnya berbanding sangat maksimal

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini terlebih dahulu nilai *outcome* harus ditentukan. Indikator pengukuran *outcome* adalah kepuasan masyarakat/pelanggan. Pengukuran *outcome* dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai *outcome* dari Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini.

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.52
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	1	10
2	Kurang mengetahui	2	20
3	Mengetahui	2	20
4	Cukup mengetahui	4	40
5	Sangat mengetahui	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini dinilai cukup diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

2. Tanggapan Publik/Pelanggan manfaat dari Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.53
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	0	0
2	Kurang bermanfaat	4	40
3	Bermanfaat	3	30
4	Cukup bermanfaat	3	30
5	Sangat bermanfaat	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.54
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Penyediaan Prasarana
Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	0	0
2	Kurang baik	2	20
3	Baik	3	30
4	Cukup baik	3	30
5	Sangat baik	2	20
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan baik dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 % dan cukup baik dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi dengan kebutuhan/harapan mereka , dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.55
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Penyediaan Prasarana
Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	0	0
2	Kurang sesuai	5	50
3	Sesuai	4	40
4	Cukup sesuai	1	10
5	Sangat sesuai	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah dengan adanya Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.56
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	0	0
2	Kurang meningkatkan	1	10
3	Meningkatkan	5	50
4	Cukup meningkatkan	2	20
5	Sangat meningkatkan	2	20
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %

❖ **Analisis Deskriptif mengenai Outcome Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi**

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden.

Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.57
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi

No	Interval skala	Jumlah	%	Keterangan
1	0 s/d 5	0	0	Tidak Puas
2	6 s/d 10	2	20	Kurang Puas
3	11 s/d 15	2	20	Puas
4	16 s/d 20	6	60	Cukup Puas
5	21 s/d 25	0	0	Sangat Puas

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden berdasarkan hasil perhitungan skor, 60 % diantaranya berada pada interval 16 s/d 20. Interval 16 s/d 20 menunjukkan bahwa responden merasa cukup puas dengan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (*outcome*) untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa cukup puas terhadap kegiatan ini. Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 80% (lihat tabel 2.1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

nilai *outcome* dari kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi yaitu sebesar 80%.

Setelah nilai *outcome* kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut;

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{80}{100} \times 100\% \\ &= 80\%\end{aligned}$$

Angka 80 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Penyediaan Prasarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini cukup efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase 100% atau sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitas dengan jumlah persentase 80 % atau cukup efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sangat efisien dan cukup efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan ini dengan mendekati persentase nilai maksimal 100%.

4. Biro Otonomi Daerah.

Berdasarkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) tahun anggaran 2004, maka Biro Otonomi Daerah mempunyai 6 jenis kegiatan yang dananya dialokasikan dari Belanja Pelayanan Publik. Enam kegiatan yang dianggarkan dari Belanja Publik ini secara umum menyangkut Belanja Operasional dan Pemeliharaan dan hanya sebahagian kecil untuk kegiatan Belanja Modal.

Dalam pengukuran efisiensi dan efektivitas dari 6 kegiatan Biro Otonomi Daerah ini dipilih 3 jenis kegiatan yang memiliki anggaran terbesar. Berikut ini 3 jenis kegiatan dari Biro Otonomi Daerah yang memiliki anggaran terbesar berdasarkan DASK Tahun Anggaran 2004 :

Tabel 5.58
Tiga Jenis Kegiatan Biro Otonomi Daerah Yang Memiliki Anggaran Terbesar

NO	UNIT KERJA/KEGIATAN	BELANJA PUBLIK	
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Fasilitasi Penataan Daerah	547.676.000	515.945.000
2	Pelaks. Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemda	395.092.000	273.300.500
3	Fasilitasi Penguatan Penyelenggaraan Otoda	320.260.000	315.826.000

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan LPJ Gubernur SulSel terhadap APBD Tahun Anggaran 2004

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

a) Kegiatan Fasilitasi Penataan Daerah.

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 547.676.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta, Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp. 515.945.000,00 (Lima Ratus Lima Belas Juta, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Dengan demikian terdapat dana sebesar Rp. 31.731.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) dari yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp. 547.676.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah). Persentase nilai *input* dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Input} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\
 &= \frac{515.945.000}{547.676.000} \times 100\% \\
 &= 94,21\%
 \end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur *output* yakni keadaan pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro Otonomi Daerah maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas sebesar 100%. Menurut penanggungjawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase *output* dari Kegiatan Fasilitasi Penataan Daerah ini mencapai angka 100%.

Setelah nilai *input* dan *output* diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{94,21} \times 100\% \\
 &= 106,37\%
 \end{aligned}$$

Angka 106,37 % ini menunjukkan bahwa kegiatan dari Fasilitasi Penataan Daerah ini sudah sangat efisien, dimana antara nilai input dengan outputnya berbanding sangat maksimal.

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil)

dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini terlebih dahulu nilai *outcome* harus ditentukan. Indikator pengukuran *outcome* adalah kepuasan masyarakat/pelanggan. Pengukuran *outcome* dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari Kegiatan Fasilitasi Penataan Daerah ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai *outcome* dari Kegiatan Fasilitasi Penataan Daerah :

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan Kegiatan Yang Memfasilitasi Penataan Daerah, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.59
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Fasilitasi Penataan Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	1	10
2	Kurang mengetahui	4	40
3	mengetahui	2	20
4	Cukup mengetahui	3	30
5	Sangat mengetahui	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini kurang diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

2. Tanggapan Publik mengenai manfaat dari Kegiatan Yang Memfasilitasi Penataan Daerah, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.60
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Fasilitas Penataan Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	0	0
2	Kurang bermanfaat	4	40
3	Bermanfaat	4	40
4	Cukup bermanfaat	2	20
5	Sangat bermanfaat	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 % serta kegiatan ini bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %.

3. Tanggapan Publik mengenai proses pelaksanaan dari Kegiatan Yang Memfasilitasi Penataan Daerah, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.61
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Fasilitas Penataan Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	1	10
2	Kurang baik	1	10
3	Baik	5	50
4	Cukup baik	2	20
5	Sangat baik	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan baik dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %

4. Tanggapan Publik mengenai kesesuaian pelaksanaan dari Kegiatan Yang Memfasilitasi Penataan Daerah dengan kebutuhan mereka, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.62
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Fasilitas Penataan Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	3	30
2	Kurang sesuai	3	30
3	Sesuai	0	0
4	Cukup sesuai	3	30
5	Sangat sesuai	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat pendapat yang mayoritas dari responden. Dapat dilihat bahwa pendapat responden menyebar dengan pendapat bahwa kegiatan ini tidak sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %, dan pendapat bahwa kegiatan ini kurang sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %, serta pendapat yang menyatakan bahwa kegiatan ini cukup sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau juga mencapai 30 %.

5. Tanggapan Publik mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah dengan adanya Kegiatan Yang Memfasilitasi Penataan Daerah, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.63
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Fasilitasi Penataan Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	1	10
2	Kurang meningkatkan	0	0
3	Meningkatkan	6	60
4	Cukup meningkatkan	3	30
5	Sangat meningkatkan	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %.

❖ **Analisis Deskriptif mengenai Outcome Kegiatan Fasilitasi Penataan Daerah**

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden. Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari Kegiatan Yang Memfasilitasi Penataan Daerah ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{70}{100} \times 100\% \\ &= 70\% \end{aligned}$$

Angka 70 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Yang Memfasilitasi Penataan Daerah ini efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Yang Memfasilitasi Penataan Daerah ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase mencapai 106,37 % atau bahkan sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitasnya dengan jumlah persentase hanya mencapai 70% atau efektif, artinya kegiatan ini sangat efisien dalam pelaksanaannya dan efektif atau berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan ini, meskipun belum terlalu memuaskan sebab masih cukup jauh dari persentase nilai maksimal 100%.

b) Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 395.092.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp. 273.300.500,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ribu Ratus Lima Ratus Rupiah). Dengan demikian terdapat dana sebesar Rp. 121.791.500,00 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dari yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp. 395.092.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima, Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah). Persentase nilai *input* dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Input} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\ &= \frac{273.300.500}{395.092.000} \times 100\% \\ &= 69,17\% \end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur *output* yakni keadaan pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro Otonomi Daerah maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas sebesar 69,17%. Menurut penanggungjawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase *output* dari Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini mencapai angka 69,17%.

Setelah nilai *input* dan *output* diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{69,17}{69,17} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Angka 100 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini sudah sangat efisien, dimana antara nilai *input* dengan *outputnya* berbanding sangat maksimal



Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini terlebih dahulu nilai *outcome* harus ditentukan. Indikator pengukuran *outcome* adalah kepuasan masyarakat/pelanggan. Pengukuran *outcome* dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai *outcome* dari Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan tentang Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan hasil distribusinya adalah

Tabel 5.65
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	0	0
2	Kurang mengetahui	4	40
3	Mengetahui	2	20
4	Cukup mengetahui	3	30
5	Sangat mengetahui	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini kurang diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfaat dari Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan hasil distribusinya adalah

Tabel 5.66
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	1	10
2	Kurang bermanfaat	2	20
3	Bermanfaat	4	40
4	Cukup bermanfaat	2	20
5	Sangat bermanfaat	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan dari Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan hasil distribusinya adalah

Tabel 5.67
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	0	0
2	Kurang baik	0	0
3	Baik	6	60
4	Cukup baik	4	40
5	Sangat baik	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan baik dengan jumlah responden sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan kebutuhan/harapan mereka, dan hasil distribusinya adalah

Tabel 5.68
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	1	10
2	Kurang sesuai	5	50
3	Sesuai	2	20
4	Cukup sesuai	2	20
5	Sangat sesuai	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah dengan adanya Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan hasil distribusinya adalah

Tabel 5.69
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	0	0
2	Kurang meningkatkan	0	0
3	Meningkatkan	6	60
4	Cukup meningkatkan	3	30
5	Sangat meningkatkan	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %.

❖ **Analisis Deskriptif mengenai Outcome Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian

diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden. Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.70
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Interval skala	Jumlah	%	Keterangan
1	0 s/d 5	0	0	Tidak Puas
2	6 s/d 10	0	0	Kurang Puas
3	11 s/d 15	7	70	Puas
4	16 s/d 20	3	30	Cukup Puas
5	21 s/d 25	0	0	Sangat Puas

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan skor jawaban untuk setiap responden, 70% diantaranya berada pada interval 11 s/d 15. Interval 11 s/d 15 ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (*outcome*) untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa puas terhadap Pelaksanaan Kegiatan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 70% (lihat tabel 2.1). Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa nilai *outcome* dari Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini yaitu 70%.

Setelah nilai *outcome* kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut;

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{70}{100} \times 100\% \\ &= 70\%\end{aligned}$$

Angka 70 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase mencapai 100 % atau sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitasnya dengan jumlah persentase hanya mencapai 70 % atau efektif, artinya kegiatan ini dilaksanakan sangat efisien dan juga efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan ini, meskipun tidak memuaskan sebab belum dicapai dengan persentase nilai maksimal 100%

c) Kegiatan Fasilitasi Penguatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.320.260.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp.315.826.000,00 (Tiga Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah). Dengan demikian terdapat dana sebesar Rp. 4.434.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu

Rupiah) dari yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp 320.260.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Persentase nilai input dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:



$$\begin{aligned}\text{Nilai Input} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\ &= \frac{315.826.000}{320.260.000} \times 100\% \\ &= 98,62\%\end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur *output* yakni keadaan pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro Otonomi Daerah maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas sebesar 100%. Menurut penanggung jawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase *output* dari Kegiatan Fasilitasi Penguatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah ini mencapai angka 100%.

Setelah nilai *input* dan *output* diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{98,62} \times 100\% \\ &= 101,40\%\end{aligned}$$

Angka 101,40 % ini menunjukkan bahwa kegiatan dari Fasilitasi Penguatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah ini sudah sangat efisien, dimana antara nilai *input* dengan *outputnya* berbanding sangat maksimal.

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini terlebih dahulu nilai *outcome* harus ditentukan. Indikator pengukuran *outcome* adalah kepuasan masyarakat/pelanggan. Pengukuran *outcome* dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari Kegiatan Fasilitasi Penguatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai *outcome* dari Kegiatan Fasilitasi Penguatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah :

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan tentang Kegiatan Yang Memfasilitasi Penguatan Otonomi Daerah, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.71
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Fasilitasi Penguatan Otonomi Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	1	10
2	Kurang mengetahui	3	30
3	Mengetahui	1	10
4	Cukup mengetahui	4	40
5	Sangat mengetahui	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini cukup diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfaat dari Kegiatan Yang Memfasilitasi Penguatan Otonomi Daerah, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.72
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Fasilitas Penguatan Otonomi Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	1	10
2	Kurang bermanfaat	1	10
3	Bermanfaat	5	50
4	Cukup bermanfaat	3	30
5	Sangat bermanfaat	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan dari Kegiatan Yang Memfasilitasi Penguatan Otonomi Daerah, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.73
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Fasilitasi Penguatan Otonomi Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	0	0
2	Kurang baik	3	30
3	Baik	4	40
4	Cukup baik	3	30
5	Sangat baik	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan baik dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Yang Memfasilitasi Penguatan Otonomi Daerah dengan kebutuhan/harapan mereka, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.74
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Fasilitasi Penguatan Otonomi Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	3	30
2	Kurang sesuai	4	40
3	Sesuai	3	30
4	Cukup sesuai	0	0
5	Sangat sesuai	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah dengan adanya Kegiatan Yang Memfasilitasi Penguatan Otonomi Daerah, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.75
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Fasilitas Penguatan Otonomi Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	0	0
2	Kurang meningkatkan	1	10
3	Meningkatkan	5	50
4	Cukup meningkatkan	4	40
5	Sangat meningkatkan	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %

❖ Analisis Deskriptif mengenai *Outcome* Kegiatan Fasilitas Penguatan

Otonomi Daerah

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian

diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden. Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari Kegiatan Yang Memfasilitasi Penguatan Otonomi Daerah ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.76
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap
Kegiatan Fasilitasi Penguatan Otonomi Daerah

No	Interval skala	Jumlah	%	Keterangan
1	0 s/d 5	0	0	Tidak Puas
2	6 s/d 10	1	10	Kurang Puas
3	11 s/d 15	6	60	Puas
4	16 s/d 20	3	30	Cukup Puas
5	21 s/d 25	0	0	Sangat Puas

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan skor jawaban untuk setiap responden, 60% diantaranya berada pada interval 11 s/d 15. Interval 11 s/d 15 ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (*outcome*) untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa puas terhadap Kegiatan Yang Memfasilitasi Penguatan Otonomi Daerah ini. Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 70% (lihat tabel 2.1). Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa nilai *outcome* dari Kegiatan Yang Memfasilitasi Penguatan Otonomi Daerah ini 70%.

Setelah nilai *outcome* kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{70}{100} \times 100\% \\ &= 70\%\end{aligned}$$

Angka 70 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Yang Memfasilitasi Penguatan Otonomi Daerah ini efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Yang Memfasilitasi Penguatan Otonomi Daerah ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase mencapai 100 % atau sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitasnya dengan jumlah persentase hanya mencapai 70 % atau efektif, artinya kegiatan ini dilaksanakan sangat efisien dan juga efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan ini, meskipun belum memuaskan sebab belum dicapai dengan persentase nilai maksimal 100%.

5. Biro Humas dan Protokoler.

Berdasarkan DASK tahun anggaran 2004, maka Biro Hubungan Masyarakat dan Protokoler hanya mempunyai 2 jenis kegiatan yang dananya dialokasikan dari Belanja Pelayanan Publik. 2 kegiatan yang dianggarkan dari Belanja Publik ini semuanya menyangkut Belanja Operasional dan Pemeliharaan

Dalam pengukuran efisiensi dan efektivitas dari kegiatan Biro Humas dan Protokoler ini 2 jenis kegiatan yang dianggarkan diukur semuanya. Berikut kegiatan dari Biro Humas dan Protokoler berdasarkan DASK Tahun Anggaran 2004

Tabel 5.77
Anggaran Kegiatan Biro Humas dan Protokoler
Tahun 2004

NO	UNIT KERJA/KEGIATAN	BELANJA PUBLIK	
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Penerbitan/percetakan Majalah Sinergi	320.000.000	160.000.000
2	Pengadaan Jaringan Wireless Link	311.000.000	311.000.000

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan LPJ Gubernur SulSel terhadap APBD Tahun Anggaran 2004

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

a) Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.320.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp.160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah). Dengan demikian terdapat dana sebesar Rp. 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp 320.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). Persentase nilai *input* dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Input} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\
 &= \frac{160.000.000}{320.000.000} \times 100\% \\
 &= 50\%
 \end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur *output* yakni keadaan pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro Otonomi Daerah maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas sebesar 50%. Menurut penanggungjawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase *output* dari Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi ini mencapai angka 50%.

Setelah nilai *input* dan *output* diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{50}{50} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Angka 100 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi ini sudah sangat efisien, dimana antara nilai *input* dengan *outputnya* berbanding sangat maksimal.

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini terlebih dahulu nilai *outcome* harus ditentukan. Indikator pengukuran *outcome* adalah kepuasan masyarakat/pelanggan. Pengukuran *outcome* dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang

dijadikan sasaran dari Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai *outcome* dari Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi :

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan tentang Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.78
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	1	10
2	Kurang mengetahui	3	30
3	Mengetahui	4	40
4	Cukup mengetahui	0	0
5	Sangat mengetahui	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfaat dari Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.79
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	0	0
2	Kurang bermanfaat	3	30
3	Bermanfaat	2	20
4	Cukup bermanfaat	4	40
5	Sangat bermanfaat	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai cukup bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan dari Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.80
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	1	10
2	Kurang baik	4	40
3	Baik	4	40
4	Cukup baik	1	10
5	Sangat baik	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua pendapat yang mayoritas dari responden yaitu yang menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan

dinilai berjalan kurang baik dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %, dan yang menyatakan kegiatan ini berjalan baik juga dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %.

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi dengan kebutuhan/harapan mereka, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.81
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	2	20
2	Kurang sesuai	1	10
3	Sesuai	4	40
4	Cukup sesuai	3	30
5	Sangat sesuai	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah dengan adanya Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.82
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	0	0
2	Kurang meningkatkan	2	20
3	Meningkatkan	6	60
4	Cukup meningkatkan	2	20
5	Sangat meningkatkan	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %

❖ **Analisis Deskriptif mengenai Outcome Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi**

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden. Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.83
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap
Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi

No	Interval skala	Jumlah	%	Keterangan
1	0 s/d 5	0	0	Tidak Puas
2	6 s/d 10	2	20	Kurang Puas
3	11 s/d 15	3	30	Puas
4	16 s/d 20	5	50	Cukup Puas
5	21 s/d 25	0	0	Sangat Puas

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan skor jawaban untuk setiap responden, 50% diantaranya berada pada interval 16 s/d 20, hal ini menunjukkan bahwa responden merasa cukup puas terhadap kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (*outcome*) untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa puas terhadap kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi. Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 80% (lihat tabel 2.1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai *outcome* dari Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi ini 80%.

Setelah nilai *outcome* kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut;

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\
 &= \frac{80}{50} \times 100\% \\
 &= 160\%
 \end{aligned}$$

Angka 160 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi sudah sangat efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase mencapai 100 % atau sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitasnya bahkan dengan jumlah persentase mencapai 160 % atau sangat efektif, artinya kegiatan ini sudah berjalan sangat efisien dan juga sangat efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah.

b) Kegiatan Pengembangan Jaringan Siskomdagri Baru (Pengadaan *Wireless Link*)

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.311.000.000,00 (Tiga Ratus Sebelas Juta Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp.311.000.000,00 (Tiga Ratus Sebelas Juta Rupiah). Dengan demikian seluruh dana yang dianggarkan dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp 311.000.000,00 (Tiga Ratus Sebelas Juta Rupiah). Persentase nilai *input* dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Input} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\ &= \frac{311.000.000}{311.000.000} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur *output* yakni keadaan pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro Humas dan Protokoler maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas sebesar 100%. Menurut penanggungjawab teknis dari

kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase *output* dari Kegiatan Pengadaan *Wireless Link* ini mencapai angka 100%.

Setelah nilai input dan output diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Angka 100 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Pengadaan *Wireless Link* ini sudah sangat efisien, dimana antara nilai *input* dengan *outputnya* berbanding sangat maksimal.

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini terlebih dahulu nilai *outcome* harus ditentukan. Indikator, pengukuran *outcome* adalah kepuasan masyarakat/pelanggan. Pengukuran *outcome* dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari Kegiatan Pengadaan *Wireless Link* ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai *outcome* dari Kegiatan Pengadaan *Wireless Link* :

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan tentang Kegiatan Pengadaan *Wireless Link*, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.84
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan *Wireless Link*

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	2	20
2	Kurang mengetahui	2	20
3	Mengetahui	4	40
4	Cukup mengetahui	0	0
5	Sangat mengetahui	2	20
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfaat dari Kegiatan Pengadaan *Wireless Link*, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.85
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan *Wireless Link*

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	2	20
2	Kurang bermanfaat	4	40
3	Bermanfaat	3	30
4	Cukup bermanfaat	1	10
5	Sangat bermanfaat	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan dari Kegiatan Pengadaan *Wireless Link*, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.86
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan *Wireless Link*

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	0	0
2	Kurang baik	2	20
3	Baik	3	30
4	Cukup baik	3	30
5	Sangat baik	2	20
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua pendapat mayoritas dari responden yaitu yang menyatakan bahwa kegiatan ini berjalan baik dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %, dan yang berpendapat bahwa kegiatan ini berjalan cukup baik dengan jumlah responden juga 3 orang atau mencapai 30 %.

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Pengadaan *Wireless Link* dengan kebutuhan/harapan mereka, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.87
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan *Wireless Link*

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	0	0
2	Kurang sesuai	4	40
3	Sesuai	3	30
4	Cukup sesuai	2	20
5	Sangat sesuai	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah dengan adanya Kegiatan Pengadaan *Wireless Link*, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.88
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan *Wireless Link*

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	0	0
2	Kurang meningkatkan	0	0
3	Meningkatkan	4	40
4	Cukup meningkatkan	5	50
5	Sangat meningkatkan	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai cukup meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %

❖ **Analisis Deskriptif mengenai *Outcome* Kegiatan Pengadaan *Wireless Link***

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden. Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari Kegiatan Pengadaan *Wireless Link* ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.89
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Kegiatan Pengadaan *Wireless Link*

No	Interval skala	Jumlah	%	Keterangan
1	0 s/d 5	0	0	Tidak Puas
2	6 s/d 10	1	10	Kurang Puas
3	11 s/d 15	3	30	Puas
4	16 s/d 20	6	60	Cukup Puas
5	21 s/d 25	0	0	Sangat Puas

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan skor jawaban untuk setiap responden, 60% diantaranya berada pada interval 16 s/d 20. Interval 16 s/d 20 ini menunjukkan bahwa responden merasa cukup puas terhadap

kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (*outcome*) untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa cukup puas terhadap Kegiatan Pengadaan *Wireless Link* ini. Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 80% (lihat tabel 2.1) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai *outcome* dari Kegiatan Pengadaan *Wireless Link* ini 80%.

Setelah nilai *outcome* kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut;

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{80}{100} \times 100\% \\ &= 80\%\end{aligned}$$

Angka 80 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Pengadaan *Wireless Link* ini cukup efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Pengadaan *Wireless Link* ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase mencapai 100 % atau sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitasnya dengan jumlah persentase hanya mencapai 80 % atau cukup efektif, artinya kegiatan ini pelaksanaannya sudah sangat efisien dan pencapaian tujuan dan sasaran dari yang telah direncanakan pemerintah cukup berhasil sebab hampir mencapai persentase nilai maksimal 100%.

6. Biro Hukum dan Organisasi.

Berdasarkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) tahun anggaran 2004, maka Biro Hukum dan Organisasi mempunyai 15 jenis kegiatan yang dananya

dialokasikan dari Belanja Pelayanan Publik. Lima Belas kegiatan yang dianggarkan dari Belanja Publik ini secara umum menyangkut Belanja Operasional dan Pemeliharaan dan hanya sebahagian kecil (Dua kegiatan) untuk kegiatan Belanja Modal.

Dalam pengukuran efisiensi dan efektivitas dari 15 kegiatan Biro Hukum dan Organisasi ini dipilih 3 jenis kegiatan yang memiliki anggaran terbesar. Berikut ini 3 jenis kegiatan dari Biro Hukum dan Organisasi yang memiliki anggaran terbesar berdasarkan DASK Tahun Anggaran 2004

Tabel 5.90
Tiga Jenis Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi Yang Memiliki Anggaran Terbesar

NO	UNIT KERJA/KEGIATAN	BELANJA PUBLIK	
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Perancangan Perda-Perda Baru	555.200.000	552.749.000
2	Bintek/Kursus PPNS Pemerintahan Daerah	123.550.000	123.550.000
3	Penerbitan Informasi Peraturan Perundangan	98.480.000	98.080.000

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan LPJ Gubernur SulSel terhadap APBD Tahun Anggaran 2004

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

a) Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.555.200.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp.552.749.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Dengan demikian terdapat dana sebesar Rp. 2.451.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dari yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini

berupa dana Rp 555.200.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Persentase nilai *input* dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Input} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\ &= \frac{552.749.000}{555.200.000} \times 100\% \\ &= 99,56\%\end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur *output* yakni keadaan pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro Hukum dan Organisasi maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas sebesar 99,56%. Menurut penanggungjawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase *output* dari Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru ini mencapai angka 99,56%.

Setelah nilai *input* dan *output* diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{99,56}{99,56} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Angka 100 % ini menunjukkan bahwa kegiatan dari Perancangan Peraturan Daerah Baru ini sudah sangat efisien, dimana antara nilai *input* dengan *outputnya* berbanding sangat maksimal.

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini terlebih dahulu nilai *outcome* harus ditentukan. Indikator pengukuran *outcome* adalah kepuasan masyarakat/pelanggan. Pengukuran *outcome* dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai *outcome* dari Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru :

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan tentang Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.91
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	1	10
2	Kurang mengetahui	1	10
3	Mengetahui	3	30
4	Cukup mengetahui	5	50
5	Sangat mengetahui	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini cukup diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %

2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfaat dari Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru, dan hasil distribusinya adalah:

Tabel 5.92
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	1	10
2	Kurang bermanfaat	0	0
3	Bermanfaat	5	50
4	Cukup bermanfaat	3	30
5	Sangat bermanfaat	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan dari Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.93
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	1	10
2	Kurang baik	4	40
3	Baik	2	20
4	Cukup baik	2	20
5	Sangat baik	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan kurang baik dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %



4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru dengan kebutuhan/harapan mereka, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.94
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	0	0
2	Kurang sesuai	6	60
3	Sesuai	2	20
4	Cukup sesuai	2	20
5	Sangat sesuai	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah dengan adanya Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.95
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	2	20
2	Kurang meningkatkan	1	10
3	Meningkatkan	5	50
4	Cukup meningkatkan	1	10
5	Sangat meningkatkan	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %

❖ **Analisis Deskriptif mengenai Outcome Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru**

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden. Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.96
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap
Kegiatan Pengadaan Wireless Link

No	Interval skala	Jumlah	%	Keterangan
1	0 s/d 5	0	0	
2	6 s/d 10	1	10	Tidak Puas
3	11 s/d 15	5	50	Kurang Puas
4	16 s/d 20	3	30	Puas
5	21 s/d 25	1	10	Cukup Puas
				Sangat Puas

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan skor jawaban untuk setiap responden, 50% diantaranya berada pada interval 11 s/d 15. Interval 11 s/d 15 ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (*outcome*) untuk kegiatan ini dapat diketahui bahwa publik/pelanggan merasa puas terhadap kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru ini. Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 70% (lihat tabel 2.1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai *outcome* dari Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru ini 70%.

Setelah nilai *outcome* kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\
 &= \frac{70}{99,30} \times 100\% \\
 &= 70,30\%
 \end{aligned}$$

Angka 70,30 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru ini efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase mencapai 100 % atau sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitasnya dengan jumlah persentase hanya mencapai 70,30 % atau efektif, artinya kegiatan ini sudah berjalan sangat efisien, dan juga efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan ini, meskipun belum memuaskan, sebab masih kurang dari jumlah persentase nilai maksimal 100%.

b) Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.123.550.000,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta, Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp. 123.550.000,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta, Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dengan demikian seluruh dana yang dianggarkan dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp 123.550.000,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta, Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Persentase nilai *input* dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Input} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\ &= \frac{123.550.000}{123.550.000} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur *output* yakni keadaan pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini. Berdasarkan

data yang kami dapatkan dari Biro Hukum dan Organisasi maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas sebesar 100%. Menurut penanggungjawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase output dari Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah ini mencapai angka 100%.

Setelah nilai input dan output diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Angka 100 % ini menunjukkan bahwa kegiatan dari Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah ini sudah sangat efisien, dimana antara nilai *input* dengan *outputnya* berbanding sangat maksimal.

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini terlebih dahulu nilai *outcome* harus ditentukan. Indikator pengukuran *outcome* adalah kepuasan masyarakat/pelanggan. Pengukuran *outcome* dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah

ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai *outcome* dari Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah :

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan tentang Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.97
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	2	20
2	Kurang mengetahui	1	10
3	Mengetahui	1	10
4	Cukup mengetahui	0	0
5	Sangat mengetahui	6	60
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini sangat diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %

2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfaat dari Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.98
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	2	20
2	Kurang bermanfaat	1	10
3	Bermanfaat	0	0
4	Cukup bermanfaat	2	20
5	Sangat bermanfaat	5	50
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai sangat bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan dari Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.99
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	2	20
2	Kurang baik	2	20
3	Baik	1	10
4	Cukup baik	5	50
5	Sangat baik	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan cukup baik dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS² Pemerintah Daerah dengan kebutuhan/harapan mereka, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.100
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	1	10
2	Kurang sesuai	3	30
3	Sesuai	3	30
4	Cukup sesuai	3	30
5	Sangat sesuai	0	0
Jumlah :		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat pendapat yang mayoritas dari responden. Dapat dilihat bahwa pendapat responden menyebar dengan pendapat yang menyatakan bahwa kegiatan ini kurang sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %, dan pendapat bahwa kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %, serta pendapat yang menyatakann bahwa kegiatan ini cukup sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau juga mencapai 30 %.

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah dengan adanya Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.101
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	2	20
2	Kurang meningkatkan	2	20
3	Meningkatkan	2	20
4	Cukup meningkatkan	1	10
5	Sangat meningkatkan	3	30
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai sangat meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %

❖ **Analisis Deskriptif mengenai Outcome Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah**

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden. Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus

PPNS Pemerintah Daerah ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.102
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap
Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah

No	Interval skala	Jumlah	%	Keterangan
1	0 s/d 5	1	10	Tidak Puas
2	6 s/d 10	1	10	Kurang Puas
3	11 s/d 15	2	20	Puas
4	16 s/d 20	1	10	Cukup Puas
5	21 s/d 25	5	50	Sangat Puas

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan skor jawaban untuk setiap responden, 50% diantaranya berada pada interval 21 s/d 25. Interval 21 s/d 25 ini menunjukkan bahwa responden merasa sangat puas terhadap kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (*outcome*) untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa sangat puas terhadap kegiatan Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah ini. Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 100% (lihat tabel 2.1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai *outcome* dari Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah ini 100%.

Setelah nilai *outcome* kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut;

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Angka 100 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Kegiatan Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah ini sangat efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase mencapai 100 % atau sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitasnya dengan jumlah persentase juga mencapai 100 % atau sangat efektif, artinya kegiatan ini sudah berjalan sangat efisien, dan juga sangat efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan ini yang dicapai dengan sangat memuaskan.

c) Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.98.480.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta, Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp.98.080.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta, Delapan Puluh ribu Rupiah). Dengan demikian terdapat dana sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dari yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp 98.480.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta, Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Persentase nilai *input* dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Input} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\
 &= \frac{98.080.000}{98.480.000} \times 100\% \\
 &= 99,59\%
 \end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur *output* yakni keadaan pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro Hukum dan Organisasi maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas sebesar 100%. Menurut penanggungjawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase *output* dari Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan 100%.

Setelah nilai *input* dan *output* diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{99,59} \times 100\% \\
 &= 100,41\%
 \end{aligned}$$

Angka 100,41 % ini menunjukkan bahwa kegiatan dari Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan ini sudah sangat efisien, dimana antara nilai *input* dengan *outputnya* berbanding sangat maksimal..

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil)

dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini terlebih dahulu nilai *outcome* harus ditentukan. Indikator pengukuran *outcome* adalah kepuasan masyarakat/pelanggan. Pengukuran *outcome* dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai *outcome* dari Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan :

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan tentang Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.103
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	3	30
2	Kurang mengetahui	0	0
3	Mengetahui	2	20
4	Cukup mengetahui	4	40
5	Sangat mengetahui	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini cukup diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfaat dari Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.104
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	2	20
2	Kurang bermanfaat	1	10
3	Bermanfaat	3	30
4	Cukup bermanfaat	4	40
5	Sangat bermanfaat	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai cukup bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan dari Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.105
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	1	10
2	Kurang baik	2	20
3	Baik	3	30
4	Cukup baik	3	30
5	Sangat baik	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua pendapat yang mayoritas yakni responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai

berjalan baik dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 % dan juga pendapat yang mengatakan bahwa kegiatan ini berjalan cukup baik dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan dengan kebutuhan/harapan mereka, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.106
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	2	20
2	Kurang sesuai	4	40
3	Sesuai	3	30
4	Cukup sesuai	1	10
5	Sangat sesuai	0	0
Jumlah		10	100 %

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah dengan adanya Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.107
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	2	20
2	Kurang meningkatkan	3	30
3	Meningkatkan	3	30
4	Cukup meningkatkan	2	20
5	Sangat meningkatkan	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua pendapat yang mayoritas yakni responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 % dan juga pendapat yang mengatakan bahwa kegiatan ini meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %.

❖ Analisis Deskriptif mengenai *Outcome* Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden. Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari Kegiatan Penerbitan Informasi

Peraturan Perundang-Undangan ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.108
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap
Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan

No	Interval skala	Jumlah	%	Keterangan
1	0 s/d 5	1	10	Tidak Puas
2	6 s/d 10	1	10	Kurang Puas
3	11 s/d 15	5	50	Puas
4	16 s/d 20	3	30	Cukup Puas
5	21 s/d 25	0	0	Sangat Puas

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan skor jawaban untuk setiap responden, 50% diantaranya berada pada interval 11 s/d 15. Interval 11 s/d 15 ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (*outcome*) untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa puas terhadap Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan ini. Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 70% (lihat tabel 2.1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai *outcome* dari Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru ini 70%.

Setelah nilai *outcome* kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut;

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{70}{100} \times 100\% \\ &= 70\% \end{aligned}$$



Angka 70 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan ini efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase mencapai 100,41 % atau bahkan sangat efisien sebab terdapat penghematan anggaran sebesar 0,41%. Sedangkan nilai efektivitasnya dengan jumlah persentase hanya mencapai 70 % atau efektif, artinya kegiatan ini dilaksanakan sangat efisien dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan ini, meskipun belum terlalu memuaskan sebab belum dicapai dengan persentase nilai maksimal 100%.

7. Biro Perlengkapan.

Berdasarkan DASK tahun anggaran 2004, maka Biro Perlengkapan mempunyai 9 jenis kegiatan yang dananya dialokasikan dari Belanja Pelayanan Publik. Kesembilan kegiatan yang dianggarkan dari Belanja Publik ini secara umum menyangkut Belanja Operasional dan Pemeliharaan dan hanya sebahagian kecil (Tiga kegiatan) untuk kegiatan Belanja Modal.

Dalam pengukuran efisiensi dan efektivitas dari sembilan kegiatan Biro Perlengkapan ini dipilih tiga jenis kegiatan yang memiliki anggaran terbesar. Berikut ini 3 jenis kegiatan dari Biro Perlengkapan yang memiliki anggaran terbesar berdasarkan DASK Tahun Anggaran 2004 :

Tabel 5.109
Tiga Jenis Kegiatan Biro Perlengkapan Yang Memiliki Anggaran Terbesar

NO	UNIT KERJA/KEGIATAN	BELANJA PUBLIK	
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemprov Sulsel	8.072.600.000	7.681.644.500
2	Inventarisasi, Penertiban dan Pemberdayaan Asset	2.116.200.000	2.070.637.150
3	Pemetaan dan Persertikatan Tanah Pemprov Sulsel	173.100.000	60.995.650

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan LPJ Gubernur Sulsel terhadap APBD Tahun Anggaran 2004

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

- a) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.8.072.600.000,00 (Delapan Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp.7.681.644.500,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus). Dengan demikian terdapat dana sebesar Rp. 390.955.500,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dari yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp. 8.072.600.000,00 (Delapan Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Persentase nilai input dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Input} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\
 &= \frac{7.681.644.500}{8.072.600.000} \times 100\% \\
 &= 95,16\%
 \end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur *output* yakni keadaan pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di

lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro Perlengkapan maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas sebesar 100%. Menurut penanggung jawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase output dari Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 100%.

Setelah nilai *input* dan *output* diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{95,16} \times 100\% \\ &= 105,09\%\end{aligned}$$

Angka 105,09 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah sangat efisien, dimana antara nilai input dengan outputnya berbanding sangat maksimal.

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini terlebih dahulu nilai *outcome* harus ditentukan. Indikator pengukuran *outcome* adalah kepuasan masyarakat/pelanggan. Pengukuran *outcome* dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai *outcome* dari Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan :

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan tentang Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.110
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	0	0
2	Kurang mengetahui	0	0
3	Mengetahui	2	20
4	Cukup mengetahui	2	20
5	Sangat mengetahui	6	60
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini sangat diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %

2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfaat dari Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.111
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	1	10
2	Kurang bermanfaat	4	40
3	Bermanfaat	4	40
4	Cukup bermanfaat	0	0
5	Sangat bermanfaat	1	10
Jumlah		10	10

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua pendapat yang mayoritas yakni responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %, dan responden yang menyatakan bahwa kegiatan ini bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %.

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan dari Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan hasil distribusinya adalah

Tabel 5.112
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	0	0
2	Kurang baik	2	20
3	Baik	6	60
4	Cukup baik	2	20
5	Sangat baik	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan baik dengan jumlah responden sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kebutuhan/harapan mereka, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.113
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	2	20
2	Kurang sesuai	2	20
3	Sesuai	2	20
4	Cukup sesuai	1	10
5	Sangat sesuai	3	30
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah dengan adanya Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.114
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	0	0
2	Kurang meningkatkan	2	20
3	Meningkatkan	6	60
4	Cukup meningkatkan	1	10
5	Sangat meningkatkan	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai sangat meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %

❖ **Analisis Deskriptif mengenai Outcome Kegiatan Pengadaan Kendaraan**
Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian

diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden. Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.115
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Interval skala	Jumlah	%	Keterangan
1	0 s/d 5	1	10	Tidak Puas
2	6 s/d 10	2	20	Kurang Puas
3	11 s/d 15	5	50	Puas
4	16 s/d 20	2	20	Cukup Puas
5	21 s/d 25	0	0	Sangat Puas

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan skor jawaban untuk setiap responden, 50% diantaranya berada pada interval 11 s/d 15. Interval 11 s/d 15 ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (*outcome*) untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa puas terhadap kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini. Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 70% (lihat tabel 2.1).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai *outcome* dari Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini 70%.

Setelah nilai *outcome* kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{70}{100} \times 100\% \\ &= 70\%\end{aligned}$$

Angka 70 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase mencapai 105,09 % atau bahkan sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitasnya dengan jumlah persentase hanya mencapai 70 % atau efektif, artinya kegiatan ini sudah berjalan sangat efisien, dan juga efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan meskipun belum terlalu memuaskan sebab masih kurang dari jumlah persentase maksimal 100%.

b) Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengaman dan Pemberdayaan Asset.

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.166.200.000,00 (Dua Milyar, Seratus Enam Puluh Enam Juta, Dua Ratus Ribu Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp.2.070.637.150,00 (Dua Milyar, Tujuh Puluh Juta, Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu, Seratus Lima Puluh Rupiah). Dengan demikian terdapat dana sebesar Rp. 45.512.550,00 (Empat Puluh lima Juta,

Lima Ratus Dua Belas Ribu, Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) dari yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp. 2.166.200.000,00 (Dua Milyar, Seratus Enam Puluh Enam Juta, Dua Ratus Ribu Rupiah) Persentase nilai *input* dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Input} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\ &= \frac{2.070.637.150}{2.166.200.000} \times 100\% \\ &= 97,84\%\end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur *output* yakni keadaan pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro Perlengkapan maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas sebesar 97,84%. Menurut penanggungjawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase output dari Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengaman dan Pemberdayaan Asset ini sebesar 97,84%.

Setelah nilai *input* dan *output* diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{97,84}{97,84} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Angka 100 % ini menunjukkan bahwa kegiatan dari Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset ini sudah sangat efisien, dimana antara nilai *input* dengan *outputnya* berbanding sangat maksimal.

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini terlebih dahulu nilai *outcome* harus ditentukan. Indikator pengukuran *outcome* adalah kepuasan masyarakat/pelanggan. Pengukuran *outcome* dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai *outcome* dari Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset :

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan tentang Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.116
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	3	30
2	Kurang mengetahui	1	10
3	Mengetahui	3	30
4	Cukup mengetahui	3	30
5	Sangat mengetahui	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat pendapat yang mayoritas dari responden. Dapat dilihat bahwa pendapat responden menyebar dengan pendapat bahwa kegiatan ini tidak diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %, dan pendapat bahwa kegiatan ini diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %, serta pendapat yang menyatakan bahwa kegiatan ini cukup diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau juga mencapai 30 %.

2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfaat dari Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset, dan hasil distribusinya adalah:

Tabel 5.117
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	2	20
2	Kurang bermanfaat	2	20
3	Bermanfaat	5	50
4	Cukup bermanfaat	0	0
5	Sangat bermanfaat	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan dari Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset, dan hasil distribusinya adalah:

Tabel 5.118
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	1	10
2	Kurang baik	2	20
3	Baik	5	50
4	Cukup baik	2	20
5	Sangat baik	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan baik dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset dengan kebutuhan/harapan mereka, dan hasil distribusinya adalah:

Tabel 5.119
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Inventarisasi,
Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	4	40
2	Kurang sesuai	5	50
3	Sesuai	1	10
4	Cukup sesuai	0	0
5	Sangat sesuai	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah dengan adanya Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset, dan hasil distribusinya adalah:

Tabel 5.120
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Inventarisasi,
Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	1	10
2	Kurang meningkatkan	5	50
3	Meningkatkan	4	40
4	Cukup meningkatkan	0	0
5	Sangat meningkatkan	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %

❖ **Analisis Deskriptif mengenai Outcome Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset**

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden. Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.121
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap
Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset

No	Interval skala	Jumlah	%	Keterangan
1	0 s/d 5	1	10	Tidak Puas
2	6 s/d 10	2	20	Kurang Puas
3	11 s/d 15	5	50	Puas
4	16 s/d 20	2	20	Cukup Puas
5	21 s/d 25	0	0	Sangat Puas

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan skor jawaban untuk setiap responden, 50% diantaranya berada pada interval 11 s/d 15. Interval 11 s/d 15 ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (*outcome*) untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa puas terhadap Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset ini. Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 70% (lihat tabel 2.1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai *outcome* dari Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru ini yaitu 70%.

Setelah nilai *outcome* kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut;

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{70}{97,84} \times 100\% \\ &= 71,55\%\end{aligned}$$

Angka 71,55 % ini menunjukkan bahwa Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset ini efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase mencapai 100 % atau sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitasnya dengan jumlah persentase hanya mencapai 71,55 % atau efektif, artinya kegiatan ini sudah berjalan sangat efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah direncanakan meskipun belum terlalu memuaskan sebab masih kurang dari jumlah persentase maksimal 100 %.

c) Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.



Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.173.100.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta, Seratus Ribu Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp.60.995.650,00 (Enam Puluh Juta, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu, emam Ratus Lima Puluh Rupiah). Dengan demikian terdapat dana sebesar Rp.112.104.350,00 (Seratus Dua Belas Juta, Seratus Empat Ribu, Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) dari yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp. 173.100.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta, Seratus Ribu Rupiah) Persentase nilai *input* dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Input} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\ &= \frac{60.995.650}{173.100.000} \times 100\% \\ &= 35,00\%\end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai *output* (keluaran) yang dijadikan indikator untuk mengukur *output* yakni keadaan pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai *output* dari kegiatan ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro Perlengkapan maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas sebesar 100%. Menurut penanggungjawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan

data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase *output* dari Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini sebesar 100%.

Setelah nilai input dan output diketahui maka selanjutnya pengukuran efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{35,00} \times 100\% \\ &= 285,71\%\end{aligned}$$

Angka 285,71 % ini menunjukkan bahwa kegiatan dari Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah sangat efisien, dimana antara nilai *input* dengan *outputnya* berbanding sangat maksimal.

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran) yang ada. Dalam penelitian ini terlebih dahulu nilai *outcome* harus ditentukan. Indikator pengukuran *outcome* adalah kepuasan masyarakat/pelanggan. Pengukuran *outcome* dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai *outcome* dari Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan tentang Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.122
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui	1	10
2	Kurang mengetahui	2	20
3	Mengetahui	2	20
4	Cukup mengetahui	4	40
5	Sangat mengetahui	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini cukup diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfaat dari Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.123
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak bermanfaat	2	20
2	Kurang bermanfaat	0	0
3	Bermanfaat	4	40
4	Cukup bermanfaat	4	40
5	Sangat bermanfaat	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua pendapat mayoritas responden, yakni yang menyatakan bahwa kegiatan ini bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 % serta yang menyatakan bahwa kegiatan ini cukup bermanfaat juga dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40%.

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan dari Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.124
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	1	10
2	Kurang baik	0	0
3	Baik	7	70
4	Cukup baik	2	20
5	Sangat baik	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan baik dengan jumlah responden sebanyak 7 orang atau mencapai 70 %

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kebutuhan/harapan mereka, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.125
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	1	10
2	Kurang sesuai	2	20
3	Sesuai	4	40
4	Cukup sesuai	3	30
5	Sangat sesuai	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah dengan adanya Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.126
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Skala	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak meningkatkan	2	20
2	Kurang meningkatkan	0	0
3	Meningkatkan	6	60
4	Cukup meningkatkan	2	20
5	Sangat meningkatkan	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %

❖ **Analisis Deskriptif mengenai Outcome Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden.

Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara keseluruhan sebagai pengukuran *outcome* dari Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 5.127
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

No	Interval skala	Jumlah	%	Keterangan
1	0 s/d 5	1	10	Tidak Puas
2	6 s/d 10	1	10	Kurang Puas
3	11 s/d 15	3	30	Puas
4	16 s/d 20	4	40	Cukup Puas
5	21 s/d 25	0	0	Sangat Puas

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

: Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan skor jawaban untuk setiap responden, 50% diantaranya berada pada interval 16 s/d 20. Interval 16 s/d 20 ini menunjukkan bahwa responden merasa cukup puas terhadap kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (*outcome*) untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa cukup puas terhadap Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini. Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 70% (lihat tabel 2.1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai *outcome* dari

Kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini yaitu 80%.

Setelah nilai *outcome* kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut;

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{80}{100} \times 100\% \\ &= 80\%\end{aligned}$$

Angka 80 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini cukup efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase mencapai 285,71 %. Sedangkan nilai efektivitasnya dengan jumlah persentase mencapai 80 % atau cukup efektif, artinya kegiatan ini sangat efisien dalam pelaksanaannya dan juga cukup efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan ini, meskipun masih dapat ditingkatkan, sebab belum mencapai persentase nilai maksimal 100%.

5.2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Data.

Mengenai validitas dan reliabilitas atas data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisisioner untuk mengetahui *outcome* di atas, telah dilakukan uji validitas data dan uji reliabilitas data dengan menggunakan program SPSS 11.5 b for windows dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach's*. Berikut ini akan disajikan data hasil pengujian data kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini.

A. Uji Validitas

Dasar pengambilan keputusan valid tidaknya butir-butir pertanyaan dalam kuesioner adalah:

- Koefisien r hitung (koefisien korelasi) harus positif dan lebih besar dari r tabel (*Product Moment Person*).
- Nilai r hitung untuk masing-masing butir pertanyaan bisa dilihat langsung pada *output* uji reliabilitas dan validitas pada kolom *correct item-total correlation* yang diperoleh dari hasil uji dua arah dengan α 5% (interval kepercayaan 95%).
- Besarnya nilai r tabel diperoleh dari tabel Daftar nilai Kritis Pearson Produk Momen dengan menentukan :

$$Df (\text{degree of Freedom}) = n - 2 = 15 - 2 = 13$$

Sehingga pada α sebesar 0,05 diperoleh r tabel sebesar 0,44.

Adapun perhitungan r hitung tiap pertanyaan untuk tiap pertanyaan perkegiatan dapat dilihat pada lampiran 4 dan disimpulkan dalam tabel-tabel bawah ini:

- Kegiatan Pembelajaran TOT Al-Qur'an.

Tabel 5.128
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Pembelajaran TOT Al-Qur'an

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.8866	valid
2	0.6486	valid
3	0.9395	valid
4	0.4995	valid
5	0.1364	valid

Sumber : diolah sendiri

b. Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni.

Tabel 5.129

Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.9320	valid
2	0.9260	valid
3	0.8198	valid
4	0.7606	valid
5	0.6175	valid

Sumber : diolah sendiri

c. Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan.

Tabel 5.130

Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.8292	valid
2	0.1944	valid
3	0.0546	valid
4	0.6426	valid
5	0.8775	valid

Sumber : diolah sendiri

d. Kegiatan Operasional Gerbang Emas.

Tabel 5.131

Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Operasional Gerbang Emas

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.0959	valid
2	0.5168	valid
3	0.8609	valid
4	0.4573	valid
5	0.7702	valid

Sumber : diolah sendiri

e. Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD

Tabel 5.132
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.7939	valid
2	0.9123	valid
3	0.8775	valid
4	0.2668	valid
5	0.9703	valid

Sumber : diolah sendiri

f. Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah.

Tabel 5.133
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Peningkatan Produksi Daerah

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.4487	valid
2	0.2726	valid
3	0.9959	valid
4	0.3243	valid
5	0.5228	valid

Sumber : diolah sendiri

g. Kegiatan Pengadaan Tanah Pemprov Selsel

Tabel 5.134
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Pengadaan Tanah Pemprov Selsel

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.6320	valid
2	0.7409	valid
3	0.6093	valid
4	0.4449	valid
5	0.0535	valid

Sumber : diolah sendiri

h. Kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan.

Tabel 5.135
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.9320	valid
2	0.9260	valid
3	0.8198	valid
4	0.7606	valid
5	0.6175	valid

Sumber : diolah sendiri

i. Kegiatan Pengadaan Prasarana Pemerintahan.

Tabel 5.136
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Pengadaan Prasarana Pemerintahan

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.4730	valid
2	0.8468	valid
3	0.7877	valid
4	0.6183	valid
5	0.5040	valid

Sumber : diolah sendiri

j. Kegiatan Fasilitas Penguatan Otoda.

Tabel 5.137
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Fasilitas Penguatan Otoda

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.2195	valid
2	0.7939	valid
3	0.9435	valid
4	0.1615	valid
5	0.7833	valid

Sumber : diolah sendiri

k. Kegiatan Sistem Pelaporan Pemerintah Daerah

Tabel 5.138
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Sistem Pelaporan Pemerintah Daerah

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.4045	valid
2	0.9540	valid
3	0.7423	valid
4	0.3051	valid
5	0.7116	valid

Sumber : diolah sendiri

l. Kegiatan Fasilitas Penataan Daerah.

Tabel 5.139
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Fasilitas Penataan Daerah

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.5430	valid
2	0.7556	valid
3	0.5718	valid
4	0.3634	valid
5	0.4788	valid

Sumber : diolah sendiri

m. Kegiatan Penerbitan majalah Sinergi.

Tabel 5.140
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Penerbitan Majalah Sinergi

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.6217	valid
2	0.3638	valid
3	0.7379	valid
4	0.6156	valid
5	0.9073	valid

Sumber : diolah sendiri

n. Kegiatan Pengadaan Jaringan Wireless Link

Tabel 5.141
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Pengadaan Jaringan Wireless Link

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.5440	valid
2	0.6342	valid
3	0.7289	valid
4	0.5437	valid
5	0.8880	valid

Sumber : diolah sendiri

o. Kegiatan Perancangan Perda-Perda Baru

Tabel 5.142
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Perancangan Perda-Perda Baru

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.4583	valid
2	0.4264	valid
3	0.3892	valid
4	0.1667	valid
5	0.3144	valid

Sumber : diolah sendiri

p. Kegiatan Bintek/Kursus PPNS Pemerintah Daerah.

Tabel 5.143
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Bintek/Kursus PPNS Pemerintah Daerah

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.2279	valid
2	0.6682	valid
3	0.6305	valid
4	0.8504	valid
5	0.1443	valid

Sumber : diolah sendiri

g. Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 5.144
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.2236	valid
2	0.7937	valid
3	0.8437	valid
4	0.2935	valid
5	0.7664	valid

Sumber : diolah sendiri

r. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur

Tabel 5.145
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.2987	valid
2	0.5051	valid
3	0.6163	valid
4	0.1688	valid
5	0.8674	valid

Sumber : diolah sendiri

s. Kegiatan Inventarisasi dan Pemberdayaan Asset Pemprov

Tabel 5.146
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Inventasasi dan Pemberdayaan Asset

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.2440	valid
2	0.6960	valid
3	0.6378	valid
4	0.2665	valid
5	0.7600	valid

Sumber : diolah sendiri

t. Kegiatan Pemetaan Tanah Pemrov Sulsel

Tabel 5.147
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Pemetaan Tanah Pemrov
Sulsel

nomor pertanyaan	r hitung	kevalidan
1	0.3749	valid
2	0.8415	valid
3	0.8836	valid
4	0.6671	valid
5	0.8851	valid

Sumber : diolah sendiri



B. Uji Reliabilitas

Dari hasil perhitungan validitas jawaban responden untuk tiap kegiatan, maka selanjutnya dilakukan perhitungan reliabilitas dari tiap kegiatan. Adapun keputusan *reliable* diambil dari tiap-tiap kegiatan sehingga data dikatakan *reliable* jika koefisien reliabilitasnya (koefisien *alpha* pada *output* reliabilitas masing-masing kegiatan) sebesar **0,05** atau lebih. Pada lampiran 4 dapat dilihat koefisien reliabilitas masing-masing kegiatan, dan berikut ini merupakan kesimpulannya :

- a. Kegiatan Pelatihan TOT Al-Qur'an memiliki *alpha* sebesar **0.7929** yang lebih besar dari **0.05** sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.
- b. Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga, Pendidikan, Budaya dan seni memiliki *alpha* sebesar **0.9232** yang lebih besar dari **0.05** sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.
- c. Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan memiliki *alpha* sebesar **0.3846** yang lebih besar dari **0.05** sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.

- d. Kegiatan Operasional Gerbang Emas memiliki *alpha* sebesar 0.6374 yang lebih besar dari 0.05 sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.
- e. Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD memiliki *alpha* sebesar 0.8989 yang lebih besar dari 0.05 sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.
- f. Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah memiliki *alpha* sebesar 0.3405 yang lebih besar dari 0.05 sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.
- g. Kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Propinsi memiliki *alpha* sebesar 0.4684 yang lebih besar dari 0.05 sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.
- h. Kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan memiliki *alpha* sebesar 0.9232 yang lebih besar dari 0.05 sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.
- i. Kegiatan Pengadaan Prasarana Pemerintahan memiliki *alpha* sebesar 0.8194 yang lebih besar dari 0.05 sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.
- j. Kegiatan Fasilitasi Penguatan Otoda memiliki *alpha* sebesar 0.7632 yang lebih besar dari 0.05 sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.

- k. Kegiatan Sistem Pelaporan Pemerintah Daerah memiliki *alpha* sebesar 0.7889 yang lebih besar dari 0.05 sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.
- l. Kegiatan Fasilitasi Penataan Daerah memiliki *alpha* sebesar 0.6162 yang lebih besar dari 0.05 sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.
- m. Kegiatan Pengadaan Majalah Sinergi memiliki *alpha* sebesar 0.8333 yang lebih besar dari 0.05 sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.
- n. Kegiatan Pengadaan Jaringan Wireless Link memiliki *alpha* sebesar 0.8449 yang lebih besar dari 0.05 sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.
- o. Kegiatan Perancangan Perda-Perda Baru memiliki *alpha* sebesar 0.5699 yang lebih besar dari 0.05 sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.
- p. Kegiatan Bintek PPNS Pemda memiliki *alpha* sebesar 0.4286 yang lebih besar dari 0.05 sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.
- q. Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan memiliki *alpha* sebesar 0.7787 yang lebih besar dari 0.05 sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.

- r. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur memiliki *alpha* sebesar **0.6024** yang lebih besar dari **0.05** sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.
- s. Kegiatan Inventarisasi dan Pemberdayaan Asset Pemprov memiliki *alpha* sebesar **0.7398** yang lebih besar dari **0.05** sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.
- t. Kegiatan Pemetaan Tanah Pemprov memiliki *alpha* sebesar **0.8917** yang lebih besar dari **0.05** sehingga data dianggap *reliable* untuk mengungkapkan masalah yang diajukan

5.3. Analisis Deskriptif Kinerja Keuangan Belanja Publik Setda Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Pendekatan *Value For Money*.

Terdapat 2 (Dua) unsur penilaian dalam pengukuran kinerja Keuangan Belanja Publik dari instansi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dianalisa dalam pengukuran *Value For Money* ini, yakni Pengukuran Efisiensi dan Pengukuran Efektivitas. Berikut kita lihat data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian;

Tabel 5.148
Pengukuran Value For Money terhadap kegiatan Belanja Operasional dan
Pemeliharaan dari Belanja Publik Tahun Anggaran 2004

Biro/Kegiatan	Nilai Efisiensi (%)	Nilai Efektivitas (%)
Biro KAPP		
Pembelajaran TOT Al-Qur'an	100	70
Pembinaan kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan	99,75	84,08
Pembinaan pemuda, olahraga, pendidikan, budaya, dan seni.	100,13	60
Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan		
Operasional GERBANG EMAS	145,62	60
Pengembangan Usaha Baru BUMD	401,33	97,91
Peningkatan Produksi Daerah	100,36	60
Biro Dekonsentrasi		
Pengadaan Tanah u/ Pemprov. Sulsel	103,30	70
Peningkatan Sarana Pemerintahan Prov. Sulsel	100	80
Pengadaan Prasarana u/ Pemprov. Sulsel	100,37	80
Biro Otonomi Daerah		
Fasilitasi Penguatan Otonomi Daerah	106,37	70
Sistem Pelaporan Pemerintahan Daerah	100	70
Fasilitasi Penataan Daerah	101,40	70
Biro Humas dan Protokoler		
Penerbitan Majalah Sinergi	100	160
Pengadaan Jaringan Wireless Link	100	80
Biro Hukum dan Organisasi		
Perancangan Peraturan Daerah Baru	100	70,30
Bintek/Kursus PPNS Pemerintah Daerah	100	100
Penerbitan Informasi Perundang Undangan	100,41	70

Biro Perlengkapan

18	Pengadaan Kendaraan Aparatur		
19	Inventarisasi, dan Pemberdayaan Asset	105,09	70
20	Pemetaan Tanah Milik Pemprov. Sulsel	100	71,55
		285,71	80

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel hasil penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa program-program kerja yang dilaksanakan oleh instansi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dievaluasi nilai efisiensi dan efektivitasnya (*Value For Money*) melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh biro-biro pemerintahan dalam lingkup instansi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini dapat dilihat hasil evaluasi *Value For Money*-nya per biro dan kegiatannya.

Biro Kesejahteraan, Agama, dan Pemberdayaan Perempuan (KAPP) dengan kegiatan TOT pembelajaran Al-Qur'an memiliki nilai efisiensi sebesar 100% atau sangat efisien, dan nilai efektivitas sebesar 70% atau efektif. Selanjutnya kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan memiliki nilai efisiensi 99,75% atau sangat efisien dan nilai efektivitas 70% atau efektif. Selanjutnya kegiatan Pembinaan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya dan Seni memiliki nilai efisiensi 100,13% atau sangat efektif dan nilai efektifitas 60% atau kurang efektif.

Biro Ekonomi dan Pembangunan dengan kegiatan Operasional Gerbang Emas memiliki nilai efisiensi 145,62% atau sangat efisien, dan nilai efektifitas sebesar 60% atau kurang efektif. Selanjutnya kegiatan Pengembangan Usaha Baru Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki nilai efisiensi 401,33% atau sangat efisien dan nilai efektivitasnya sebesar 97,91% atau sangat efektif. Selanjutnya kegiatan Peningkatan

Produksi Daerah memiliki nilai efisiensi 100,36% atau sangat efisien dan nilai efektivitasnya 60% atau kurang efektif.

Biro Bina Dekonsentrasi dengan kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemprov memiliki nilai efisiensi 103,36% atau sangat efisien dan nilai efektivitasnya 70% atau efektif. Selanjutnya kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan memiliki nilai efisiensi 100% dan nilai efektivitasnya 80% atau cukup efektif. Selanjutnya kegiatan Pengadaan Prasarana Pemerintahan memiliki nilai efisiensi 100,37% dan nilai efektivitasnya 80% atau cukup efektif.

Biro Bina Otonomi Daerah dengan kegiatan yang memfasilitasi Penguatan Otonomi Daerah memiliki nilai efisiensi 106,37% atau sangat efisien dan nilai efektivitasnya 70% atau efektif. Selanjutnya kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pemerintah Daerah memiliki nilai efisiensi 100% atau sangat efisien dan nilai efektivitasnya 70% atau efektif. Selanjutnya kegiatan yang memfasilitasi Penataan Daerah memiliki nilai efisiensi 101,40% atau sangat efisien dan nilai efektivitasnya 70% atau efektif.

Biro Humas dan Protokoler dengan kegiatan Penerbitan/Pencetakan Majalah Sinergi memiliki nilai efisiensi 100% atau sangat efisien dan nilai efektivitasnya 160% atau sangat efektif. Selanjutnya kegiatan Pengembangan Jaringan Wireless Link memiliki nilai efisiensi 100% atau sangat efisien dan nilai efektivitasnya 80% atau cukup efektif.

Biro Hukum dan Organisasi dengan kegiatan Perancangan Peraturan-Peraturan Daerah Baru memiliki nilai efisiensi 100% atau sangat efisien dan nilai efektivitasnya 70,30% atau efektif. Selanjutnya kegiatan Bimbingan Teknis dan

Kursus PPNS memiliki nilai efisiensi 100% atau sangat efisien dan nilai efektivitasnya 100% atau sangat efektif. Selanjutnya kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan memiliki nilai efisiensi 100,41% dan nilai efektivitasnya 70% atau efektif.

Biro Perlengkapan dengan kegiatan Pengadaan Kendaraan Aparatur Untuk Kepentingan Pemprov memiliki nilai efisiensi 105,09% dan nilai efektivitasnya 70% atau efektif. Selanjutnya kegiatan Inventarisasi dan Pemberdayaan Asset memiliki nilai efisiensi 100% atau sangat efisien dan nilai efektivitasnya 71,55% atau efektif. Selanjutnya kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemprov memiliki nilai efisiensi 285,71% dan nilai efektivitasnya 80% atau cukup efektif

Berdasarkan hasil gambaran penelitian di atas ini, maka secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program kegiatan di bawah tanggung jawab instansi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang sumber alokasinya dari Belanja Publik, khususnya dari alokasi Belanja Operasional dan Pemeliharaan dapat dikatakan sudah sangat efisien dimana persentase rasio efisiensi rata-rata mencapai 100% bahkan banyak yang melampau rasio di atas 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran pada setiap kegiatan sudah dapat dimaksimalkan untuk memenuhi rencana pencapaian fisik (*output*) di lapangan, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan tidak dapat memenuhi realisasi fisik (*output*) dengan jumlah persentase maksimal 100%.

Sedangkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap kegiatan ini terlihat bahwa rasio efektivitas rata-rata belum mencapai persentase maksimal 100%, dimana kegiatan yang rasio efektivitasnya antara 90% s/d 100% (sangat efektif)

hanya 3 kegiatan, antara 80% s/d 99% (cukup efektif) hanya 5 kegiatan, antara 70% s/d 89% (efektif) ada 9 kegiatan, antara 60% s/d 69% (kurang efektif) terdapat 3 kegiatan, dan tidak ada kegiatan yang rasio efektivitasnya di bawah 59% (tidak efektif). Hal ini menggambarkan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan pemerintah yang terealisasi secara umum belum mencapai target sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah atau dengan kata lain belum memuaskan publik/pelanggan secara maksimal, ini terlihat dari rata-rata nilai efektivitas yang hanya sekitar 70 %.

BAB VI

PENUTUP

Setelah melihat pokok masalah yang penulis analisis dalam penelitian ini, melalui sebuah metode penelitian dan metode analisis yang diperkuat dengan sejumlah kajian teori untuk kemudian penulis kembangkan dalam bab pembahasan, maka dalam bab ini akan digambarkan rangkuman hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas pada bab sebelumnya. Selain itu dalam bab ini juga berisi saran-saran atau masukan, khususnya bagi instansi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan secara umum kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama jajarannya serta kepada pihak lain yang tertarik dengan wacana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah atau pengukuran kinerja keuangan daerah.

6.1 Kesimpulan

Dari hasil perhitungan rasio efisiensi dan efektivitas (pengukuran *value for money*), dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengukuran pada indikator masukan (*Input*) dapat dilihat bahwa biro-biro yang terdapat pada instansi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2004 tidak menggunakan semua *input* dana/anggaran dari yang telah dianggarkan/direncanakan untuk setiap kegiatan, sedangkan jika dilihat dari pengukuran indikator keluaran (*Output*) dapat dilihat bahwa sebagian besar target pencapaian fisik berhasil direalisasikan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan berhasil

melakukan penghematan/pengetatan anggaran yang sangat baik, atau lemah dalam hal perencanaan anggaran.

2. Berdasarkan hasil pengukuran hasil (*outcome*) dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan umumnya merasa puas dengan pencapaian hasil dari kegiatan tersebut. Ini terlihat dari persentase rata-rata 70%.
3. Dengan mengacu pada pengukuran rasio efisiensi, dapat dikatakan bahwa anggaran yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan sudah sangat efisiensi. Hal ini terlihat dari persentase rasio efisiensi yang rata-rata melebihi 100%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran untuk setiap kegiatan sudah sangat maksimal dalam merealisasikan keluaran (*output*) kegiatan.
4. Dengan mengacu pada pengukuran rasio efektivitas, dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Setda Provinsi Sulawesi Selatan belum dapat mencapai tujuan dan sasaran perkegiatan yang diharapkan secara maksimal. Hal ini terlihat dari persentase rasio efektivitas yang rata-rata hanya mencapai 70%. (persentase ideal adalah antara 90% s/d 100%).
5. Dengan mengacu pada konsep pengukuran *value for money* dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang telah direalisasikan telah menggunakan anggaran secara sangat efisiensi akan tetapi belum terlalu efektif dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kegiatan pemerintah, dalam hal ini khususnya kegiatan di bawah tanggung jawab instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

6.2. Saran

1. Untuk perencanaan dan penyusunan anggaran berbasis kinerja, instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya, dan Pemprov Sulawesi Selatan pada umumnya agar menekankan setiap unit kerja atau lembaga pemerintahan/publik untuk memahami dan menganalisa lebih mendalam substansi dari pada anggaran kinerja, mengetahui struktur dan komponen setiap standar biaya untuk setiap kegiatan, guna menjamin teridentifikasinya jumlah kebutuhan alokasi anggaran perkegiatan yang lebih akurat sesuai dengan kebutuhan riil yang diperlukan. Dalam penelitian ini banyak terlihat alokasi anggaran (*input*) yang jumlahnya besar sekali untuk setiap program kegiatan tetapi dalam pencapaian realisasi fisik (*output*) di lapangan ternyata alokasi anggaran ini tidak digunakan semua untuk mencapai *output* 100%. Walaupun kita ketahui bahwa bahasa anggaran adalah perencanaan dimana *mark up* anggaran dimungkinkan tetapi hendaknya *mark up* anggaran jangan terlalu besar, biasanya dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang stabil, *mark up* dimungkinkan sampai sebesar 5%. Logika pembenaran untuk perencanaan anggaran pada kejadian seperti ini bahwa sisa anggaran dapat dijadikan Sisa Perhitungan APBD (Anggaran) untuk di jadikan sumber pendapatan pada tahun berikutnya adalah tidak dapat dibenarkan, sebab perencanaan anggaran yang terlalu besar jumlahnya dan kemudian mendapatkan sisa anggaran dalam jumlah yang juga besar akan lebih meringankan beban anggaran jika digunakan pada tahun berjalan. Dengan demikian item Pembiayaan tidak terlalu ditekan (defisit anggaran yang terlalu besar dapat dikurangi) dan arus perputaran uang/anggaran secara langsung ataupun tidak langsung akan

berpengaruh pada tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, disamping itu sisa anggaran yang tidak terlalu besar akan mengurangi potensi terjadinya tindakan penyalahgunaan anggaran (korupsi). Jika kualitas perencanaan anggaran diperbaiki, maka layanan publik yang dijalankan secara tidak efisiensi dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik dapat dihilangkan dan dialokasikan untuk kegiatan yang lebih dibutuhkan atau lebih efektif. Dan jika aspek perencanaan anggaran tidak diperbaiki atau dibiarkan oleh Pemprov Sulawesi Selatan saat ini maka dalam jangka panjang cenderung akan memperlemah peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, kordinator dan *enterprenuer* dalam kegiatan pelayanan pemerintahan.

2. Proporsi dan sinergi dalam setiap komponen Belanja hendaknya lebih diperhatikan dan dipahami oleh pemerintah, sebab dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya setelah penggunaan anggaran berbasis kinerja ternyata persentase antara alokasi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal dalam komponen Belanja Aparatur dan Belanja Publik telah terjadi ketimpangan jumlah alokasi anggaran. Belanja Modal (khususnya dalam komponen belanja publik) yang terkait langsung dengan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat masih memiliki jumlah alokasi anggaran yang kecil. Begitupun dengan sinergi keterkaitan anggaran dalam setiap item Belanja Publik ini hendaknya belanja yang betul-betul saling terkait dan mendukung kelancaran proses pelayanan publik kepada masyarakat. Seperti misalnya dalam penelitian ini, alokasi anggaran Operasional dan Pemeliharaan yang memiliki jumlah anggaran yang realitif besar ke depan

dapat dikaji secara mendalam bentuk sinergi yang terbangun dengan alokasi anggaran Belanja Modal yang ada.

3. Dalam konteks *value for money*, hendaknya instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya memperhatikan efisiensi anggaran saja, tetapi juga efektivitas dari pada pencapaian tujuan, sasaran program dan kegiatan yang ada. Dapat digarisbawahi bahwa efektivitas merupakan salah satu instrumen terpenting dalam pelaksanaan *good governance*, sebab efektivitas merupakan kunci untuk merebut hati rakyat. Pemerintah dikatakan berhasil jika mampu memberikan pelayanan publik yang efektif. Ini terlihat dari sejauh mana kebijakan, program dan kegiatan itu memenuhi keinginan masyarakat atau mampu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
4. Evaluasi atau Pengukuran kinerja instansi pemerintahan tetap harus diperhatikan. Evaluasi yang ada hendaknya lebih akurat lagi mengingat dari hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan data untuk mendeteksi kelemahan atau kekurangan dari program kegiatan yang ada, dan juga sebagai data untuk perencanaan anggaran dan kebijakan pada tahun berikutnya. Mengingat perkembangan akuntansi keuangan daerah dan peraturan pemerintah terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah yang cepat berubah, setiap instansi pemerintahan termasuk Setda Pemrov Sulsel hendaknya mengembangkan berbagai alat evaluasi atau pengukuran kinerja keuangan agar didapatkan indikator keberhasilan program kegiatan yang lebih valid dan akurat.
5. Berdasarkan hasil kajian dan pendekatan teoritis, selama melakukan kegiatan penelitian ini terhadap beberapa kegiatan dari Setda Provinsi Sulawesi Selatan

ditemukan beberapa program kegiatan yang tidak tepat untuk dimasukkan dalam kelompok belanja publik. Kegiatan tersebut antara lain; kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan, kegiatan pengadaan kendaraan aparat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Kelemahan dalam penelitian ini adalah bahwa konsep pengukuran *value for money* penulis hanya fokuskan pada dua unsur penilaian yakni nilai efisiensi dan efektivitas saja. Sedangkan nilai ekonomis peneliti asumsikan sudah terpenuhi. Kedepan ada baiknya tiga unsur penilaian ini diteliti secara bersamaan. Kemudian kelemahan kedua, yakni anggaran yang kami jadikan data primer dalam penelitian ini belum direncanakan dengan memperhatikan konsep *value for money*.
7. Agar dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang kesimpulan pada point pertama dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah benar-benar efisiensi yang terjadi di instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan itu dari hasil pengetatan anggaran atau kerena perencanaan anggaran perkegiatan yang terlalu besar (dalam konsep *value for money* akan melihat nilai ekonomisnya)
8. Adanya laporan ini, mudah-mudahan dapat dijadikan refleksi dan bahan pertimbangan bagi semua pihak dalam lembaga pemerintahan daerah agar kedepan perencanaan, perhitungan, dan analisis *value for money* terhadap anggaran pemerintahan (DASK/APBD) dapat diperhatikan dan dipahami secara mendalam. Laporan ini juga mudah-mudahan dapat menjadi salah satu referensi bagi pihak lain yang tertarik untuk lebih mendalami wacana penerapan anggaran berbasis kinerja khususnya tentang konsep *value for money*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinta, Kustadi, *Pengantar Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Bandung, PT. Aditya Bakti, 1990
- Arifin Harfiadi, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Gowa*, Makassar, Jurusan Akuntansi FE-UH, 2005
- Badan Akuntansi Keuangan Negara Departemen Keuangan RI, *Reformasi Keuangan Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan*, Makalah yang Disampaikan pada Seminar *Good Governance* Ikatan Mahasiswa Akuntansi FE-UH, Makassar, 2004
- Baharuddin, Syafri Adnan, *Mencari Bentuk Standar Akuntansi Keuangan Daerah*, Makalah yang Disampaikan pada Seminar *Good Governance* Ikatan Mahasiswa Akuntansi FE-UH, Makassar, 2004
- Bastian Indra, *Manual Akuntansi Pemerintahan Daerah*, Pusat Pengembangan Akuntansi Yogyakarta, Fakultas Ekonomi UGM, 2001
- Basri Zainul Yuswar dan Subri Mulyadi, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003
- Chotob Iskadir dan Suhardjo Imam, *Dari Sentralisasi Ke Otonomi DKI Jakarta*, Jakarta, DPRD-DKI Jakarta, 2000
- Halim Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat, 2001
- Hariyoso H.S, *Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Peradaban, 2002
- Idan, *Pengukuran Kinerja Dinas Bina Marga Kota Makassar Dalam Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan dan Peningkatan Jalan A.P.Pettarani Makassar*, Makassar, Jurusan Akuntansi FE-UH, 2005
- Isowara Dr. E., *Otonomi Daerah. Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001
- Lembaga Administrasi Negara dan BPKP, *Akuntabilitas dan Good Governance: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Modul 1 sampai 5, Jakarta: LAN dan BPKP
- Makriasmu, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama : Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Pergerakan Transparansi Indonesia, *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Jakarta, MTI, 2002

- Menteri Dalam Negeri RI, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta, BP. Panca Usaha Putra, 2004
- Moleong Lexy J. Dr., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1993
- Muhammad Fadel, *Dukungan Kelembagaan dan Peraturan Daerah Dalam Pelayanan Publik dan Investasi*, Artikel yang dimuat dalam Majalah Berita 'Waktoe' No. 20/Tahun Kelima Edisi Agustus 2005, Halaman 6 s/d 9, Makassar, Percetakan Media Fajar, 2005
- Munir Badrul, *Perencanaan Anggaran Kinerja, Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah*, Yogyakarta, Samawa Center, 2003
- Muhtamar Shaff, *Buku Cerdas Sulawesi Selatan*, Gowa, Yayasan Karaeng Pattingaloang-Perpustakaan Abdurrasyid Daeng Lurang, 2005
- Pemprov Sulawesi Selatan, *Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2004*, Makassar, 2003.
-
- _____, *Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008*, Makassar, 2003
- Pide, Andi Mustari Dr. H. SH, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1999
- Rasal Sjahrudun, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas dan Anggaran Dalam Perspektif UU NO. 17 Tahu 2003 Tentang Keuangan Negara*, Jakarta, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2003
- Rasyid, Mohammad Ryaas, *Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*, Jakarta, Yarsif Watampone, 1997
- Sangkala Ruslan, Dr., *Optimalisasi Pelayanan Publik Dalam Kerangka Good Governance*, Makalah yang Disampaikan pada Seminar Good Governance Ikatan Mahasiswa Akuntansi FE-UH, Makassar, 2004
- Sarudjang. S.H, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalannya*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003

- Sedarmayanti, Dr. Dra. MPd, "Good Governance (Kepemerintahan yang baik), Dalam Rangka Otonomi Daerah. Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan, Bandung, Mandar Maju, 2003
- Singarimbun dan S. Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta, PT. Pustaka LP3ES, 1999
- Soemarso, *Pengantar Akuntansi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1995
- Sugian, Sondang P, Prof. Dr. M.P.A., *Patologi Birokrasi. Analisis, Identifikasi dan Terapinya*, Jakarta, 1994
- Thoha, Prof. Dr. Miftah, M.P.A., *Birokrasi dan Politik Indonesia*, Jakarta, 2003
- Widiryanto Agus, *Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002*, Makalah Disampaikan pada Pekan Ilmiah Akuntansi, Samarinda, Universitas Lambung Mangkurat, 2005